



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN

**PENGADILAN
TINGGI BANTEN
TAHUN 2021**

Jl. Raya Pandeglang Km. 6,6 Serang, Banten
Telp. (0254) 250002, Faks. (0254) 250001
Website : www.pt-banten.go.id Email : humas@pt-banten.go.id
Serang - 42126



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmatNya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Tinggi Banten dapat kami sajikan.

Laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Banten dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama tahun 2021.

Secara keseluruhan, laporan ini menggambarkan kegiatan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dalam mengemban tugas sesuai arahan dan kerangka kerja yang telah ditetapkan Mahkamah Agung sebagai instansi vertikal di atasnya.

Jajaran Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten senantiasa meningkatkan pelayanan kepada para pencari keadilan sehingga dapat memberikan pelayanan prima. Berbagai program telah dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan publik, diantaranya berbagai aplikasi yang menjadi unggulan utama Mahkamah Agung yaitu SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), Siwas, E-court dan E-litigasi.

Dalam menjamin pelaksanaan operasional yang transparan dan akuntabel pun, Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya berusaha mempertahankan dan meningkatkan perannya melalui program akreditasi penjaminan mutu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Pembangunan Zona Integritas dan langkah-langkah menuju pencapaian WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).

Akhirnya, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten atas segala dedikasi dan partisipasi aktifnya. Semoga hasil kerja keras ini dapat memberikan manfaat dan informasi yang berguna. Kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan demi peningkatan kualitas dan kinerja Pengadilan Tinggi Banten.

Serang, 20 Januari 2022

Ketua,


CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H. *fm*

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
Bab II A. Keadaan Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten	3
 B. Penyelesaian Perkara di Lingkungan Pengadilan Tinggi Banten	4
1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	4
2. Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	5
3. Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	6
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi	6
5. Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi	7
 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	7
1. Posbakum	7
2. Sidang Keliling/ Pelayanan Terpadu	8
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	9
Bab III Sumber Daya Manusia	10
Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan	10
1. Mutasi	11
2. Promosi	14
3. Pensiun	16
4. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis)	17
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana & Prasarana, dan Teknologi Informasi ...	22
 A. Pengelolaan Keuangan	22
 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	26
 C. Pengelolaan Teknologi Informasi	35
1. Implementasi <i>E-court</i> di Lingkungan Peradilan Umum	37
2. Implementasi SIPP di Lingkungan Peradilan Umum	39
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	41
1. Akreditasi Penjaminan Mutu	41
2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu	47
3. Inovasi Pelayanan Publik	52
Bab VI Pengawasan	63
 A. Internal	63
 B. Evaluasi	69
Bab VII Penutup	79
 A. Kesimpulan	79
 B. Rekomendasi	80
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :143/KMA/SK/VIII/ 2007 tanggal 2 November 2007 tentang Pemberlakuan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan) dan menindaklanjuti surat Sekretaris Mahkamah Agung R.I Nomor: 3111/SEK/OT.01.2/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021, Pengadilan Tinggi Banten sebagai Pengadilan Tingkat Banding pada Provinsi Banten di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagai laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan pengelolaan administrasi Pengadilan Tinggi Banten dan jajaran Pengadilan di bawahnya karena Pengadilan Tinggi Banten selain mempunyai fungsi yudikatif atau penyelesaian perkara, juga memiliki fungsi pengawasan, mengatur dan administratif terhadap Pengadilan Tingkat Pertama di bawahnya.

Administrasi Pengadilan Tinggi Banten dibebankan menurut teknis dan non teknis yang dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan. Sehingga kegiatan itu bisa terlaksana efisien dan efektif.

Pengadilan Tinggi Banten mempunyai visi dan misi sebagai berikut:

Visi : "Mendukung terwujudnya badan peradilan yang agung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten".

Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Banten;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Banten;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pada Pengadilan Tinggi Banten;

Selama kurun waktu tahun 2021, Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan peradilan Umum dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.

Beberapa aplikasi yang telah diterapkan dan selalu berusaha untuk ditingkatkan kinerjanya yaitu :

- SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara), saat ini menggunakan SIPP versi 4.1.1
- Siwas (Aplikasi Pengawasan) versi 3.0 yang bermanfaat bagi pencari keadilan jika menemukan dugaan pelanggaran kode etik di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri di bawahnya, maka dapat melaporkan

melalui aplikasi ini.

- E-court adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik.
- E-litigasi. Dengan kehadiran e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

Selanjutnya, masih dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Pengadilan Tinggi Banten juga tetap konsisten dan senantiasa meningkatkan kinerja melalui program-program sebagai berikut :

- PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu pelayanan pengadilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan melalui satu pintu. PTSP ditujukan untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur serta memberikan kualitas pelayanan yang prima dan akuntabel sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum. Pedoman standar PTSP pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri diatur dalam SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/HM03.3/2/2018.
- Akreditasi Penjaminan Mutu yang merupakan program dari Dirjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan kinerja peradilan Indonesia yang unggul/prima. Bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan seluruh Pengadilan Negeri di bawahnya telah memperoleh akreditasi A dari Dirjen Badilum.
- Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan WBK dan WBBM, dalam rangka pencegahan korupsi, penerapan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan predikat ini.

BAB II PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

Keadaan perkara di tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut :

SATKER	PERKARA	SISA THN 2020	MASUK THN 2021	PUTUS THN 2021	SISA THN 2021	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA TH.2021	
PT Banten	Pidana	Biasa	4	173	172	5	97%
		Anak	-	6	6	-	100%
		Tipikor	-	3	2	1	67%
	Perdata	Perdata	25	259	271	13	95%
PN Tangerang	Pidana	Biasa	531	2.117	2.083	674	79%
		Cepat	-	44.620	44.620	-	100%
		Anak	2	38	38	2	95%
		Pra Peradilan	-	15	15	-	100%
	Perdata	Gugatan	564	1.137	1.129	572	66%
		Permohonan	62	1.127	1.104	85	93%
		Gugatan Sederhana	19	84	91	12	88%
Perlawanan/Bantahan	10	32	25	17	60%		
PN Serang	Pidana	Biasa	221	1.128	1.148	201	85%
		Cepat	-	41	41	-	100%
		Anak	-	39	37	2	95%
		Pra Peradilan	-	18	16	2	89%
		Tipikor	8	35	26	17	60%
	Perdata	Gugatan	74	165	180	59	75%
		Permohonan	8	302	300	10	97%
		Gugatan Sederhana	1	27	26	2	93%
Perlawanan/Bantahan	2	2	3	1	75%		
PHI	53	154	177	30	86%		
PN Pandeglang	Pidana	Biasa	28	277	292	13	96%
		Cepat	-	-	-	-	-
		Anak	-	11	11	-	100%
		Pra Peradilan	-	1	1	-	100%
	Perdata	Gugatan	9	33	33	9	79%
		Permohonan	-	18	17	1	94%
		Gugatan Sederhana	-	66	66	-	100%
Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-		
PN Rangkasbitung	Pidana	Biasa	38	236	247	27	90%
		Cepat	-	12	12	-	100%
		Anak	-	5	5	-	100%
		Pra Peradilan	-	-	-	-	-
	Perdata	Gugatan	6	31	26	11	70%
		Permohonan	-	57	56	1	98%
		Gugatan Sederhana	-	6	6	-	100%
Perlawanan/Bantahan	-	-	-	-	-		

B. PENYELESAIAN PERKARA DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI BANTEN

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Berikut ini rincian jumlah sisa perkara yang diputus di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten di tahun 2021.

NO.	SATKER	PERKARA	SISA PERKARA TH.2020	SISA PERKARA TH.2020 YANG DIPUTUS PADA TH.2021	PERSEN-TASE PENYELESAIAN SISA PERKARA	
1.	PT Banten	Pidana	Biasa	4	4	100%
			Anak	-	-	-
			Tipikor	-	-	-
		Perdata	Perdata	25	25	100%
2.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	531	531	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	2	2	100%
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	564	564	100%
			Permohonan	62	62	100%
			Gugatan Sederhana	19	19	100%
Perlawanan/Bantahan	10	10	100%			
3.	PN Serang	Pidana	Biasa	221	221	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	100%
			Pra Peradilan	-	-	100%
			Tipikor	8	8	100%
		Perdata	Gugatan	74	73	99%
			Permohonan	8	8	100%
			Gugatan Sederhana	1	1	100%
Perlawanan/Bantahan	2	2	100%			
PHI	30	30	100%			
4.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	28	28	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	9	9	100%
			Permohonan	-	-	-
			Gugatan Sederhana	-	-	-
Perlawanan/Bantahan	-	-	-			
5.	PN Rangkasbitung	Pidana	Biasa	38	38	100%
			Cepat	-	-	-
			Anak	-	-	-
			Pra Peradilan	-	-	-
		Perdata	Gugatan	6	6	100%
			Permohonan	-	-	-
			Gugatan Sederhana	-	-	-
Perlawanan/Bantahan	-	-	-			

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Berikut ini rincian jumlah perkara yang diputus tepat waktu di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2021.

NO.	SATKER	PERKARA	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2021	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA DIPUTUS TIDAK TEPAT WAKTU	PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA DIPUTUS TEPAT WAKTU	
1.	PT Banten	Pidana	Biasa	172	172	-	100%
			Anak	6	6	-	100%
			Tipikor	2	2	-	100%
		Perdata	Perdata	271	271	-	100%
2.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	2.083	1985	98	95%
			Cepat	44.620	44.620	-	100%
			Anak	38	38	-	100%
			Pra Peradilan	15	15	-	100%
		Perdata	Gugatan	1.129	928	201	82%
			Permohonan	1.104	1104	-	100%
			Gugatan Sederhana	91	91	-	100%
Perlawanan/ Bantahan	25	20	5	80%			
3.	PN Serang	Pidana	Biasa	1.148	1.112	36	97%
			Cepat	41	41	-	100%
			Anak	37	37	-	100%
			Pra Peradilan	16	16	-	100%
			Tipikor	26	11	15	42%
		Perdata	Gugatan	180	145	35	81%
			Permohonan	300	300	-	100%
			Gugatan Sederhana	26	26	-	100%
			Perlawanan/ Bantahan	3	3	-	100%
PHI	177	163	14	92%			
4.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	292	292	-	100%
			Cepat	-	-	-	-
			Anak	11	11	-	100%
			Pra Peradilan	1	1	-	100%
		Perdata	Gugatan	33	33	-	100%
			Permohonan	17	17	-	100%
			Gugatan Sederhana	66	66	-	100%
Perlawanan/ Bantahan	-	-	-	-			
5.	PN Rangkasbitung	Pidana	Biasa	247	247	-	100%
			Cepat	12	12	-	100%
			Anak	5	5	-	100%
			Pra Peradilan	-	-	-	-
		Perdata	Gugatan	26	26	-	100%
			Permohonan	56	56	-	100%
			Gugatan Sederhana	6	6	-	100%
Perlawanan/ Bantahan	-	-	-	-			

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING, KASASI DAN PK

Berikut ini rincian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, kasasi dan PK (Peninjauan Kembali) di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2021.

NO.	SATKER	PERKARA		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2021	JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2021 TIDAK MENGAJUKAN BANDING		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2021 TIDAK MENGAJUKAN KASASI		JUMLAH PERKARA PUTUS TH.2021 TIDAK MENGAJUKAN PK	
					JUM-LAH	PER SEN TASE	JUM-LAH	PER SEN TASE	JUM-LAH	PER SEN TASE
1.	PN Tangerang	Pidana	Biasa	2.083	1.967	94%	2.004	96%	2072	99%
			Anak	38	37	97%	5	13%	31	82%
		Perdata	Gugatan	1.129	916	81%	1.099	97%	1.006	89%
2.	PN Serang	Pidana	Biasa	1.148	1.091	95%	1.107	96%	1.145	99,7%
			Anak	37	37	100%	36	97%	37	100%
		Perdata	Tipikor	26	19	73%	24	92%	24	92%
			Gugatan	180	137	76%	153	85%	176	98%
3.	PN Pandeglang	Pidana	Biasa	292	281	96%	289	99%	292	100%
			Anak	11	11	100%	11	100%	11	100%
		Perdata	Gugatan	33	29	88%	32	97%	33	100%
4.	PN Rangkas-bitung	Pidana	Biasa	247	241	98%	240	97%	240	97%
			Anak	5	5	100%	5	100%	5	100%
		Perdata	Gugatan	26	21	81%	23	88%	23	88%

4. JUMLAH PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI

Berikut ini rincian jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten pada tahun 2021.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PERDATA YANG DIMEDIASI DI TH.2021	STATUS KEBERHASILAN MEDIASI			DALAM PROSES
			BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	PN Tangerang	670	36	526	7	101
2.	PN Serang	127	7	108	-	12
3.	PN Pandeglang	19	1	15	-	3
4.	PN Rangkas-bitung	27	2	22	3	-

5. JUMLAH PERKARA ANAK YANG BERHASIL MELALUI DIVERSI

Berikut ini rincian jumlah perkara pidana anak pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang berhasil didiversi pada tahun 2021.

NO.	SATKER	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK TH.2021	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DIDIVERSI TH.2021	STATUS KEBERHASILAN DIVERSI			DALAM PROSES
				BERHASIL	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	
1.	PN Tangerang	38	10	3	7	-	-
2.	PN Serang	39	-	-	-	-	-
3.	PN Pandeglang	11	1	1	-	-	-
4.	PN Rangkas-bitung	5	5	4	1	-	-

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Akreditasi Penjaminan Mutu merupakan program dari Ditjen Badan Peradilan Umum untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul. Di dalam program akreditasi penjaminan mutu ini diatur pengelolaan Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo yang juga didukung dengan tersedianya anggaran pada DIPA 03 dalam rangka memberikan layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu.

1. POSBAKUM

Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan memberikan pelayanan pemberian informasi, konsultasi dan nasihat hukum atau membantu pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan, serta memberikan referensi mengenai pengacara yang akan mendampingi di persidangan. Pada setiap Pengadilan dibentuk Posbakum Pengadilan dengan menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana/prasarana untuk Posbakum. Masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, hanya perlu menyiapkan dokumen berikut :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau KKM/Jamkesmas/Kartu Raskin/PKH/BLT/KPS/ dokumen lain yang memberikan keterangan tidak mampu.
2. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh pemohon layanan dan disetujui oleh petugas posbakum.

Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Posbakum dan realisasinya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

NO.	SATKER	ANGGARAN POSBAKUM		
		Pagu	Realisasi	Persentase
1.	PN Tangerang	Rp.33.600.000	Rp.33.600.000	100%
2.	PN Serang	Rp.48.000.000	Rp.48.000.000	100%
3.	PN Pandeglang	Rp.31.200.000	Rp.31.200.000	100%
4.	PN Rangkasbitung	Rp.31.200.000	Rp.31.200.000	100%

2. SIDANG KELILING/ PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan di suatu tempat di luar gedung Pengadilan untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana. Program ini untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah pelosok di mana ada kesulitan untuk menjangkau gedung pengadilan karena hambatan biaya, fisik maupun geografis. Namun demikian, tidak ada alokasi anggaran untuk program tersebut pada satker sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Pada Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada kegiatan sidang keliling selama tahun 2021. Sedangkan pada Pengadilan Negeri Tangerang, ada kegiatan sidang di luar gedung Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2021, yaitu untuk perkara Tipiring (Tindak Pidana Ringan) dan datanya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Rekapitulasi Laporan Perkara Tipiring PN Tangerang Tahun 2021

No.	Bulan	Masuk	Putus	Denda (Rp.)
1.	Januari	-	-	-
2.	Februari	-	-	-
3.	Maret	15	15	Rp. 2.000.000
4.	April	3	3	Rp. 5.500.000
5.	Mei	-	-	-
6.	Juni	59	59	Rp. 2.350.000
7.	Juli	157	157	Rp. 26.850.000
8.	Agustus	24	24	Rp. 3.100.000
9.	September	10	10	Rp. 3.600.000
10.	Oktober	-	-	-
11.	November	12	12	Rp.20.200.000
12.	Desember	34	34	Rp. 1.700.000

3. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Berdasarkan Perma No.1 tahun 2014, bahwa layanan pembebasan biaya perkara dilaksanakan melalui pemberian bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan. Program ini ditujukan bagi orang/ sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi. Satker di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang mendapatkan alokasi anggaran Pembebasan Biaya Perkara dan realisasinya pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	SATKER	JUMLAH ANGGARAN PERKARA PRODEO	REALISASI	PERSENTASE
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	Rp. 2.760.000,-	Rp. 540.000	19,56%
2.	Pengadilan Negeri Serang	Rp. 1.840.000,-	-	-

Pada tahun 2021 tidak ada realisasi anggaran perkara prodeo pada Pengadilan Negeri Serang dikarenakan sampai dengan akhir tahun 2021 tidak ada pencari keadilan yang mengajukan perkara dengan pembebasan biaya perkara. Sedangkan jumlah perkara prodeo tahun 2021 pada Pengadilan Negeri Tangerang sebanyak 4 (empat) perkara, yang masuk pada bulan Februari (1 perkara), Maret (2 perkara) dan Juni (1 perkara).

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Berikut ini rincian komposisi SDM di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan kepengkatan, golongan dan pendidikan per Januari 2021.

KETERANGAN		KOMPOSISI SDM SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE- RANG	PN SERANG	PN PANDE- GLANG	PN RANGKAS -BITUNG
JUMLAH SDM		71	119	63	36	34
KEPANGKATAN (GOL. /RUANG)	Pembina Utama (IV/e)	22	-	-	-	-
	Pembina Utama Madya (IV/d)	1	14	2	-	-
	Pembina Utama Muda (IV/c)	2	12	6	-	-
	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	1	7	-	-
	Pembina (IV/a)	10	9	4	3	3
	Penata Tingkat I (III/d)	20	37	21	12	13
	Penata (III/c)	6	20	13	11	10
	Penata Muda Tingkat I (III/b)	4	14	4	5	3
	Penata Muda (III/a)	2	2	3	3	3
	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	1	1	-	-
	Pengatur (II/c)	2	6	1	1	1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	-	3	-	1	1
	Pengatur Muda (II/a)	-	-	1	-	-
	PENDIDIKAN	S3	2	3	1	-
S2		30	38	19	12	7
S1		35	58	37	18	22
D3		1	4	1	3	1
SMA		3	15	4	3	4
SMP		-	1	-	-	-
SD		-	-	1	-	-

1. MUTASI

a. Mutasi Masuk

Mutasi masuk pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2021 secara keseluruhan ada 57 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA (MUTASI DARI)
1.	PT BANTEN	H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., MH	KETUA	KETUA PT TANJUNGPANDE
2.	PT BANTEN	EFENDI PASARIBU, S.H., M.H.	HAKIM TINGGI	HT PT MAKASSAR
3.	PT BANTEN	SUPRIYONO, SH, M.HUM	HAKIM TINGGI	HT PT MEDAN
4.	PT BANTEN	DR. HJ. SITI SURYATI, S.H., M.H., M.M.	HAKIM TINGGI	HT PT BANJARMASIN
5.	PT BANTEN	YUFERY F. RANGKA, S.H., M.H.	HAKIM YUST	HAKIM PN BEKASI
6.	PT BANTEN	YANI IRAWATI, SH.,MH	PP	PANMUD PERDATA PN PANDEGLANG
7.	PT BANTEN	YANI SOFYAN, S.H.	PP	PANMUD HUKUM PN CIBADAK
8.	PT BANTEN	RIAN ABURISMAN, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN SUMEDANG
9.	PT BANTEN	MEITA YULIANA, S.H.	PP	PP PN SERANG
10.	PT BANTEN	TURASIH, S.H.	PP	PANMUD HUKUM PN PEMALANG
11.	PT BANTEN	KOSASIH, S.H.	PP	PP PN JAKARTA TIMUR
12.	PN TANGERANG	FATHUL MUJIB, SH, MH	HAKIM	KETUA PN TUBAN
13.	PN TANGERANG	DRS. TUGIYANTO, BC IP., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA UTARA
14.	PN TANGERANG	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN SERANG
15.	PN TANGERANG	EDY TOTO PURBA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN SAMARINDA
16.	PN TANGERANG	BARITA SINAGA, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN SERANG
17.	PN TANGERANG	RUSTIYONO, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
18.	PN TANGERANG	WISNU RAHARDI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN SERANG
19.	PN TANGERANG	ISMAIL HIDAYAT, S.H.,M.H.	HAKIM	HAKIM PN TANJUNGPANDE
20.	PN TANGERANG	LUCKY ROMBOT KALALO, SH	HAKIM	HAKIM PN AMBON
21.	PN TANGERANG	RAKHMAN RAJA GUGUK, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
22.	PN TANGERANG	SAIDIN BAGARIANG, SH	HAKIM	HAKIM PN MEDAN
23.	PN TANGERANG	RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH, MH	HAKIM	HAKIM PN BANJARMASIN
24.	PN TANGERANG	NUNYATI, S.H., M.H.	PP	PANMUD PERDATA PN SERANG
25.	PN TANGERANG	ANITA RAHMAWATI, SH., MH	PP	PP PN SERANG
26.	PN TANGERANG	ASTRID HASTRIDIAN, SH., MH	PP	PP PN BOGOR
27.	PN TANGERANG	FERRY NITA, SH	PP	PP PN JAKARTA SELATAN
28.	PN TANGERANG	YETTI, SH.,MH	PP	PP PN JAKARTA UTARA
29.	PN TANGERANG	AMBO ADI MANGGAUKANG, SH	JS	JS PN MAKASSAR
30.	PN TANGERANG	ENDANG PURWANINGSIH, SH., MH	PANMUD PERDATA	PANMUD PERDATA PN CIBINONG
31.	PN TANGERANG	YURIS DHETIAWAN, SH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
32.	PN TANGERANG	HILMAN SYAHADAT, S.T.	PP	PP PN SUBANG
33.	PN TANGERANG	MISKAH, S.H.	JS	JS PN BEKASI

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN SEBELUMNYA (MUTASI DARI)
34.	PN SERANG	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH	PANMUD TIPIKOR	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
35.	PN SERANG	RIA WAHYUNI, S.H., M.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD PERDATA PN BOGOR
36.	PN SERANG	AGUS TUNAS S., S.H., M.H.	PP	PP PN CIBINONG
37.	PN SERANG	SUGIHARTO, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN JAMBI
38.	PN SERANG	DEDI IRAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN PANDEGLANG
39.	PN SERANG	YULIANA, S.H, M.H	HAKIM	KETUA PN KOBA
40.	PN SERANG	MARLIYUS MS., S.H., M.H.	KETUA	KETUA PN PALU
41.	PN SERANG	LILIK SUGIHARTONO, SH	HAKIM	HAKIM PN PALU
42.	PN SERANG	TOTOK SAPTO INDRATO, S.H., M.H.	KETUA	WAKIL PN PALANGKARAYA
43.	PN SERANG	NURUL IMAN, S.H.	PP	PP PN PANDEGLANG
44.	PN SERANG	ELEINE FEBRIANA, S.H.	PP	PP PN PANDEGLANG
45.	PN SERANG	NUR HIDAYAH, S.H.	PP	PP PN PANDEGLANG
46.	PN PANDEGLANG	INDIRA PATMI, S.H.	WAKIL KETUA	WAKIL KETUA PN KOBA
47.	PN PANDEGLANG	EVA KHOERIZQIAH, SH.	HAKIM	HAKIM PN SLAWI
48.	PN PANDEGLANG	DJOKO SANTOSO, S.H., M.H.	PANITERA	PANMUD PIDANA PN JAKARTA PUSAT
49.	PN PANDEGLANG	ARIGAYOTA DARHADI NARANDANA KALA, SH	PP	PP PN ATAMBUA
50.	PN PANDEGLANG	GITA NUNGKY NATALIE, SH	PP	JSP PN RANGKASBITUNG
51.	PN PANDEGLANG	SAUDUR DERIT KRISYANNA, SH., MH	PANMUD HUKUM	PP PN DEPOK
52.	PN RANGKASBITUNG	DEDE HALIM, S.H., M.H.	KETUA	KETUA PN SAWAHLUNTO
53.	PN RANGKASBITUNG	DWI NOVITA PURBASARI, S.H.	HAKIM	HAKIM PN PANGKALANBALAI
54.	PN RANGKASBITUNG	ERWIN EFFENDI LOEIS, SE., SH., MH	PANITERA	PANMUD PERDATA PN JAKARTA BARAT
55.	PN RANGKASBITUNG	AGUS MAULANA, S.H.	PANMUD PERDATA	PP PN SERANG
56.	PN RANGKASBITUNG	SUPARNO, S.H.	PANMUD PIDANA	PP PN SERANG
57.	PN RANGKASBITUNG	RETNO DWI HAPSARI, S.H.	PP	JSP PN TANGERANG

b. Mutasi Keluar

Mutasi keluar pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2021 secara keseluruhan ada 62 orang dengan rincian sebagai berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU (MUTASI KE)
1.	PT BANTEN	ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, S.H., MH.	HAKIM TINGGI	HT PT MEDAN
2.	PT BANTEN	SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H., MH	HAKIM TINGGI	HT PT JAKARTA
3.	PT BANTEN	AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	PANMUD PIDANA PT BANGKA BELITUNG
4.	PN TANGERANG	SYAMSUDIN, S.H.	HAKIM	HT PT AMBON
5.	PN TANGERANG	HARRY SUPTANTO, SH	HAKIM	HAKIM PN SURAKARTA
6.	PN TANGERANG	GATOT SARWADI, S.H.	HAKIM	HAKIM PN SEMARANG
7.	PN TANGERANG	YUFERY F. RANGKA, SH., M.H	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
8.	PN TANGERANG	SUTARJO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN SIDOARJO
9.	PN TANGERANG	H. SUCIPTO, S.H.	HAKIM	HAKIM PN BANDUNG

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU (MUTASI KE)
10.	PN TANGERANG	NELSON PANJAITAN, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN MEDAN
11.	PN TANGERANG	SRI SUHARINI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA BARAT
12.	PN TANGERANG	HALOMOAN SIANTURI, SH, MH	HAKIM	HAKIM PN SURAKARTA
13.	PN TANGERANG	DIDIT SUSILO GUNTONO, SH, MH	HAKIM	HT PT PALANGKARAYA
14.	PN TANGERANG	ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.	HAKIM	HT PT JAMBI
15.	PN TANGERANG	MAHMURIADIN, SH	HAKIM	HAKIM PN JAKARTA UTARA
16.	PN TANGERANG	AGUS PRASETYO, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN PANDEGLANG
17.	PN TANGERANG	TITI YULIATI, S.H.	PP	PP PN JAKARTA PUSAT
18.	PN TANGERANG	VERONICA CHRISTIN SOFIANA,SH.,MH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
19.	PN TANGERANG	LIS MARDIANA, SH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
20.	PN TANGERANG	ADE KOMARUDIN, SH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
21.	PN TANGERANG	ETY MEIROHYATI, SH., MH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
22.	PN TANGERANG	RETNO DWI HAPSARI, S.H.	JSP	PP PN RANGKASBITUNG
23.	PN TANGERANG	AUSRI M., S.H., M.H.	JS	JS PN JAKARTA SELATAN
24.	PN TANGERANG	AGUS SOFYAN, S.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD PERIKANAN PN JAKARTA UTARA
25.	PN TANGERANG	IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H.	JSP	PP PN PURWOKERTO
26.	PN SERANG	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN TANGERANG
27.	PN SERANG	YUSRIANSYAH, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN BANJARMASIN
28.	PN SERANG	BARITA SINAGA, S.H., M.H.	KETUA	WKPN TANGERANG
29.	PN SERANG	DR. GUTIASO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN TASIKMALAYA
30.	PN SERANG	NGURAH SURADATTA D. S.H., M.H.	HAKIM	WKPN KANDANGAN
31.	PN SERANG	EMANUEL ARI BUDIHARJO, S.H.	HAKIM	HAKIM PN SEMARANG
32.	PN SERANG	HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
33.	PN SERANG	WISNU RAHARDI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN TANGERANG
34.	PN SERANG	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	HAKIM	HK YUST MA DIP. MA RI
35.	PN SERANG	MARLIYUS MS., S.H., M.H.	KETUA	WAKIL KETUA PN MEDAN
36.	PN SERANG	DR. ERWANTONI, S.H., M.H.	HAKIM	HT PT BABEL
37.	PN SERANG	SITTI HARYATI, SH	PP	PANMUD PIDANA PN KARAWANG
38.	PN SERANG	AGUS MAULANA, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
39.	PN SERANG	NUNYATI, S.H, M.H.	PANMUD PERDATA	PP PN TANGERANG
40.	PN SERANG	SUPARNO, S.H.	PP	PANMUD PIDANA PN RANGKASBITUNG
41.	PN SERANG	ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.	PP	PP PN JAKARTA SELATAN
42.	PN SERANG	YOSUA AUGUSTINUS PARHARASANKALIT, SH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
43.	PN SERANG	ANITA RAHMAWATI, S.H., M.H.	PP	PP PN TANGERANG
44.	PN SERANG	MEITA YULIANA, S.H.	PP	PP PT BANTEN
45.	PN SERANG	SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA	PANITERA PN MENGGALA
46.	PN SERANG	YUSRIZAL, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN BEKASI
47.	PN PANDEGLANG	YOGI DULHADI, S.H., M.H.	KETUA	WKPN INDRAMAYU
48.	PN PANDEGLANG	MARIA KRISTA ULINA GINTING, SH, M.KN	HAKIM	HAKIM PN CIKARANG
49.	PN PANDEGLANG	RAVITA LINA, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN INDRAMAYU
50.	N PANDEGLANG	YANI IRAWATI, S.H.	PANMUD PERDATA	PP PT BANTEN

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	JABATAN BARU (MUTASI KE)
51.	PN PANDEGLANG	NURUL IMAN, S.H.	PP	PP PN SERANG
52.	PN PANDEGLANG	ELEINE FEBRIANA, S.H.	PP	PP PN SERANG
53.	PN PANDEGLANG	DEDI IRAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN SERANG
54.	PN PANDEGLANG	NUR HIDAYAH, S.H.	PP	PP PN SERANG
55.	PN RANGKASBITUNG	MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, S.H., M.H.	KETUA	WKPN GARUT
56.	PN RANGKASBITUNG	HANDY REFORMEN KACARIBU, SH, MH	HAKIM	HAKIM PN KARAWANG
57.	PN RANGKASBITUNG	INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM YUST MARI DIP KEPANITERAAN
58.	PN RANGKASBITUNG	LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM YUST MARI DIP HUMAS
59.	PN RANGKASBITUNG	SUMARDIYANTA, S.H., M.H.	PANITERA	PP PT JAKARTA
60.	PN RANGKASBITUNG	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH	PANMUD PERDATA	PANMUD TIPIKOR PN SERANG
61.	PN RANGKASBITUNG	DUDI GUSMAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD HUKUM PN BOGOR
62.	PN RANGKASBITUNG	GITA NUNGKY NATALIE, S.H.	JSP	PP PN PANDEGLANG

2. PROMOSI

Promosi jabatan SDM pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN LAMA	JABATAN BARU
1.	PT BANTEN	TRI WIDODO, S.H.,M.H.	PP	PANMUD TIPIKOR PT BANTEN
2.	PT BANTEN	SATRIA ARI WIBOWO, A.Md.	ANALIS HUKUM	KASUBAG UMUM & KEUANGAN PN PANDEGLANG
3.	PT BANTEN	AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.	PANMUD TIPIKOR	PANMUD PIDANA PT BANGKA BELITUNG
4.	PN TANGERANG	SYAMSUDIN, S.H.	HAKIM	HT PT AMBON
5.	PN TANGERANG	SUTARJO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN SIDOARJO
6.	PN TANGERANG	DIDIT SUSILO G., SH, MH	HAKIM	HT PT PALANGKARAYA
7.	PN TANGERANG	ROEDY SUHARSO, S.H., M.H.	HAKIM	HT PT JAMBI
8.	PN TANGERANG	AGUS PRASETYO, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN PANDEGLANG
9.	PN TANGERANG	RETNO DWI HAPSARI, S.H.	JSP	PP PN RANGKASBITUNG
10.	PN TANGERANG	AGUS SOFYAN, S.H.	PANMUD PERDATA	PANMUD PERIKANAN PN JAKARTA UTARA
11.	PN TANGERANG	IWAN KURNIAWAN, S.T., S.H.	JSP	PP PN PURWOKERTO
12.	PN SERANG	EMY TJAHJANI WIDIASTOETI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN TANGERANG
13.	PN SERANG	BARITA SINAGA, S.H., M.H.	KETUA	WKPN TANGERANG
14.	PN SERANG	DR. GUTIASO, S.H., M.H.	WAKIL KETUA	KETUA PN TASIKMALAYA
15.	PN SERANG	NGURAH SURADATTA D. S.H., M.H.	HAKIM	WKPN KANDANGAN
16.	PN SERANG	EMANUEL ARI BUDI HARJO, S.H.	HAKIM	HAKIM PN SEMARANG
17.	PN SERANG	HOSI ANNA M. S., S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM PN BEKASI
18.	PN SERANG	WISNU RAHARDI, SH, M.HUM	HAKIM	HAKIM PN TANGERANG

19.	PN SERANG	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	HAKIM	HK YUST MA DIP. MA RI
20.	PN SERANG	MARLIYUS MS., S.H., M.H.	KETUA	WAKIL KETUA PN MEDAN
21.	PN SERANG	DR. ERWANTONI, S.H., M.H.	HAKIM	HT PT BABEL
22.	PN SERANG	SITTI HARYATI, SH	PP	PANMUD PIDANA PN KARAWANG
23.	PN SERANG	AGUS MAULANA, S.H.	PP	PANMUD PERDATA PN RANGKASBITUNG
24.	PN SERANG	NUNYATI, S.H, M.H.	PANMUD PERDATA	PP PN TANGERANG
25.	PN SERANG	SUPARNO, S.H.	PP	PANMUD PIDANA PN RANGKASBITUNG
26.	PN SERANG	ABDUL SHOMAD, S.H., M.H.	PP	PP PN JAKARTA SELATAN
27.	PN SERANG	YOSUA AUGUSTINUS P., SH	PP	PP PN JAKARTA BARAT
28.	PN SERANG	ANITA R., S.H., M.H.	PP	PP PN TANGERANG
29.	PN SERANG	MEITA YULIANA, S.H.	PP	PP PT BANTEN
30.	PN SERANG	SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.	PANMUD PIDANA	PANITERA PN MENGGALA
31.	PN SERANG	YUSRIZAL, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN BEKASI
32.	PN PANDEGLANG	YOGI DULHADI, S.H., M.H.	KETUA	WKPN INDRAMAYU
33.	PN PANDEGLANG	TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.PSI., M.HUM.	WAKIL KETUA	KETUA
34.	PN PANDEGLANG	ELVIS REZA ALMANY, S.T., S.H.	KASUBAG UMUM & KEU	SEKRETARIS PN PANDEGLANG
35.	PN PANDEGLANG	RAVITA LINA, S.H., M.H.	PANITERA	PANITERA PN INDRAMAYU
36.	PN PANDEGLANG	YANI IRAWATI, S.H.	PANMUD PERDATA	PP PT BANTEN
37.	PN PANDEGLANG	NURUL IMAN, S.H.	PP	PP PN SERANG
38.	PN PANDEGLANG	ELEINE FEBRIANA, S.H.	PP	PP PN SERANG
39.	PN PANDEGLANG	DEDI IRAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD PIDANA PN SERANG
40.	PN PANDEGLANG	NUR HIDAYAH, S.H.	PP	PP PN SERANG
41.	PN PANDEGLANG	NITA YUNITA, S.H.	STAF	FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN
42.	PN PANDEGLANG	IIS SETIAWATI, S.H.	STAF	FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN
43.	PN RANGKASBITUNG	MAHENDRASMARA PURNAMAJATI, S.H., M.H.	KETUA	WKPN GARUT
44.	PN RANGKASBITUNG	SUMIATI, S.H.	PP	PANMUD HUKUM PN RANGKASBITUNG
45.	PN RANGKASBITUNG	DARSONO, S.H.	KASUBAG KEPEG. & ORTALA	SEKRETARIS PN RANGKASBITUNG
46.	PN RANGKASBITUNG	ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.	JURUSITA PENGGANTI	KASUBAG KEPEG. & ORTALA PN RANGKASBITUNG
47.	PN RANGKASBITUNG	INA DWI MAHARDEKA, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM YUST MARI DIP KEPANITERAAN
48.	PN RANGKASBITUNG	LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.	HAKIM	HAKIM YUST MARI DIP HUMAS
49.	PN RANGKASBITUNG	SUMARDIYANTA, S.H., M.H.	PANITERA	PP PT JAKARTA
50.	PN RANGKASBITUNG	ACHMAD LEO TOLSTOY, SH	PANMUD PERDATA	PANMUD TIPIKOR PN SERANG
51.	PN RANGKASBITUNG	DUDI GUSMAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD HUKUM PN BOGOR
52.	PN RANGKASBITUNG	GITA NUNGKY NATALIE, S.H.	JSP	PP PN PANDEGLANG
53.	PN RANGKASBITUNG	DUDI GUSMAWAN, S.H.	PANMUD PIDANA	PANMUD HUKUM PN BOGOR
54.	PN RANGKASBITUNG	Machmud Suhaeri, SH.	BENDAHARA	FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN

Selain itu, dapat diinformasikan pula jumlah SDM yang memperoleh kenaikan pangkat selama tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten adalah sebagai berikut :

➤ **Kenaikan Pangkat :**

NO	SATKER	JUMLAH
1	Pengadilan Tinggi Banten	12 Orang
2	Pengadilan Negeri Tangerang	26 Orang
3	Pengadilan Negeri Serang	24 Orang
4	Pengadilan Negeri Pandeglang	13 Orang
5	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	5 Orang

3. PENSIUN

Data hakim dan pegawai pada Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten yang pensiun pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	TMT PENSIUN	KET.
1.	PT BANTEN	Dr. WAHIDIN, S.H., M.Hum	HAKIM TINGGI	01-06-2021	BUP
2.	PT BANTEN	RESPATUN WISNU WARDOYO, S.H.	KETUA	01-06-2021	BUP
3.	PT BANTEN	SUTISNA, S.H.	PP	01-12-2021	BUP
4.	PN TANGERANG	MOKH SETIA BUDHI, S.H.	PP	01-03-2021	BUP
5.	PN TANGERANG	TRI DRAJAT SANTOSO, S.H., MH.	PP	01-03-2021	BUP
6.	PN TANGERANG	ELMIRNI	JSP	01-05-2021	BUP
7.	PN TANGERANG	NI NYOMAN SUMERINI, S.H	JSP	01-05-2021	BUP
8.	PN SERANG	TUBAGUS ABU MAALI	PP	01-12-2021	BUP
9.	PN SERANG	NANA SUPRIATNA WALUYA	PP	01-04-2021	BUP
10.	PN SERANG	MULYANA, S.H.	PANMUD PHI	01-07-2021	PENSIUN JANDA
11.	PN SERANG	NURHADI AS, S.H., M.H.	HAKIM	01-08-2021	PENSIUN JANDA
12.	PN SERANG	EDWIN YUDHI PURWANTO, SH. MH.	HAKIM	01-08-2021	PENSIUN JANDA
13.	PN PANDEGLANG	YAYAT SUPRIATNA, S.H.	SEEKRETARIS	01-03-2021	BUP
12.	PN PANDEGLANG	ELVI HERA, SE., MH.	PANMUD HUKUM	25-03-2021	PENSIUN DUDA
13.	PN RANGKASBITUNG	WARNI	PANMUD HUKUM	01-01-2021	BUP
14.	PN RANGKASBITUNG	JAYUSMAN	SEKRETARIS	01-03-2021	BUP
15.	PN RANGKASBITUNG	NURAENI SIATAN	STAF PELAKSANA	01-06-2021	BUP
16.	PN RANGKASBITUNG	SAEPULLAH	JURUSITA	01-12-2021	BUP
17.	PN RANGKASBITUNG	IKIT SUPRIYATIN, S.H.	PP	31-01-2021	PENSIUN DUDA
18.	PN RANGKASBITUNG	TB HILMAN WARSA KUSUMA, A.Md	PP	07-09-2021	PENSIUN JANDA

4. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Data hakim dan pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten yang mengikuti diklat teknis dan non teknis selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

a. Diklat Teknis

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	PT BANTEN	FERI ARDIANSYA, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia
2.	PT BANTEN	WILAN WITARSIH, S.Ip, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia
3.	PT BANTEN	ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUAN, S.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia
4.	PT BANTEN	SITI SUSILAWATI, S.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Pengadilan Tingkat Banding Peradilan Umum Seluruh Indonesia
5.	PN TANGERANG	ROEDY SUHARSO, SH, MH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan Pengadilan
6.	PN TANGERANG	FERDINAND MARCUS L, SH, MH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seluruh Indonesi
7.	PN TANGERANG	DIDIT SUSILO GUNTONI, SH, MH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV
8.	PN TANGERANG	ARIF BUDI CAHYONO, SH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Terpadu Sertifikasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) seluruh Indonesia • Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan
9.	PN TANGERANG	DR HJ TANTRI YANTI M, SH, MH	PANITERA	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten • Pelatihan Singkat Calon Panitera/Calon Panitera Muda Niaga seluruh Indonesia
10.	PN TANGERANG	DR ASTRID HASTRIDIAN, SH, MH	PP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera/PP Peradilan Umum Seluruh Indonesia
11.	PN TANGERANG	AGUS SOFYAN, SH		<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten
12.	PN TANGERANG	MINATI INDRIANI, SH	PP	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten
13.	PN TANGERANG	LIA MARLIA, SH	PP	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Bante
14.	PN SERANG	HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Teknik Menyusun Resume Putusan Pengadilan (Executive Summary) • Pelatihan Sertifikasi Niaga bidang hak kekayaan intelektual (HKI) bagi Hakim lingkngan peradilan umum seluruh Indonesia • Pelatihan Seritifikat niaga kepailitan dan PKPU bagi hakim lingkungan peradilan umm seluruh indonesia
15.	PN SERANG	GUSE PRAYUDI, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Training Of Trainer (TOT) Mengenai Peradilan Yang Fair (Fair Trial) Bagi Penyandang Disabilitas • Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup • Pelatihan terpadu Sertifikasi sistem peradilan pidana anak (SPPA) • Pelatihan penerapan prinsip dan

				keterangan hukum HAM bagi Hakim Peradilan umum Seluruh Indonesia
16.	PN SERANG	YUSRIZAL, S.H., M.H.	PANITERA	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Panitera Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia • Pelatihan Singkat Calon Panitera/Calon Panitera Muda Niaga Seluruh Indonesia • Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata untuk Hakim dan Panitera di Wilayah Hukum DKI Jakarta dan Banten • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021
17.	PN SERANG	FIRDAUS ARYANSYAH, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
18.	PN SERANG	ATEP SOPANDI, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan terpadu sertifikasi sistem peradilan pidana anak (SPPA)
19.	PN SERANG	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Yudisial Panitera atau Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia
20.	PN SERANG	UNTUNG ROHADI, S.H.	JURUSITA	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata untuk Hakim dan Panitera di Wilayah Hukum DKI Jakarta dan Banten
21.	PN SERANG	NUNYATI, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021
22.	PN SERANG	SUGANDI SYARIF, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021
23.	PN SERANG	NENENG SUSILAWATI, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Bimbingan Teknis Kepaniteraan Tahun Anggaran 2021
24.	PN PANDEGLANG	ANGGI PRAYURISMAN, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup • Sosialisasi Pembelajaran Online Tentang Perma 3 Tahun 2017 dan Perma 5 Tahun 2019
25.	PN PANDEGLANG	DHITYA KUSUMANING PRAWARNI, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Sertifikasi Sistem Peradilan Anak (SPPA)
26.	PN PANDEGLANG	MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H., M.Kn.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Sertifikasi Hakim Perikanan
27.	PN PANDEGLANG	MADELA NATALIA SAI REEVE, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Pembelajaran Online Tentang Perma 3 Tahun 2017 dan Perma 5 Tahun 2019
28.	PN PANDEGLANG	TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Sebagai Pengajar Hakim Mediator (Training of Trainers / ToT - Mediasi)
29.	PN PANDEGLANG	AGUS PRASETYO, S.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Teknis Yudisial Panitera Pengganti
30.	PN PANDEGLANG	INDAH AGUSTRIANI, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Teknis Yudisial Panitera Pengganti
31.	PN RANGKAS-BITUNG	Hendhy Eka Chandra, S.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
32.	PN RANGKAS-BITUNG	Mohamad Zakiuddin, SH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
33.	PN RANGKAS-BITUNG	Iche Purnawaty, SH.MH.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
34.	PN RANGKAS-BITUNG	Rani suryani Puspitasari, SH.MH	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Hakim
35.	PN RANGKAS-BITUNG	Yudi Rozadinata, SH.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial
36.	PN RANGKAS-BITUNG	Lucia Ridayanthi, SH.MH.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat Hakim
37.	PN RANGKAS-BITUNG	Ina Dwi Mahardeka, SH.MH.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan Industrial

38.	PN RANGKAS-BITUNG	Danu Arman, SH. MH.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> Sertifikasi Hakim Tipikor
39.	PN RANGKAS-BITUNG	Nova Vitrianda, SH.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> Diklat PP
40.	PN RANGKAS-BITUNG	Diah Susilawati, SH.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> Diklat PP
41.	PN RANGKAS-BITUNG	Retno Dwi Hapsari, SH.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> Diklat PP

b. Diklat Nonteknis

NO.	SATKER	NAMA	JABATAN	NAMA DIKLAT
1.	PT BANTEN	ENNID HASANUDDIN, S.H., C.N., M.H.	HAKIM TINGGI	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP
2.	PT BANTEN	Drs. SUTIKNO, M.H.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKP Pelatihan <i>Online</i> Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
3.	PT BANTEN	YUNDA HASBI, S.H., M.H.	PANITERA	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Online</i> Jaringan Media dan Kehumasan
4.	PT BANTEN	NURHAYANI, S.H., M.H.	KABAG UMUM & KEUANGAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Laporan Kinerja Pelatihan <i>Online</i> Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
5.	PT BANTEN	NEVI MUGIA SANTOSA, S.E., M.Si	KABAG PERENC. & KEPEGAWAIAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Online Basic Image Editing with Adobe Photoshop</i> Pelatihan <i>Online Basic Video Production</i> Pelatihan <i>Online Basic 3D Mapping</i> Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Aset
6.	PT BANTEN	SRI DIAN GUNARSIH, S.E.AK	KASUBAG RENCANA PROGRAM & ANGGARAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pelatihan Online <i>English Effective Presentation Bagi Peserta PKP</i>
7.	PT BANTEN	NURFITRI, S.Kom	KASUBAG KEUANGAN & PELAPORAN	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Online Kepemimpinan Pengawas (PKP) Pelatihan <i>Online Basic Video Editing</i> Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Aset Pelatihan <i>Online Basic Video Production</i> Pelatihan <i>Online</i> Manajemen Laporan Kinerja Pelatihan <i>Online</i> Pelatihan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)
8.	PT BANTEN	HERRY SETIYAWAN, S.T.	KASUBAG KEPEGAWAIAN & TEKNOLOGI INFORMASI	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan Online <i>Public Speaking and Effective Communication Skill</i> Pelatihan <i>Online</i> Ilmu Jurnalistik Tahun 2021 Pelatihan <i>Online</i> Argumentasi Gagasan Pengadilan di Media Massa Training MTCNA PT Fiber Networks Indonesia
9.	PT BANTEN	RITA HERMINA TAMARA, S.E.	ANALIS SDM APARATUR	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator</i> Pelatihan <i>Online Basic Booklet Design with Adobe Indesign</i> Pelatihan <i>Online Basic Video Editing</i> Pelatihan <i>E-Learning</i> Bendahara Penerimaan
10.	PT BANTEN	YENI YULIYANI, S.E.	FUNGSIONAL PERENCANA AHLI PERTAMA	<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan <i>Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator</i> Pelatihan <i>Online Basic Booklet Design with Adobe Indesign</i> Pelatihan <i>E-Learning</i> Bendahara Pengeluaran (BPP)

11.	PT BANTEN	WIDAYAKA PUTRA ARISTYA, S.Kom	ANALIS TATA LAKSANA	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic User Experience Design • Pelatihan Online Basic User Interface Design • Pelatihan Online Basic Booklet Design with Adobe Indesign
12.	PT BANTEN	SATRIA ARI WIBOWO, A.Md	ANALIS HUKUM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator
13.	PT BANTEN	HADI SUBAKTI	PRAMUBHAKTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Video Production • Pelatihan Online Basic Booklet Design with Adobe Indesign • Training MTCNA PT Fiber Networks Indonesia
14.	PN TANGERANG	BAYU FITRIAS L B, ST, MH	Kasubbag TU dan Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI web full module
15.	PN TANGERANG	DENHAR, SH, MH	Kasubag PTIP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Infographic Design
16.	PN TANGERANG	FREZI WIDIANINGSIH, SH	STAF	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Substantif Manajemen BMN • Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI web full module
17.	PN TANGERANG	PRISKA RUFINA S, SE	STAF	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Booklet Design With Adobe Indesign • Pelatihan Online Manajemen Laporan Kinerja
18.	PN TANGERANG	ADHI FIRZIA MIHRAM	JSP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Video Editing • pelatihan Online Basic Booklet Design • Sosialisasi dan Bimtek Pelaporan Capaian Output Satker tahun 2021 • Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI web full module
19.	PN TANGERANG	NIRMALA ANGGRAINI, SH	Bendahara Penerimaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Bendahara Periode 2021
20.	PN TANGERANG	MAYA KARTIKA LAKSMIWATI, SE	STAF	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Pemecahan Masalah Praktis bagi CPNS
21.	PN TANGERANG	M TOUFAN PUTRA PRATAMA, SE	Pranata Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi Webinar Tata Cara Pendaftaran User dan On Time Password (OTP) SAKTI • Microlearning Program Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) Bendahara Negara Tersertifikasi • Sosialisasi dan Bimtek Pelaporan Capaian Output Satker tahun 2021 • Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI web full module • Pelatihan E-Learning Jabatan Fungsional Pranata & Analisis Pengelolaan Keuangan APBN
22.	PN TANGERANG	MARBUNGA ROPITA S, Amd.Ak	STAF	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Teknis Substantif Manaj. BMN • Pelatihan Online Membangun Pola Pikir Berkelanjutan dan Kecepatan Pembelajaran bagi CPNS • Pelatihan End User Training (EUT) SAKTI web full module
23.	PN SERANG	Dr. GUTIARSO, S.H., M.H.	WAKIL	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kompetensi Kehumasan Pengadilan Tingkat Lanjutan Tahun 2021 • Pelatihan Online Jaringan Media dan Kehumasan di Pengadilan • Pelatihan Online Teknik Story Telling
24.	PN SERANG	BARITA SINAGA, S.H., M.H.	KETUA	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Mentoring bagi Mentor Peserta PKA
25.	PN SERANG	HOSIANNA MARIANI SIDABALOK, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online English Effective Writing • Pelatihan Online Basic User Interface Design • Pelatihan Online Basic Modelling with 3D Mapping
26.	PN SERANG	WISNU RAHADI, S.H., M.Hum	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator • Pelatihan Online basic Motion Graphic with Adobe After Effect • Pelatihan Online Basic Video Editing

27.	PN SERANG	EDWIN YUDHI PURWANTO, S.H., M.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Infographic Design dengan Adobe Illustrator • Pelatihan Online Basic Video Editing
28.	PN SERANG	RIKATAMA BUDIYANTIE, S.H.	HAKIM	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Basic Modeling with 3D Max • Pelatihan Online Basic 3D Mapping
29.	PN SERANG	SAFTI YOHANAH PERMASITA, S.H.	PANITERA PENGGANTI	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
30.	PN PANDEGLANG	ELVIS REZA ALMANY, S.T., S.H.	SEKRETARIS	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Kepemimpinan Pengawas (PKP)
31.	PN PANDEGLANG	ARI SULAEMAN, S.T.	KASUBAG PTIP	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan Online Tentang Kepemimpinan Pengawas (PKP)

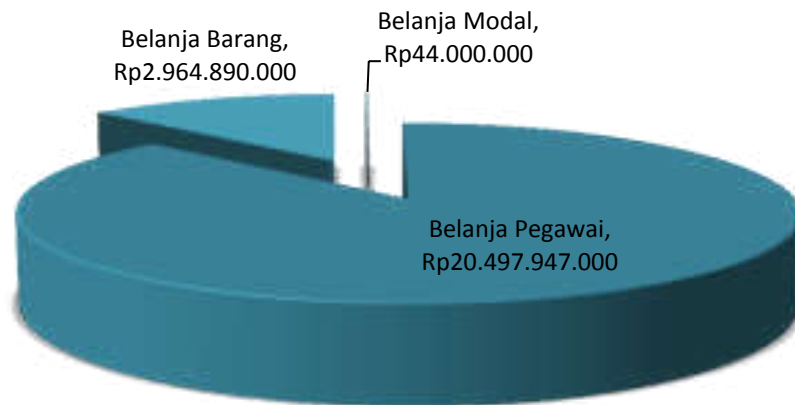
BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen merupakan salah satu program yang ada dalam DIPA 01 (DIPA dari Badan Urusan Administrasi). Komposisi belanja DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten secara keseluruhan pada akhir tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut.



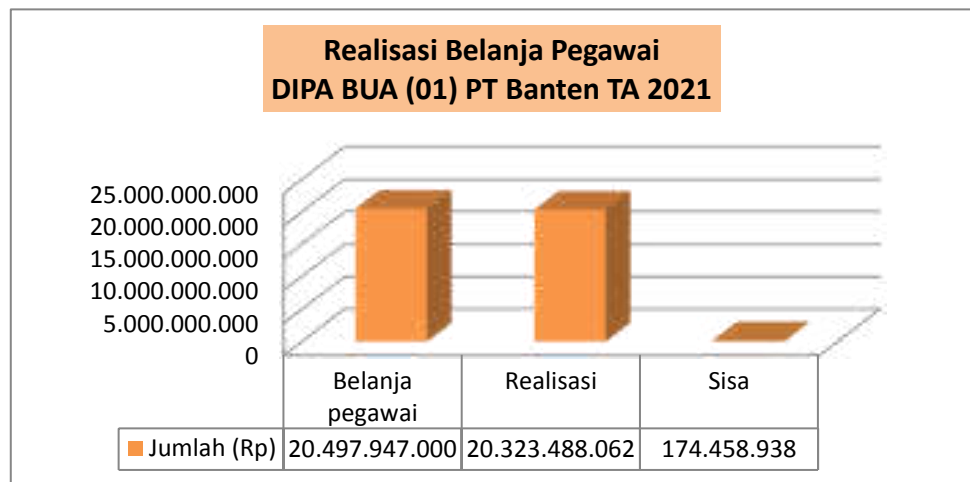
Pada awal tahun anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Badan Urusan Administrasi untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 25.821.244.000,- Adapun perubahan anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) Pengadilan Tinggi Banten selama tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 13 Agustus 2021 dilakukan restrukturisasi anggaran berupa pemotongan pada belanja barang subkomponen Bimtek sebesar Rp.93.140.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.25.728.104.000,-
- 2) Pada tanggal 28 September 2021 ada penambahan anggaran untuk seragam dinas dan penanggulangan covid-19 bagi satuan kerja sewilayah Pengadilan Tinggi Banten sebesar Rp.298.535.000,- sehingga total anggaran menjadi Rp.26.026.639.000,-
- 3) Pada tanggal 14 Oktober 2021 terjadi pengurangan anggaran sebesar Rp.839.452.000,- dikarenakan revisi antar satker di wilayah Pengadilan Tinggi Banten terutama untuk menutupi kekurangan belanja pegawai dan pengalihan anggaran seragam dinas dan penanggulangan covid-19 pada Pengadilan negeri di wilayah Pengadilan Tinggi Banten, sehingga total anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp.25.187.187.000,-
- 4) Pada tanggal 1 November 2021 dilakukan revisi berupa pengurangan anggaran sebesar Rp.1.680.350.000,- dikarenakan adanya kelebihan belanja pegawai pada Pengadilan Tinggi Banten, sehingga total anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Banten menjadi Rp.23.506.837.000,-

Pada Program Dukungan Manajemen ini terdiri 3 (tiga) macam belanja yaitu :

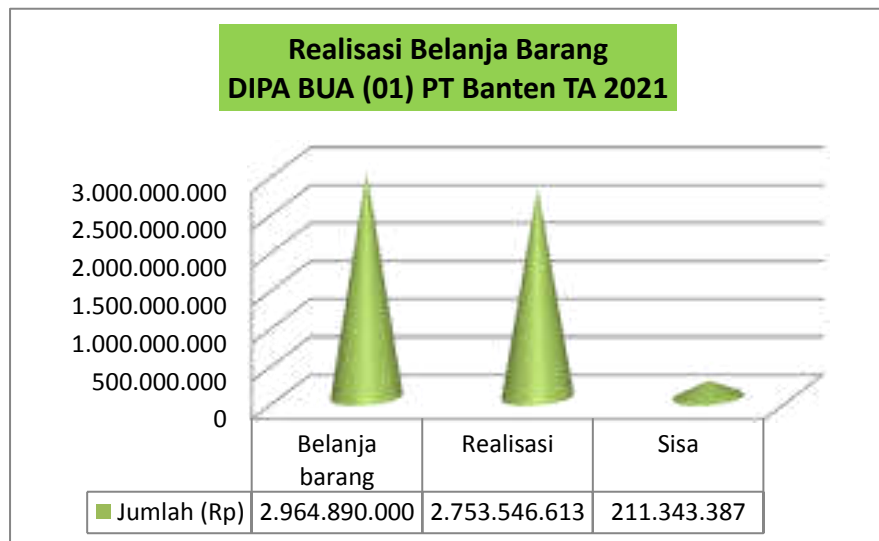
a. Belanja Pegawai

Pada tahun anggaran 2021 pagu untuk belanja pegawai yaitu sebesar Rp.20.497.947.000,- (Dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta Sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). Dan sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi sebesar Rp. 20.323.488.062,- (Dua puluh milyar tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam puluh dua rupiah) atau sebesar 99,15% dari anggaran dengan sisa sebesar Rp. 174.458.938,- (Seratus tujuh puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).



b. Belanja Barang

Pada tahun anggaran 2021 pagu untuk belanja barang yaitu sebesar Rp.2.964.890.000,- (dua milyar sembilan ratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dan sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi sebesar Rp. 2.753.546.613,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) atau sebesar 92,87% dari anggaran dengan sisa sebesar Rp.211.343.387,- (Dua ratus sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh tujuh rupiah).

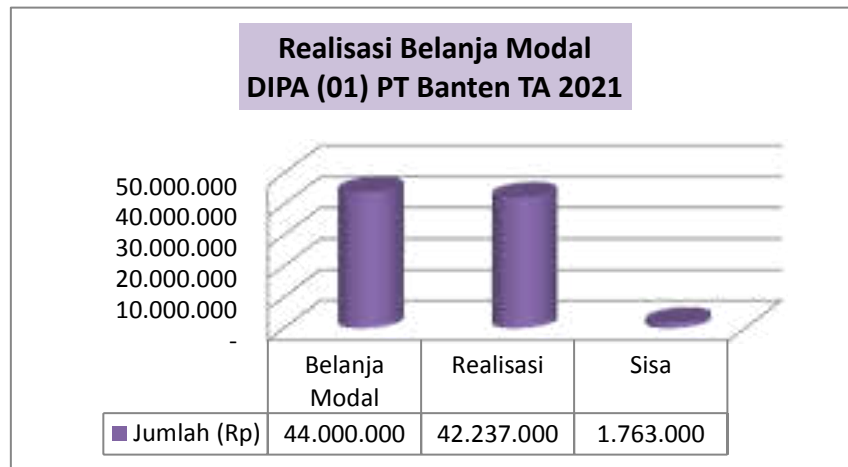


c. Belanja Modal

Untuk tahun anggaran 2021, Belanja modal (Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung) pada Pengadilan Tinggi Banten mendapatkan anggaran sebesar Rp. 44.000.000,- (*Empat puluh empat juta rupiah*). Anggaran tersebut terbagi untuk 2 (dua) kegiatan pengadaan yaitu :

1. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sebesar Rp. 37.500.000,- (*Tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*)
2. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar Rp. 6.500.000,- (*Enam juta lima ratus ribu rupiah*)

Dengan total anggaran Rp.44.000.000,- (*Empat puluh empat juta rupiah*), dan sudah direalisasikan sebesar Rp.42.237.000,- (*Empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah*) atau sebesar 95,99 % dari anggarannya, sehingga sisa sebesar Rp.1.763.000,- (*Satu juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).



Adapun data penyerapan anggaran Program Dukungan Manajemen Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	SATKER	JENIS BELANJA	JUMLAH (Rp.)			PERSENTASE REALISASI
			PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA	
1.	PN TANGERANG	PEGAWAI	18.810.677.000	18.294.598.379	516.078.621	97,26%
		BARANG	3.752.668.000	3.392.154.459	360.513.541	90,39%
		MODAL	265.000.000	262.895.000	2.105.000	99,2%
2.	PN SERANG	PEGAWAI	15.144.096.000	13.860.342.105	1.283.753.895	91,52%
		BARANG	3.662.832.000	3.450.161.544	212.670.456	94,19%
		MODAL	756.544.000	743.572.050	12.971.950	98,29%
3.	PN PANDEGLANG	PEGAWAI	4.487.643.000	4.378.867.739	108.775.261	97,57%
		BARANG	1.308.812.000	1.301.305.749	7.506.251	99,42%
		MODAL	37.500.000	37.275.000	225.000	99,40%
4.	PN RANGKAS-BITUNG	PEGAWAI	4.318.617.000	4.310.324.625	8.292.375	99,81%
		BARANG	1.392.095.000	1.318.126.790	73.968.210	94,69%
		MODAL	37.500.000	37.500.000	-	100%

Bahwa untuk Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Rangkasbitung pada tahun 2021 hanya memperoleh alokasi belanja modal untuk Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi. Sedangkan pada **Pengadilan Negeri Serang** mendapatkan alokasi belanja modal yang terbagi menjadi 2 (dua) komponen, dapat dilihat secara lebih rinci sebagai berikut :

SATKER	KOMPONEN BELANJA MODAL	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SISA (Rp.)	PERSEN-TASE REALISASI
PN SERANG	PENGADAAN ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	285.000.000	282.745.000	2.555.000	99,21%
	PEMBANGUNAN/ RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN	471.544.000	460.827.050	10.716.950	97,73%

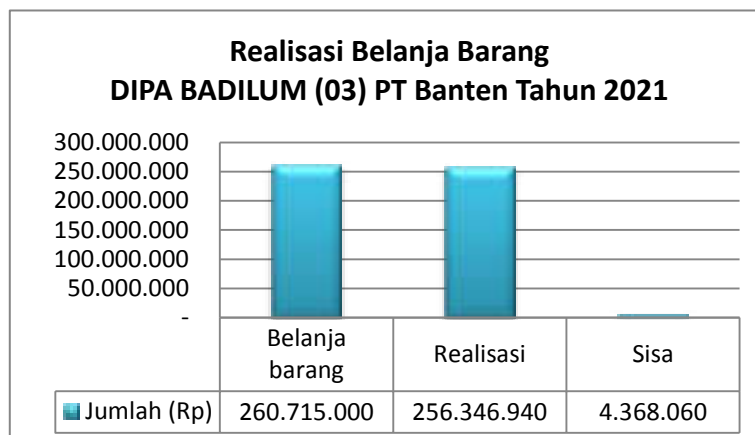
2. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Pada awal tahun anggaran 2021 Pengadilan Tinggi Banten menerima anggaran dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum untuk program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum sebesar Rp. 227.845.000,- (Dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan Belanja Barang.

Adapun perubahan anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 03) Pengadilan Tinggi Banten selama tahun anggaran 2021 sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 2 November 2021 ada penambahan anggaran yang berasal dari alokasi PNPB sebesar Rp.32.870.000,- yang diperuntukkan bagi kegiatan sosialisasi pengelolaan PNPB serta kegiatan pembinaan dan pemeriksaan yustisial, sehingga total anggarannya menjadi Rp.260.715.000,-

Sampai dengan bulan Desember 2021 anggaran tersebut sudah terealisasi sebesar Rp. 256.346.940,- (Dua ratus lima puluh enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 98,32 % dari anggarannya. Dengan sisa sebesar Rp. 4.368.060,- (Empat juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam puluh rupiah).



Adapun data penyerapan anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	SATKER	JENIS OUTPUT	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	PERSEN-TASE REALISASI
1.	PN TANGERANG	Pos Bantuan Hukum	33.600.000	33.600.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	305.960.000	296.219.900	96,82%
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	2.760.000	540.000	19,57%
2.	PN SERANG	Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	526.530.000	491.943.400	93.43%
		Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan Biaya Perkara	1.840.000,-	-	0,00%
3.	PN PANDE-GLANG	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	93.040.000	90.840.000	97,63%
4.	PN RANG-KASBITUNG	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	100%
		Perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama & banding tepat waktu	68.400.000	64.060.000	93,66%

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana Gedung Pengadilan Tinggi Banten meliputi gedung, alat pengolah data dan komunikasi, fasilitas perkantoran, rumah dinas dan kendaraan dinas.

1. Sarana dan Prasarana Gedung beserta Fasilitasnya

a. Sarana dan Prasarana Gedung

Bahwa gedung kantor Pengadilan Tinggi Banten dibangun pada tahun 2004

dengan beberapa penambahan bangunan pada tahun 2006 dan belum memenuhi bentuk prototype yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung hingga saat ini. Untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Serang, Rangkasbitung dan Pandeglang telah memenuhi prototype. Sedangkan untuk gedung kantor Pengadilan Negeri Tangerang masih belum prototype.

Adapun data sarana dan prasarana gedung di lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sebagai berikut :

NO.	SARANA/ PRASARANA GEDUNG	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE- RANG	PN SERANG	PN PANDE- GLANG	PN RANGKAS- BITUNG
1.	Ruang Ketua	1	1	1	1	1
2.	Ruang Wakil Ketua	1	1	1	1	1
3.	Ruang Hakim	9	6	9	2	1
4.	Ruang Panitera	1	1	1	1	1
5.	Ruang Sekretaris	1	1	1	1	1
6.	Ruang Kabag	2	1	-	-	-
7.	Ruang Kepaniteraan	4	3	5	3	3
8.	Ruang Kesekretariatan	4	3	3	3	3
9.	Ruang Panitera Pengganti	2	1	3	1	1
10.	Ruang Jurusita	-	1	1	1	1
11.	Ruang Sidang	2	10	7	3	3
12.	Ruang Sidang Anak	-	1	1	1	1
13.	Ruang Arsip	1	3	4	3	2
14.	Ruang Perpustakaan	1	1	1	1	1
15.	Ruang server	1	1	1	1	1
16.	Ruang PTSP	1	1	1	1	1
17.	Ruang Tamu Terbuka	1	5	1	1	1
18.	Pojok E-Court	-	1	1	1	1
19.	Ruang/ Meja Inzage	1	1	1	1	1
20.	Ruang Tunggu Jaksa	-	1	1	1	1
21.	Ruang Tunggu Anak	-	1	1	1	1
22.	Ruang Mediasi	-	4	1	1	1
23.	Ruang Posbakum	-	1	1	1	1
24.	Ruang Tahanan	-	3	1	3	1
25.	Ruang Laktasi	-	1	1	1	1
26.	Ruang Wartawan	-	1	-	-	-
27.	Ruang Barang Bukti	-	-	1	1	-
28.	Ruang Kesehatan	-	1	1	1	1
29.	Lobby	1	1	1	1	1

30.	Mushola	1	3	1	1	1
31.	Gudang	1	9	5	2	1
32.	Pos Jaga	1	2	2	1	1
33.	Pantry	1	-	-	1	-
34.	Ruang Rapat Aula	-	1	-	-	-
35.	Ruang Merokok	-	1	1	-	-

b. Sarana dan Prasarana Alat Pengolah Data dan Komunikasi

Sarana dan Prasarana alat pengolah data dan komunikasi merupakan alat untuk menunjang kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan sehingga berjalan lancar. Data sarana dan prasarana alat pengolah data dan komunikasi tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

NO.	SARANA/ PRASARANA ALAT PENGOLAH DATA & KOMUNIKASI	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE- RANG	PN SERANG	PN PANDE- GLANG	PN RANGKAS - BITUNG
1.	Access point	4	4	11	2	-
2.	CCTV	8	9	47	1 (12 titik)	3
3.	Facsimile	1	2	3	1	1
4.	Infocus	1	1	1	1	1
5.	Laptop/note book	33	42	36	21	26
6.	P.C. Unit	27	120	88	57	41
7.	PABX	1	2	-	-	-
8.	Pesawat Telepon	3	-	-	2	1
9.	Printer	29	88	82	30	42
10.	Router	1	1	3	1	1
11.	Scanner	9	25	17	4	1
12.	Server	1	3	4	3	3
13.	Switch hub	2	1	2	12	2
14.	UPS	7	5	4	6	20
15.	Wireless Access Point	1	6	2	8	1
16.	Mesin ketik	-	63	15	2	-

c. Sarana dan Prasarana Fasilitas Perkantoran

Sarana dan Prasarana fasilitas perkantoran merupakan sarana dan meubelair baik yang ada di kantor maupun di rumah dinas. Data sarana dan prasarana fasilitas perkantoran tersebut dapat dilihat secara rinci pada tabel berikut.

NO.	SARANA/ PRASARANA FASILITAS PERKANTORAN	SATKER				
		PT BANTEN	PN TANGE- RANG	PN SERANG	PN PANDE- GLANG	PN RANGKAS- BITUNG
1.	A.C. Split	39	58	80	33	38
2.	A.C. Window	-	-	-	-	-
3.	A.C. Central	-	58	11	2	-
4.	A.C. Portable	-	7	-	-	-
5.	Amplifier	-	1	1	-	-
6.	Alat Detektor Barang Terlarang/X-Ray	2	6	1	1	1
7.	Alat Pemotong Kertas	-	3	1	-	-
8.	Alat Pengaman/Sinyal	5	-	-	-	-
9.	Alat rumah tangga lainnya	4	18	-	1	-
10.	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	-	-	15	-	-
11.	Bangku Panjang Besi/Metal	5	64	44	17	27
12.	Bangku Panjang Kayu	10	70	118	16	-
13.	Bingkai foto	1	-	-	-	-
14.	Brankas	1	6	5	2	3
15.	Buffet	3	-	8	-	2
16.	Camera Digital	2	1	1	1	2
17.	Digital Keyboard Technics/ Orqan	2	-	-	-	-
18.	Dispenser	13	12	1	1	-
19.	Exhause Fan	2	-	-	-	-
20.	Filing Cabinet Besi	43	39	36	22	20
21.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	5	10	-	-	4
22.	Genset	1	2	1	1	1
23.	Gordyn/Kray	5	14	3	1	-
24.	Handycam	-	-	1	-	-
25.	Jam Elektronik	9	-	8	5	-
26.	Jet Pump	2	-	-	-	-
27.	Kaca Hias	19	7	-	-	-
28.	Kasur / Spring bed	12	2	-	-	-
29.	Kipas Angin	5	43	11	2	-
30.	Kompore gas (alat dapur)	4	2	-	-	-
31.	Kursi Besi/Metal	357	1066	608	235	191
32.	Kursi Kayu	13	154	60	34	41
33.	Lambang Garuda Pancasila	7	10	5	3	7
34.	Lambang Instansi	1	238	5	1	1
35.	Layar Film/Proyektor	1	-	-	-	-
36.	LCD Monitor	-	8	1	-	-

37.	Lemari Besi/Metal	40	68	47	52	6
38.	Lemari Es	8	-	7	-	-
39.	Lemari Kayu	77	97	117	19	46
40.	Lensa Kamera	1	1	-	-	-
41.	Loudspeaker	-	8	68	-	1
42.	Meja Kerja Besi/Metal	26	2	32	-	11
43.	Meja Kerja Kayu	107	707	238	114	92
44.	Meja Komputer	23	1	10	7	3
45.	Meja makan kayu	4	7	1	1	-
46.	Meja Rapat	7	22	18	17	-
47.	Meja Resepsionis	4	-	4	-	-
48.	Mesin Absensi	2	1	1	2	2
49.	Mesin Antrian	-	2	3	-	-
50.	Mesin cuci	1	2	-	-	-
51.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	1	1	1
52.	Meubelair lainnya	1	20	-	-	-
53.	Microphone/wireless MIC	2	5	8	-	-
54.	Mimbar/Podium	2	1	-	-	-
55.	Mobile File	-	-	4	-	-
56.	Overhead Projector	1	-	-	-	-
57.	Palu Sidang	1	13	7	-	2
58.	Papan Visual/Papan Nama	11	45	52	9	15
59.	Penyemprot tangan (hand sprayer)	1	-	-	-	-
60.	Pintu Elektrik (akses)	-	5	10	-	-
61.	Rak Besi	16	28	19	19	9
62.	Rak Kayu	10	16	13	11	22
63.	Rak piring aluminium	3	-	-	-	-
64.	Rambu-rambu	1	-	-	-	-
65.	Sice	20	35	31	16	18
66.	Sirine	1	-	-	-	-
67.	Sound System	3	12	6	5	1
68.	Tangki Air	1	-	-	-	2
69.	Tape Recorder	1	4	-	1	-
70.	Televisi	22	25	16	-	-
71.	Tempat tidur kayu	1	1	1	-	-
72.	Tiang Bendera	-	50	15	-	-
73.	Tripod Kamera	1	3	-	-	-
74.	Troli	1	-	2	-	-
75.	White Board	9	9	13	13	1
76.	Wireless	-	-	24	-	-

2. Rumah Dinas

Berikut ini data rumah dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.

NO.	SATKER	RUMAH DINAS	JUMLAH	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1.	PT BANTEN	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPT	1	1	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	4	4	-	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	1	-	-
2.	PN TANGERANG	RUMAH DINAS KETUA	1	-	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	-	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	12	11	1	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	-	1	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	1	-	1	-
3.	PN SERANG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	1	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	7	2	2	3
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-
4.	PN PANDEGLANG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	-	-	1
		RUMAH DINAS HAKIM	9	-	-	9
		RUMAH DINAS PANITERA	1	-	-	1
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-
5.	PN RANGKASBITUNG	RUMAH DINAS KETUA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS WKPN	1	1	-	-
		RUMAH DINAS HAKIM	5	5	-	-
		RUMAH DINAS PANITERA	1	1	-	-
		RUMAH DINAS SEKRETARIS	-	-	-	-

3. Kendaraan Dinas

Berikut ini data kendaraan dinas Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten.

NO.	SATKER	KENDARAAN DINAS	TAHUN PEROLEHAN	KONDISI				
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT		
1.	PT BANTEN	KENDARAAN RODA 4						
		TOYOTA VIOS	2008	√				
		TOYOTA ALTIS	2005	√				
		TOYOTA INNOVA	2005	√				
		TOYOTA INNOVA	2009	√				
		TOYOTA INNOVA	2011	√				
		TOYOTA FORTUNER	(SEWA)	√				
		TOYOTA CAMRY	(SEWA)	√				
		KENDARAAN RODA 2						
		HONDA SUPRA X125	2005	√				
		HONDA TIGER REVO	2008	√				
		HONDA TIGER REVO	2008	√				
		HONDA NEW MEGA PRO CW	2011	√				
		HONDA WIN	2005	√				
		2.	PN TANGERANG	KENDARAAN RODA 4				
				TOYOTA FORTUNER	2019	√		
TOYOTA FORTUNER	2019			√				
KIJANG INNOVA E	2010			√				
KIJANG SUPER KF 83 LSX	2003			√				
TOYOTA FORTUNER	2019			√				
TOYOTA INNOVA E	2009			√				
TOYOTA FORTUNER	2019			√				
ESCUDO	1997					√		
KIJANG	1991					√		
KENDARAAN RODA 2								
HONDA GLM II	1997				√			
HONDA NF 125 SD	2005				√			
HONDA GLP III	2005				√			
HONDA NF 125	2004				√			
HONDA MCB	1996					√		
HONDA MCB 97CC	1996					√		
HONDA GLM	1997					√		
HONDA MCB	2000					√		
HONDA NF 125	2003					√		
HONDA NF 125	2003			√				
3.	PN PANDEGLANG	KENDARAAN RODA 4						
		TOYOTA KIJANG LSX	2003	√				
		TOYOTA KIJANG INNOVA	2008	√				
		TOYOTA FORTUNER (pinjam dari PEMDA)	2019	√				
		KENDARAAN RODA 2						
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2004			√		
		SUZUKI SHOGUN 125 CC	2004			√		
		HONDA SUPRA X 125 CC	2008	√				
		HONDA MEGA PRO	2007			√		
		HONDA MEGA PRO	2008			√		
		HONDA MEGA PRO	2008			√		

NO.	SATKER	KENDARAAN DINAS	TAHUN PERO- LEHAN	KONDISI		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
4.	PN SERANG	KENDARAAN RODA 4				
		SEDAN VIOS	2008	✓		
		MINIBUS SUZUKI ESCUDO	2006		✓	
		MINIBUS KIJANG INNOVA	2011	✓		
		MINIBUS ISUZU PANTHER	2002		✓	
		MINIBUS NISSAN XTRAIL (PINJAM PAKAI)	2014	✓		
		MINIBUS INNOVA G (PINJAM PAKAI)	2014	✓		
		PAJERO SPORT (PINJAM PAKAI)	2018	✓		
		MINIBUS INNOVA 2,0 G (PINJAM PAKAI)	2019	✓		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA NF 125	2005	✓		
		HONDA NF 125	2005	✓		
		SUPRA X 125 R CW	2005	✓		
		SUPRA X 125 R CW	2005	✓		
		HONDA NF 125 D	2005	✓		
		HONDA NF 125	2004	✓		
		HONDA NF 125 SC	2005	✓		
		HONDA MEGA PRO	2011	✓		
5.	PN RANGKAS- BITUNG	KENDARAAN RODA 4				
		STATION WAGON	2008	✓		
		NISSAN XTRAIL	2015	✓		
		TOYOTA KIJANG INNOVA	2003	✓		
		KENDARAAN RODA 2				
		HONDA SUPRA X 125	2009	✓		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	✓		
		HONDA SUPRA X NF125SD	2005	✓		
		HONDA TIGER	2008	✓		
		HONDA MEGA PRO GL	2007	✓		
		HONDA MEGA PRO CW	2005	✓		
		HONDA KHARISMA X	2004	✓		
		HONDA SUPRA NF100	2001	✓		
		HONDA WIN MCB	1996			✓

➤ **Pemeliharaan Sarana dan Prasarana**

Kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana gedung di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten di tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik. Adapun kegiatan pemeliharaan gedung, rumah dinas, dan peralatan dan mesin di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama tahun 2021 dapat terlihat dari realisasi anggaran pada masing-masing akun belanja kegiatan dimaksud sebagaimana tabel berikut.

NO.	SATKER	AKUN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)
1.	PT BANTEN	523111 (pemeliharaan gedung)	413.670.000,-	392.527.000,-
		523119 (pemeliharaan rumdin)	83.640.000,-	69.003.800,-
		523121 (pem. peralatan/mesin)	307.804.000,-	273.880.390,-
2.	PN TANGERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	583.980.000	572.024.000
		523119 (pemeliharaan rumdin)	101.800.000	95.190.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	443.686.000	379.329.734
3.	PN SERANG	523111 (pemeliharaan gedung)	396.920.000	392.824.252
		523119 (pemeliharaan rumdin)	81.703.000	74.826.685
		523121 (pem. peralatan/mesin)	342.611.000	335.495.559
4.	PN PANDEGLANG	523111 (pemeliharaan gedung)	214.708.000	214.654.500
		523119 (pemeliharaan rumdin)	28.000.000	27.989.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	97.239.000	97.171.279
5.	PN RANGKAS- BITUNG	523111 (pemeliharaan gedung)	150.605.000	149.609.000
		523119 (pemeliharaan rumdin)	56.000.000	56.000.000
		523121 (pem. peralatan/mesin)	151.604.000	144.434.111

➤ **Pengadaan Sarana dan Prasarana**

Beberapa penambahan sarana dan prasarana di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten tahun 2021 sebagai berikut :

1). Pengadilan Tinggi Banten

Ada penambahan 3 unit PC dan 1 unit AC.

2). Pengadilan Negeri Tangerang

Ada penambahan 3 unit PC, 1 set mesin antrian dan pengadaan fasilitas ruang siding online.

3). Pengadilan Negeri Serang

Ada penambahan daya listrik, prasarana disabilitas, renovasi ruang arsip dan renovasi pintu kaca.

4). Pengadilan Negeri Pandeglang

Ada penambahan 3 unit PC dan transfer masuk dari Mahkamah Agung berupa sice (4 unit), meja kerja kayu (11 unit), kursi besi metal (25 unit), pembatas antrian (3 unit), meja makan besi (3 unit), filling cabinet (3 unit), dan gerobak dorong (3 unit).

5). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Ada penambahan 3 unit PC.

➤ **Penghapusan Sarana dan Prasarana**

Satker Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Negeri Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang dan Pengadilan Negeri Rangkasbitung tidak ada proses penghapusan BMN selama tahun 2021.

Sedangkan pada satker Pengadilan Negeri Tangerang usulan penghapusan BMN berupa peralatan mesin dan meubelair selama tahun 2021, yang ditindaklanjuti sampai dengan lelang online:

- 1) Lelang 8 (delapan) unit kendaraan bermotor dengan permohonan ke KPKNL Tangerang tertanggal 15 Maret 2021, dibatalkan KPKNL karena keadaan kalah.
- 2) Lelang 8 (delapan) unit kendaraan bermotor dengan permohonan ke KPKNL tertanggal 12 Agustus 2021 dibatalkan karena dokumen tidak memenuhi syarat.
- 3) Permohonan persetujuan penjualan 8 (delapan) unit kendaraan bermotor ke KPKNL Tangerang II telah dikirim melalui Pengadilan Tinggi Banten bulan Desember 2021.

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Mahkamah Agung telah menerapkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan melalui aplikasi e-court dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Untuk mendukung kelancaran operasional pemanfaatan kedua aplikasi ini, maka Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah menyediakan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai, yaitu :

NO.	SATKER	SARANA/ PRASARANA PENDUKUNG E-COURT DAN SIPP	JUMLAH (UNIT)
1.	PT BANTEN	PERANGKAT KERAS	
		SERVER	1
		ROUTER	1
		SWITCH	3
		PC (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	29
		LAPTOP (DI PTSP, KEPANITERAAN, PP DAN HAKIM)	27
		PERANGKAT LUNAK	
		CAPOENG NET + 150 MBPS	1
		WEBSITE : http://pt-banten.go.id/	1

NO.	SATKER	SARANA/ PRASARANA PENDUKUNG E-COURT DAN SIPP	JUMLAH (UNIT)
2.	PN TANGERANG	PERANGKAT KERAS	
		SERVER	3
		ROUTER	2
		SWITCH	7
		PC	30
		LAPTOP	20
		PERANGKAT LUNAK	
		MORATELINDO + 250 MBPS LOCAL, 50 MBPS INTERNASIONAL, BACK UP RADIO 100 MBPS	1
		WEBSITE : http://pn-tangerang.go.id/	1
3.	PN SERANG	PERANGKAT KERAS	
		SERVER	2
		ROUTER	15
		SWITCH	3
		PC	91
		LAPTOP	36
		PERANGKAT LUNAK	
		MILENIUM INTERNET + 100 MBPS	1
		WEBSITE : http://www.pn-serang.go.id/	1
4.	PN PANDEGLANG	PERANGKAT KERAS	
		SERVER	3
		ROUTER	1
		SWITCH	12
		PC	52
		LAPTOP	18
		PERANGKAT LUNAK	
		PT AWINET GLOBAL MANDIRI (80 MBPS) DEDICATED BANDWIDTH	1
		WEBSITE : http://www.pn-pandeglang.go.id/	1
3.	PN RANGKASBITUNG	PERANGKAT KERAS	
		SERVER	2
		ROUTER	1
		SWITCH	2
		PC	28
		LAPTOP	26
		PERANGKAT LUNAK	
		PT PALAPA MEDIA INDONESIA 100MB DEDICATED	1
		WEBSITE : http://www.pn-rangkasbitung.go.id/	1

1. Implementasi E-Court

Bahwa untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Mahkamah Agung telah mengembangkan aplikasi e-court sebagai sarana dalam berperkara di Pengadilan secara elektronik. Implementasi e-court telah dilaksanakan untuk penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

a. Implementasi E-Court di Pengadilan Tinggi Banten

Implementasi e-court di Pengadilan Tinggi Banten, yaitu dengan adanya pelayanan verifikasi akun pengguna/ advokat yang mendaftarkan dirinya pada aplikasi e-court. Setiap pengguna/ advokat yang mendaftar untuk mendapatkan akun e-court di wilayah Banten akan diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi Banten mengenai keabsahan dokumen yang bersangkutan berupa KTP, KTA organisasi advokat dan BAS (Berita Acara Sumpah) advokat hingga dinyatakan valid. Berikut data jumlah akun yang sudah terdaftar di e-court wilayah Pengadilan Tinggi Banten :

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2021 (AKUN PENGGUNA)
1.	Jumlah akun pengguna e-court yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar)	1.886
2.	Jumlah akun yang belum diverifikasi tingkat banding	142

Untuk data perkara banding yang telah di proses melalui e-court di Pengadilan Tinggi Banten selama tahun 2021 ada 3 (tiga) perkara, yaitu perkara perdata nomor 14/PDT/2021/PT BTN, 233/PDT/2021/PT BTN dan 246/PDT/2021/PT BTN.

b. Implementasi E-Court di Pengadilan Negeri Sewilayah Banten

Sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, bahwa untuk perkara perdata di Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Peradilan Umum sudah dapat dilayani melalui e-court.

Aplikasi ini terdiri dari 4 fitur, yaitu :

- e-Filing (Pendaftaran Perkara Online di Pengadilan)
- e-Payment (Pembayaran Panjar Biaya Perkara Online)
- e-Summons (Pemanggilan Pihak secara online)
- e-Litigation (Persidangan secara online)

1). Pengadilan Negeri Tangerang

Aplikasi ini sebagaimana disampaikan Ketua Mahkamah Agung, terdiri dari tiga fitur utama, yakni pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran panjar uang perkara (e-payment) dan penyampaian pemberitahuan dan pemanggilan persidangan secara elektronik (e-summons). Berdasarkan Perma diatas, maka ditunjukkan beberapa pengadilan sebagai pilot project pelaksanaan E-Court, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang.

Beberapa Pengadilan ditunjuk oleh Mahkamah Agung sebagai pilot project pelaksanaan e-court, salah satunya adalah Pengadilan Negeri Tangerang. Pengadilan Negeri Tangerang sendiri telah sukses menyabet penghargaan nasional terbaik nomor 2 (dua) penerapan E-Court se-Pengadilan Negeri seluruh Indonesia. Penghargaan tersebut menjadi indikator pengadilan mana di Indonesia yang sudah sangat siap menyambut modernisasi dan digitalisasi perkara online guna pengajuan dan penyelesaian perkara gugatan perdata di Pengadilan Indonesia.

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah total perkara perdata di Pengadilan Negeri Tangerang yang mendaftar melalui E-Court adalah sebanyak 2.632 perkara dengan jumlah akun pengguna sebagai berikut.

NO.	URAIAN	JUMLAH S.D. TH 2021 (AKUN PENGGUNA)
1.	Jumlah akun pengguna e-court yang sudah diverifikasi dan valid (terdaftar)	2.381
2.	Jumlah akun yang belum valid	0

2). Pengadilan Negeri Serang

Seluruh pengadilan tingkat pertama telah dapat mengimplementasikan e-Court hingga e-Litigasi, dan Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA telah dapat mengimplementasikan penggunaan aplikasi tersebut. Untuk perkara gugatan perdata sampai akhir tahun 2021 jumlah pengguna aplikasi *e-court* internal berjumlah 54 orang. Jumlah pengguna aplikasi *e-court* eksternal berjumlah 782 pengguna.

Adapun jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebanyak 496 perkara.

3). Pengadilan Negeri Pandeglang

Pengadilan Negeri Pandeglang telah menerapkan e-Court, hal ini dibuktikan dengan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 sebanyak

33 dari 33 perkara gugatan dan 17 dari 18 perkara permohonan telah menggunakan e-Court. Di samping itu, untuk mendukung penerapan e-Court pada Pengadilan Negeri Pandeglang, disediakan pula Pojok E-Court yang dapat difungsikan para pencari keadilan untuk keperluan e-Court.

4). Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pada pengadilan Negeri Rangkasbitung Jumlah perkara yang sudah mengajukan perkara melalui aplikasi *e-court* sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebanyak 94 perkara.

Data perkara perdata dari Pengadilan Negeri sewilayah Banten yang mendaftar melalui e-court selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

NO.	PERKARA PERDATA MELALUI E-COURT PADA TH. 2021	JUMLAH PERKARA			
		PN TANGERANG	PN SERANG	PN PANDEGLANG	PN RANGKASBITUNG
1	GUGATAN	1.362	167	33	31
2.	PERMOHONAN	1.150	302	17	57
3.	GUGATAN SEDERHANA	86	25	0	6
4.	BANTAHAN	34	2	0	0
TOTAL		2.232	496	50	94

2. Implementasi SIPP

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah aplikasi teknologi berbasis web dalam memberikan informasi perkara kepada masyarakat. Selain itu SIPP juga bisa digunakan oleh pimpinan untuk memonitor kinerja hakim di daerah. SIPP dibangun sebagai media kerja yang baik dan efektif bagi internal pengadilan, tertib administrasi, efektif dan efisien, monitoring dan pengawasan dan yang terpenting adalah media yang memudahkan masyarakat pencari informasi perkara untuk mengupdate informasi perkaranya dengan mudah, cepat dan berbiaya murah.

Aplikasi SIPP versi 4.1.1 pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten sudah bisa diakses langsung oleh umum (masyarakat pencari keadilan). Sedangkan untuk aplikasi SIPP versi 4.1.1 pada Pengadilan Tinggi Banten (tingkat banding) baru bisa diakses oleh pihak internal (Pengadilan Tinggi), sehingga bagi masyarakat yang ingin mengetahui data perkara tingkat banding dapat mengajukan permohonan informasi sesuai prosedur yang ada, yaitu melalui pelayanan di meja PTSP.

Pada tanggal 25 April 2018, Ditjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi MIS SIPP (Aplikasi Monitoring SIPP) untuk memastikan tingkat kepatuhan pengisian data SIPP yang terdiri dari validitas, akurasi dan ketepatan waktu pengisian data SIPP.

Data statistik perkara pada SIPP Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten selama Januari s.d Desember 2021 (*terlampir*).

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Akreditasi adalah suatu pengakuan terhadap lembaga yang diberikan oleh badan berwenang setelah dinilai bahwa lembaga tersebut memenuhi syarat kebakuan atau kriteria tertentu. Adapun Penjaminan mutu adalah serangkaian proses yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data mengenai kinerja dan pelayanan untuk ditindaklanjuti dengan program peningkatan mutu secara berkelanjutan.

Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan merupakan suatu penilaian menyeluruh yang dilakukan oleh TIM Penjaminan Mutu (TPM) untuk menentukan peringkat pengakuan terhadap kualitas penyelenggaraan seluruh aktivitas penjaminan mutu pada Pengadilan. Kegiatan akreditasi tersebut merupakan pengembangan dari kegiatan sertifikasi ISO yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mencapai optimalisasi, efisiensi dan profesionalisme pelaksanaan kegiatan dilingkungan pengadilan.

Program Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) merupakan jawaban atas perubahan dan merupakan bentuk pembinaan yang inovatif, terstruktur, sistemik dan berkelanjutan. Inovatif dalam arti program ini adalah program orisinal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang belum pernah digunakan atau diterapkan oleh satuan kerja lain di Mahkamah Agung. Terstruktur dalam arti bahwa organisasi penjaminan mutu telah dibentuk di Ditjen Badilum, di Pengadilan Tinggi dan di Pengadilan Negeri se Indonesia. *Sistemik* dalam arti seluruh komponen organisasi penjaminan mutu dituntut untuk melakukan kolaborasi dan sinergi dalam mewujudkan "*Indonesian Court Performance-Excellent/ ICP-E*". Berkelanjutan dalam arti bahwa seluruh capaian yang telah diraih oleh pengadilan negeri akan dievaluasi secara berkala, sehingga harus senantiasa dipelihara dan dipertahankan.

Ada 7 (tujuh) kriteria dalam penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu, yaitu :

- 1) Kepemimpinan (*Leadership*)
- 2) Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*)
- 3) Fokus Pelanggan (*Customer Focus*)
- 4) Manajemen Sumberdaya (*Resources Management*)
- 5) Proses Manajemen (*Management Process*)
- 6) Sistem Dokumen (*Document Sistem*)
- 7) Hasil Kinerja (*Performance Result*)

Akreditasi penjaminan mutu menjadi salah satu penunjang peningkatan pelayanan publik di Pengadilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Dengan adanya program ini, maka setiap SDM di Pengadilan dituntut untuk mempertahankan kinerjanya bahkan meningkatkan kinerjanya.

Seluruh Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah memperoleh sertifikat akreditasi penjaminan mutu dari Ditjen Badilum pertama kali dengan data sebagai berikut :

NO.	SATKER	TANGGAL SERTIFIKAT AKREDITASI	NILAI
1.	Pengadilan Tinggi Banten	Tanggal : 16 Desember 2016 Nomor : TAPM.03/QMR/SERTIFIKAT/12/2016	A
2.	Pengadilan Negeri Tangerang	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.081/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A
3.	Pengadilan Negeri Serang	Tanggal : 16 Desember 2016 Nomor : TAPM.048/QMR/SERTIFIKAT/12/2016	A
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.083/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	Tanggal : 18 Juli 2017 Nomor : TAPM.082/QMR/SERTIFIKAT/7/2017	A

Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Seluruh Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten tahun 2020 sebagai berikut :

NO	NAMA PENGADILAN	NOMOR DAN TANGGAL SK	NILAI AKREDITASI SEBELUMNYA	NILAI AKREDITASI 2020	PREDIKAT
1.	Pengadilan Tinggi Banten	02/DJU/SK/OT01.3/I/2021 6 Januari 2021	725	723	A
2.	Pengadilan Negeri Tangerang	02/DJU/SK/OT01.3/I/2021 6 Januari 2021	700	701	A
3.	Pengadilan Negeri Serang	02/DJU/SK/OT01.3/I/2021 6 Januari 2021	725	709	A
4.	Pengadilan Negeri Pandeglang	1045/DJU/SK/OT01.3/I/2021 10 Maret 2021	702	712	A
5.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	1045/DJU/SK/OT01.3/3/2021 10 Maret 2021	705	713	A

Capaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten ini dievaluasi secara berkala, dan untuk Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 belum keluar. Berikut ini hasil pelaksanaan kegiatan terkait APM selama tahun 2021 pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeru sewilayah Banten :

a. APM Pengadilan Tinggi Banten

Pada Pengadilan Tinggi Banten telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/125/KPT/SK/KP.10.01/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Penunjukan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi (PMPT) Banten (*terlampir*).

Pada tanggal 07 September 2021 telah dilakukan Survilance Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Tim dari Dirjen Badilum Mahkamah Agung R.I untuk menilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten. Dari kegiatan ini ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam tabel dibawah ini :

Ketidaksesuaian Asesmen Survilance APM Pengadilan Tinggi Banten

NO	JENIS TEMUAN	LOKASI PROSES	JUMLAH TEMUAN
1	Minor	Top Manajemen	8 temuan
2	Minor	MR, DC,IA, Survei Harian, Survei Kepuasan Masyarakat & Survei Persepsi Anti Korupsi	2 temuan
3	Minor	Kepaniteraan	10 temuan
4	Minor	Kesekretariatan	16 temuan
5	Minor	Observasi/Saran/Potensi Ketidaksesuaian	4 temuan

Data diambil dari form laporan ketidaksesuaian nomor TAPM.F.TC-03-05

Dari ketidaksesuaian diatas, Pengadilan Tinggi Banten melakukan Rapat pembahasan hasil survilance akreditasi penjaminan mutu (APM) Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 13 September 2021. Dari hasil Survilance Pengadilan Tinggi Banten tersebut semua ketidaksesuaian yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu target penyelesaiannya dan dikirim pada tanggal 01 Oktober 2021 dan sudah berstatus CLOSE.

Adapun Tindaklanjut dari ketidaksesuaian di atas antara lain :

1. Membuat Jadwal Pengawasan terhadap Survei Kepuasan Masyarakat
2. Melakukan analisis hasil Survei Kepuasan Masyarakat PT Banten dan PN sewilayah Banten

3. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Tinggi dan PN sewilayah Banten.
4. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pedoman Penetapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum.
5. Melengkapi Dokumen Manajemen Resiko
6. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap Kepatuhan pengisian SIPP
7. Melakukan Tindak Lanjut terhadap ketidaksesuaian
8. Memonitor Kelengkapan Data SIKEP
9. Memperbaiki sistem pengarsipan Dokumen Keuangan dan Perkara
10. Melakukan Evaluasi dan Reviu SOP Kesekretariatan dan Kepaniteraan
11. Melaksanakan Simulasi Tanggap Darurat dan Kebakaran bekerjasama dengan instansi terkait
12. Mengupdate data DBR dan Label BMN serta mengontrol perawatan BMN
13. Sosialisasi kepada Petugas PTSP

Selanjutnya telah dilaksanakan audit internal pada tanggal 23 dan 24 November 2021. Adapun temuan audit internal tersebut berjumlah 26 minor dan 8 rekomendasi. Dari hasil laporan audit Pengadilan Tinggi Banten tersebut semua ketidaksesuaian yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu target penyelesaiannya dan sudah berstatus CLOSE.

b. APM Pengadilan Negeri Tangerang

Pada Pengadilan Negeri Tangerang telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2010 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang W29.U4/184/KP.10.10/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukkan Tim Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Tangerang.

Pelaksanaan Surveillance tahun 2021 dari Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 9 September 2021.



Setelah pelaksanaan surveillence tersebut diatas, Pengadilan Negeri Tangerang melakukan rapat tindak lanjut hasil surveillence dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum bersama seluruh komponen pengadilan pada tanggal 17 September 2021 di gedung aula Pengadilan Negeri Tangerang.



c. APM Pengadilan Negeri Serang

Pada Pengadilan Negeri Serang telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada tahun 2021, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Serang nomor W29.U1/199/SK.KPN/KOT.11.01/11/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan petikan keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 02/DJU/SK/OT01.3/1/2021 tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Klas IA Khusus dan IA Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2021 nilai Akreditasi Tahun 2020 Pengadilan Negeri Serang adalah 709 dengan predikat "A". Dan berdasarkan keputusan Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu (KeKA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor TAPM.049 / QMR / SERTIFIKAT / 3 / 2021 tanggal 31 Maret 2021 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Serang diberikan akreditasi dengan kualifikasi "A" (Excellent). Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum ini dilakukan penilaian kembali setiap 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal sertifikat ditandatangani.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mengikuti kegiatan surveilan oleh Tim Assesmen Akreditasi Penjaminan Mutu Badilum kembali pada tanggal 8-9 September 2021 yang merupakan kunjungan ke 4 (empat). Tujuan dari Assesmen Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Mutu adalah sebagai berikut:

- a) Untuk melihat kembali penerapan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

- b) Untuk melihat kembali proses kerjasama dan sinergitas dalam penerapan APM Badan Peradilan Umum.
- c) Merekomendasikan kembali penilaian APM Badan Peradilan Umum.

Laporan Ketidaksesuaian Asesmen Badilum telah ditindaklanjuti dengan menyampaikan Laporan Hasil Asesmen dan melampirkan seluruh dokumen bukti tindaklanjut atas temuan hasil asesmen. Seluruh dokumen tindaklanjut ketidaksesuaian asesmen Badilum telah dikirim melalui alamat email badilum.apm2@gmail.com.

Tim Supervisor Akreditasi Penjaminan Mutu dari Pengadilan Tinggi Banten mengadakan supervisi ke Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA pada tanggal 25-26 Maret 2021 dengan hasil baik meskipun masih ada beberapa temuan yang harus segera ditindaklanjuti.

d. Pengadilan Negeri Pandeglang

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Pandeglang dilakukan oleh Tim Asessor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Banten yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada tahun 2021 telah dibentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang nomor W29.U2/201/KPN/SK/04.5/12/2021 tanggal 01 Desember 2021.

Setelah dilakukan Asistensi oleh Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten akhirnya Pengadilan Negeri Pandeglang mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan nilai "A" (Excellent) sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Nomor : TAPM.083/QMR/SERTIFIKAT/7/2017 terhitung tanggal 18 Juli 2017. Dan mendapatkan Kembali sertifikat Akreditasi dengan nilai "A" (Excellent) sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Nomor : 1045/DJU/SK/OTO1.3/3/2021 terhitung tanggal 10 Maret 2021.

e. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu di Pengadilan Negeri Pandeglang dilakukan oleh Tim Asessor Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Pengadilan Tinggi Banten yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung sudah menetapkan Tim Akreditasi Penjaminan Mutu berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor

W29.U-/2539/KOT.00.8/X/2021 tanggal 27 OKTOBER 2021. Tim tersebut sudah melaksanakan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan standar Akreditasi Penjaminan Mutu. Hasil pelaksanaan tersebut telah dievaluasi dan dinilai oleh Asesor Internal pada tanggal 15 Juni 2021 yang bertugas berdasarkan SK Ketua Nomor W29-U3/1342/KOT.00.8/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.

Sebagai Pengadilan Negeri kelas II, penilaian Akreditasi pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung di tahun 2021, yaitu dilaksanakan surveilliance external oleh Pengadilan Tinggi Banten pada tanggal 09 s.d 10 November 2021.

Adapun Pengadilan Negeri Rangkasbitung mendapatkan Kembali sertifikat Akreditasi dengan nilai 713 predikat "A" (Excellent) sesuai Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Nomor : 1045/DJU/SK/OTO1.3/3/2021 terhitung tanggal 10 Maret 2021.

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan yang dilaksanakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk layanan pengadilan. Tujuannya mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan terukur sesuai standar, serta memberikan pelayanan yang prima, akuntabel dan anti KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).

Penerapan PTSP dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tanggal 12 November 2019.

Semua pengadilan di lingkungan Peradilan Umum wilayah Banten telah menerapkan PTSP. Adapun tampilan ruang/meja PTSP pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat pada gambar berikut:

1. PTSP PENGADILAN TINGGI BANTEN

Terdapat 3 (tiga) bagian pelayanan, yaitu pelayanan kepanitaraan, pelayanan kesekretariatan dan pelayanan pengaduan.



2. PTSP PENGADILAN NEGERI TANGERANG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum dan umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.



Pengadilan Negeri Tangerang sendiri telah ditetapkan sebagai pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yakni juara III Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus se-Indonesia sesuai surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 821/DJU/SK/HM.02.3/8/2021 tanggal 13 Agustus 2021.

Pelaksanaan Evaluasi kinerja PTSP sendiri selalu dilaksanakan setiap hari senin secara berkala, hal ini dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat di Pengadilan Negeri Tangerang dapat berlangsung secara cepat dan optimal.

Pada tanggal 4 November 2021 Pengadilan Negeri Tangerang berhasil mendapatkan penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kategori Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus di Bali. Piagam diserahkan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia YM Prof. Dr. M Syarifuddin, S.H, M.H.



3. PTSP PENGADILAN NEGERI SERANG

Terdapat 6 (enam) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu Tipikor, PHI, Pidana, Perdata, Hukum dan Umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.



Jumlah surat masuk tahun 2021 adalah sebanyak 4.369 surat, surat keluar tahun 2021 adalah sebanyak 5.120 surat, surat keterangan sebanyak 1.194 surat dan tamu yang berkunjung menemui pegawai Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA selama tahun 2021 adalah sebanyak 108 orang. Sementara pembuatan surat keterangan dari data sebanyak 1.194

surat yang menggunakan era terang saat pengajuannya adalah sebanyak 1.194 surat. Data tersebut berdasarkan data yang terinput pada aplikasi pelayanan terpadu satu pintu pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA per 31 Desember 2021.

4. PTSP PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court, meja inzage, meja informasi dan pengaduan.



5. PENGADILAN NEGERI SERANG RANGKASBITUNG

Terdapat 4 (empat) bagian pelayanan pada PTSP, yaitu pidana, perdata, hukum, umum. Serta telah disediakan pojok e-court dan meja inzage.



Secara umum Prosedur PTSP dilaksanakan melalui tahapan berikut: 1) Pemohon mengambil nomor antrian yang telah disediakan, 2) Pemohon wajib memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan untuk setiap layanan peradilan yang dimohonkan dan merupakan dasar untuk pemrosesan serta penyelesaian permohonan layanan, 3) Petugas PTSP mencatat, memverifikasi dan meneruskan kelengkapan berkas/dokumen ke backoffice untuk diproses sesuai SOP yang telah ditentukan. Khusus untuk pengadilan-pengadilan dengan jumlah perkara banyak agar menyediakan petugas verifikasi kelengkapan syarat-syarat sebelum diajukan ke meja PTSP.

Untuk meningkatkan kemampuan petugas PTSP dalam melayani masyarakat pencari keadilan, maka pada tanggal 12 November 2021 seluruh petugas PTSP di lingkungan peradilan umum wilayah Banten telah mengikuti Sosialisasi Pelayanan Prima pada PTSP yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Banten bekerja sama dengan BRI dan diikuti oleh Petugas PTSP dari seluruh Pengadilan Negeri sewilayah Banten.



Foto kegiatan Pelatihan Pelayanan Prima yang diselenggarakan oleh BRI

Adapun pembuatan surat keterangan yang sudah menggunakan eraterang pada Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat dilihat pada tabel berikut :

NO.	SATKER	JUMLAH SURAT KETERANGAN TAHUN 2021	JUMLAH SURAT KETERANGAN MENGGUNAKAN ERATERANG TAHUN 2021
1.	Pengadilan Negeri Tangerang	947	947
2.	Pengadilan Negeri Serang	1.194	1.194
3.	Pengadilan Negeri Pandeglang	832	832
4.	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	969	969

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Inovasi Pelayanan publik menjadi poin penting dalam implementasi program Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI) dari Pemerintah sebab inovasi diciptakan untuk mempermudah urusan masyarakat dan sebagai tanda majunya suatu bangsa.

a. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Banten

Pengadilan Tinggi Banten telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas, terakhir berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/121/KPT/SK/KP.04.5/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 (terlampir), dan Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Banten nomor W29.U/125/KPT/SK/KP.10.01/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 (terlampir).

Beberapa inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten, yaitu:

Bersifat Ekternal :

- Adanya e-PPID sebagai sarana layanan *online* bagi pemohon informasi publik sebagai salah satu wujud pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Pengadilan Tinggi Banten, adanya meja inzage untuk pihak yang ingin memeriksa/ mempelajari berkas perkara dan telah tersedianya mesin / layar touchscreen IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) yang tersedia di dekat meja PTSP.

- Adanya SIPERAD (Sistem Pendaftaran Penyempahan Advokat). Aplikasi ini mempermudah para calon Advokat yang ingin mengajukan permohonan penyempahan Advokat.
- Adanya Sosial Media berupa Instagram @pt-banten.go.ig, Facebook pengadilan tinggi banten yang menampilkan semua kegiatan yang dilakukan pengadilan Tinggi Banten (seperti pelantikan Advokat dll) untuk persidangan bisa dilihat di website Pengadilan Tinggi Banten www.pt-banten.go.id.
- Adanya E-Library atau SIPUS yaitu Sistem Informasi Perpustakaan Pengadilan Tinggi Banten
- Adanya SURVEY yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang di berikan Pengadilan Tinggi Banten
- Adanya siSUPER yaitu Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik yang berisi Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Survei Harian (SH)
- Adanya SIREKAN yaitu Sistem Informasi Rencana Kerja dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Banten. Aplikasi ini dibuat oleh Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran.

Bersifat Internal :

- Adanya SI-ANGPAW yaitu Sistem Informasi Pelaksanaan Anggaran Asisten Virtual Berbasis WhatsApp Pengadilan Tinggi Banten. Sistem ini berisi Informasi tentang :
 1. Slip Gaji dan Uang Makan
 2. Remunerasi
 3. Transport Hakim
 4. Realisasi Anggaran
 5. Pinjaman BRI
 6. Pinjaman KoperasiAplikasi ini dibuat oleh Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan Pengadilan Tinggi Banten.
- Adanya SIMANTAP (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Pengadilan Tinggi Banten) yang menampilkan Kinerja Berdasarkan Kepatuhan Penggunggahan Evidence per bagian baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan.

Aplikasi ini dibuat oleh Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
- Adanya PTSP , Aplikasi untuk proses pengelolaan surat masuk dan keluar pengadilan tinggi banten, dimulai dari penerimaan di meja PTSP kemudian di input diaplikasi PTSP, yang langsung bisa didisposisikan dalam aplikasi tersebut sampai dengan surat tersebut diterima oleh bagian / pegawai.

Aplikasi ini dibuat oleh Kantor agar mempermudah proses alur surat masuk dan keluar.

b. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Tangerang

Sesuai dengan PERPRES Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014, selanjutnya Mahkamah Agung mengeluarkan SK KMA No.071/KMA/SK/V2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung.

Terkait Surat Keputusan tersebut Ketua Pengadilan Negeri Tangerang membentuk Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W.29.U4/132/UM.02.02/XII/2012 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tugas bertanggungjawab untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada Pengadilan Negeri Tangerang baik berupa data, dokumen dan data seluruh warga Pengadilan Negeri Tangerang serta penataan 6 (enam) area perubahan yakni : 1. Pola Pikir dan Budaya Kerja, 2. Penataan Tata Laksana, 3 Penataan SDM Aparatur, 4. Penguatan Pengawasan, 5. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Sekarang ini Pengadilan Negeri Tangerang telah mempersiapkan berbagai dokumen yang diperlukan terkait dengan 6 (enam) area perubahan Reformasi Birokrasi. Dokumen-dokumen tersebut telah dikelompokkan pada masing-masing area 1 sampai area 6 yaitu :

1. Manajemen Perubahan

Dokumen meliputi :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/184/KP.10.10/02/2021, tertanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukkan Tim Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/891/KP.10.10/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) pada Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/890/KP.10.10/10/2021, tertanggal 18 Oktober 2021 tentang Penetapan Role Model pada Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Penataan Tata Laksana

Dokumen meliputi :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/787/KP.10.10/9/2021, tertanggal 14 September 2021 tentang Pemberlakuan Standar Operation Procedure (SOP) pada Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Tangerang Nomor : W29.U4/177/KP.10.10/02/2021, tertanggal 10 Februari 2021 tentang Struktur Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/642/KP.01.3/7/2021, tertanggal 26 Juli 2021 tentang Tata Tertib Pemakaian Seragam Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Dokumen meliputi :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/702/KP.10.10/08/2021, tertanggal 10 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Mediator Non Hakim Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/703/KP.04.6/08/2021, tertanggal 27 Juli 2021 tentang Pengangkatan Jurusita Pengganti Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/802/KP.10.10/09/2021, tertanggal 19 Februari 2021 tentang Penunjukan Tim Penilaian Role Model Pada Pengadilan Negeri Tangerang
4. Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/526/KP.10.10/6/2021, tertanggal 16 Juni 2021 tentang Pembagian Tugas Bekerja di Kantor Selama Masa Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pengadilan Negeri Tangerang.
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/524/OT.01.3/06/2021, tertanggal 16 Juni 2021 tentang Pemindahan Pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang

4. Penguatan Akuntabilitas

Dokumen meliputi :

1. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/605/KP.10.10/7/2021, tertanggal 31 Maret 2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna

Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Pengadilan Negeri Tangerang.

2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/276/OT.00/02/2021, tertanggal 22 Februari 2021 Tentang Tim Pelaksana Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja pada Pengadilan Negeri Tangerang.

5. Penguatan Pengawasan

Dokumen meliputi :

1. Keputusan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/404/KP.10.10/4/2021, tertanggal 24 Januari 2021 tentang Pembentukan Tim Penelaahan / Peneliti Eksekusi pada Pengadilan Negeri Tangerang.
2. Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W.29.U4/439/KP.05.8/05/2021 tertanggal 10 Mei 2021 tentang Tim Penilai Kinerja Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Karyawan dan Honorer pada Pengadilan Negeri Tangerang.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dokumen meliputi :

1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/786/KP.10.10/09/2021, tertanggal 29 Juli 2021 tentang Penugasan Petugas Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang Selatan.
2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/675/KP.10.10/8/2021, tertanggal 9 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Eksekusi Online Pada Pengadilan Negeri Tangerang.
3. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/387/KP.02.1/4/2021, tertanggal 14 April 2021 tentang Tim Penyusunan Survei Persepsi Korupsi dan Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : W29.U4/176/KP.10.10/2/2021 tanggal 10 Februari 2021 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang kelas I A Khusus.

Untuk mendukung berhasilnya pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Zona Integritas sekaligus Reformasi Birokrasi, Pengadilan Negeri Tangerang telah melakukan inovasi pelayanan publik diantaranya :

- adanya akses pintu yang berbeda antara pegawai dan pengunjung sidang
- adanya pintu metal detector
- adanya Flap Barrier yang terdapat pada akses masuk dan keluar pengadilan
- pencaanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang
- seluruh Apartur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Tangerang membagikan stiker bertuliskan Stop Korupsi

Inovasi lainnya Pengadilan Negeri Tangerang mempresentasikan Aplikasi Eksekusi Online pada tanggal 28 Juli 2021 bersama Vendor.



Untuk mendukung pelayanan kepada disabilitas maka Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 30 Juni 2021 melaksanakan Pelatihan bahasa isyarat yang digalakkan oleh DPC Gerkatina Kota Tangerang. Pelatihan ini diikuti oleh seluruh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Tangerang.



c. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Serang

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik serta dalam rangka pembangunan zona integritas pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA, maka Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penataan dan penempatan ruang tamu terbuka yang sebelumnya terletak di lantai 2 menjadi di lantai 1 berdekatan dengan meja pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu sebelumnya meja inzage berada di lantai 2 juga dipindahkan ke lantai 1 disamping layanan ecourt. Meja informasi persidangan telah disediakan di depan ruang sidang tirta. Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga menambahkan CCTV sebanyak 2 titik yang berada di *front office* sehingga terlihat jelas pelayanan yang dilakukan oleh petugas pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu petunjuk arah ruangan pejabat telah dihilangkan karena semua layanan kepada para Pengguna Pengadilan / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berada di meja layanan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), sedangkan *back office* sama sekali tidak menerima tamu ataupun pengguna pengadilan, kecuali bagi tamu formal pimpinan pengadilan seperti unsur Forkopimda yang melakukan kegiatan-kegiatan koordinasi.

Tahun 2021 bangsa Indonesia masih merasakan dampak pandemi Covid-19 yang mewabah mendunia, dalam rangka penanganan dan pencegahan serta memutus mata rantai penyebaran Covid-19 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA melakukan penyemprotan disinfektan dan swab. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung persidangan pidana dilakukan secara online. Persidangan secara telekonferensi atau online melalui zoom meeting yang saat ini sudah berjalan efektif di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA meskipun hal ini merupakan sebuah inovasi, namun oleh karena inovasi ini merupakan implementasi dari kebijakan Mahkamah Agung dan sudah dilaksanakan di hampir semua pengadilan, hal ini tidak dapat dikatakan sebagai inovasi pelayanan publik yang murni diciptakan oleh pengadilan. Demikian juga penggunaan digitalisasi pelayanan publik seperti SIPP dan bentuk aplikasi virtual lainnya yang saat ini juga sedang digalakkan di Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA juga tidak dapat dikategorikan sebagai inovasi pelayanan publik murni karena hal ini juga merupakan implementasi setiap Satker atas kebijakan maupun inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, namun demikian hal ini dapat dikatakan sebagai keseriusan dan komitmen Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA untuk bertekad membenahi bentuk-bentuk pelayanan yang sifatnya mempermudah dan mempersingkat mekanisme pelayanan kepada publik.

Inovasi yang berkaitan dengan pelayanan publik tahun 2021 adalah berupa pengadaan mesin antrian sidang dan pengadaan sarana persidangan

online yang anggarannya berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Urusan Administrasi tahun 2021. Sarana tersebut sudah dapat digunakan dan dalam kondisi baik.

Selain pengadaan sarana tersebut, tahun 2021 Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA mempunyai inovasi berupa aplikasi pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sub bagian kesekretariatan. Adapun inovasi aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi eldoklap (Elektronik Dokumen Pendukung Laporan) yaitu aplikasi yang digunakan untuk menyimpan dokumen laporan dari masing-masing bagian.
2. Aplikasi simorela (Sistem Informasi Monitoring Realisasi Anggaran) yaitu aplikasi untuk memonitoring realisasi anggaran setiap bulan.
3. Aplikasi SIPD (Sistem Informasi Perjalanan Dinas) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memonitoring perjalanan dinas pegawai.
4. Aplikasi SI CUTE (Sistem Informasi Cuti Elektronik) yaitu aplikasi pengajuan cuti secara online.
5. Aplikasi SI ATK (Sistem Informasi Alat Tulis Kantor) yaitu aplikasi yang digunakan untuk mengajukan permintaan alat tulis kantor secara online.

Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA berkomitmen akan terus berupaya menciptakan inovasi baik yang sifatnya sebagai turunan dari inovasi atau kebijakan pimpinan maupun inovasi yang sifatnya murni.

d. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Pandeglang

Pengadilan Negeri Pandeglang mengembangkan beberapa aplikasi inovasi untuk pelayanan publik dan untuk internal diantaranya adalah :

1) Antrian PTSP

Antrian PTSP Pengadilan Negeri Pandeglang adalah aplikasi antrian untuk pengunjung pengadilan yang berkepentingan terkait dengan bagian meja hukum, perdata, pidana dan umum. Dengan adanya aplikasi antrian PTSP ini bisa mempermudah para pengunjung untuk mengantri sesuai nomor antrian tersebut.

2) Audio Anti Gratifikasi

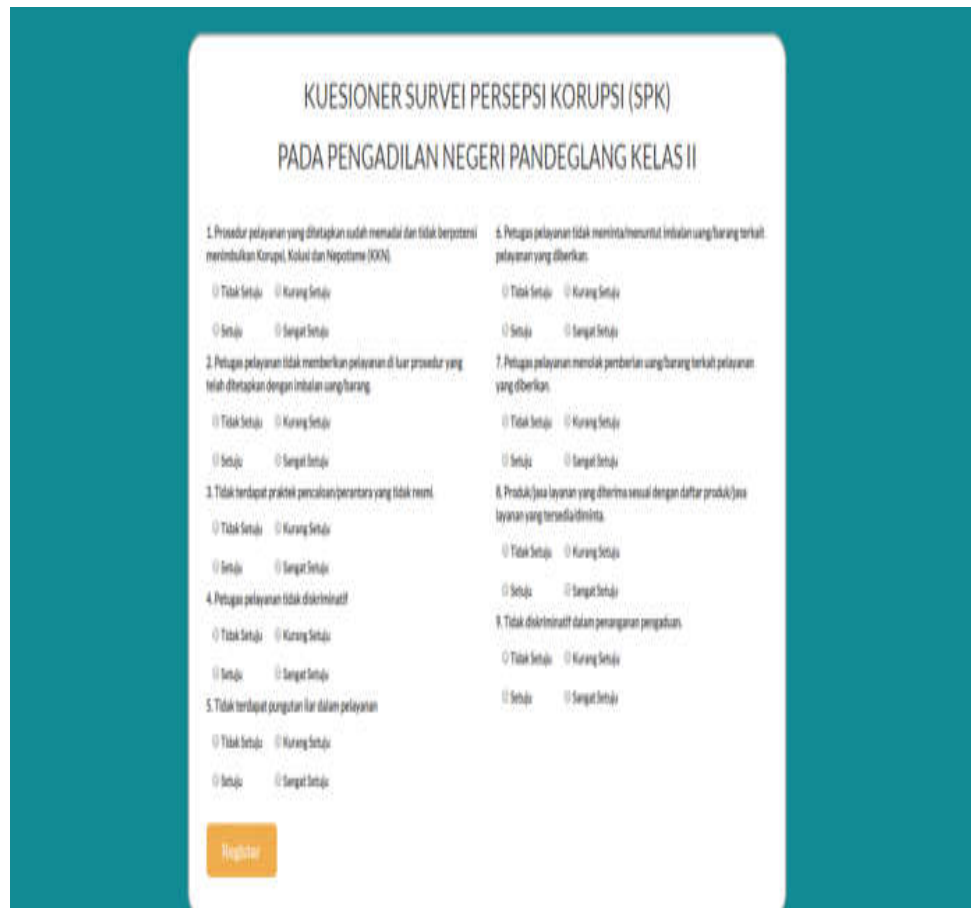
Audio Anti Gratifikasi Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu aplikasi yang digunakan untuk pengumuman audio penguas suara untuk publik mengenai anti gratifikasi dan memperingatkan pengunjung sidang agar tetap menjaga kebersihan di lingkungan Pengadilan Negeri Pandeglang secara otomatis setiap 2 jam atau 1 jam sekali.

3) Survei IKM

Survei IKM Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu bertujuan untuk memberikan penilaian bagi pelayanan publik di Pengadilan Negeri Pandeglang.

Fitur Survei IKM :

- Indeks Kepuasan Masyarakat
- Data Masyarakat Responden (Spk)
- Data Masyarakat Responden (Sipk)



4) Info Perkara dan Denda Tilang

Info Perkara dan Denda Tilang Pengadilan Negeri Pandeglang yaitu bertujuan untuk mempermudah para pencari keadilan mencari informasi perkara jadwal sidang dan denda tilang.



5) Aplikasi QR Code seperti :

- Aplikasi QR Code E-Brosur Kepaniteraan
- Aplikasi QR Code BMN
- Aplikasi QR Code SIKEP

6) Aplikasi E-Arsip



7) Aplikasi Whatsapp Bot (Pesan Jawab Otomatis)

e. Inovasi Pelayanan Publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Beberapa inovasi pelayanan publik pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yaitu inovasi Pembayaran Biaya Perkara melalui kerjasama dengan BTN (Bank Tabungan Negara) dengan adanya fasilitas *mobile bank vehicle* yang tersedia di lingkungan gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung sehingga lebih hemat waktu dan tenaga, proses menjadi lebih cepat karena sebelumnya setiap pembayaran biaya perkara selalu dilakukan penyetoran langsung ke bank yang berjarak paling dekat 2km.

Lalu adanya inovasi SMS Sistem Informasi Perkara, layanan ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, saat ini umumnya setiap orang telah memiliki atau menggunakan telepon seluler (ponsel) sehingga dengan adanya layanan ini setiap orang, kapan dan dimanapun berada dapat mengakses informasi tentang perkara. Layanan SMS ini dibuat guna mendukung aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), SIPP hanya dapat diakses masyarakat melalui jaringan internet, sehingga bagi masyarakat yang tidak memiliki akses internet dapat menggunakan layanan SMS ini untuk mengetahui informasi tentang parapihak, tanggal register, status terakhir, jadwal sidang dan juga biaya perkara.

BAB VI

PENGAWASAN

Pengawasan yaitu suatu upaya sistematis manajemen untuk melakukan perbandingan kinerja standar, rencana atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya untuk menetapkan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk memutuskan tindakan perbaikan dibutuhkan untuk melihat bahwa sumber daya manusia dimanfaatkan dengan efektif dan efisien mungkin didalam mencapai tujuan. Pengawasan merupakan salah satu fungsi pokok dari Mahkamah Agung.

Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung adalah sebuah fungsi dimana Mahkamah Agung punya peran dan juga fungsi sebagai pengawas dan melakukan proses supervisi segala bentuk peradilan yang berjalan di Indonesia. Baik dari sisi putusan hakim, berbagai macam kasus dan juga segala bentuk proses peradilan di Indonesia.

Tujuan Pengawasan

Tujuan dari pengawasan di lingkungan Peradilan Umum adalah sebagai berikut:

- Untuk menjaga terselenggaranya manajemen peradilan yang baik dan benar.
- Untuk menjaga terwujudnya tertib administrasi peradilan, dan tercapainya target yang telah ditetapkan sesuai program kerja.
- Untuk menjaga citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
- Untuk menjaga citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
- Untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik, disiplin dan prestasi kerja, guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.
- Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

A. INTERNAL

Sebagai satuan kerja di lingkungan Badan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Tinggi Banten selain bertugas sebagai *voorproost* (kawal depan) bagi Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan melaksanakan pengawasan juga melakukan pengawasan internal di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten. Pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten dilaksanakan setiap bulan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Pengawas Bidang. Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Tinggi Banten ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang mengalami beberapa kali

penggantian Hakim Pengawas selama tahun 2021, dan terakhir berdasarkan SK Nomor W29.U/119/KPT/SK/KP.10.10/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021.

Selanjutnya telah dilaksanakan audit internal pada tanggal 23 dan 24 November 2021. Adapun temuan audit internal tersebut berjumlah 26 minor dan 8 Observasi. Dari hasil laporan audit Pengadilan Tinggi Banten tersebut semua ketidaksesuaian yang ditemukan telah ditindaklanjuti sesuai batas waktu target penyelesaiannya dan sudah berstatus CLOSE.

Pengawasan rutin oleh Pengadilan Tinggi Banten juga dilakukan terhadap Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten. Kegiatan Pengawasan ke Pengadilan Negeri sewilayah Banten dilakukan 2x dalam setahun sebagai berikut :

No	Satuan Kerja	Pengawasan Pertama	Pengawasan Kedua
1	Pengadilan Negeri Pandeglang	22 s.d 23 Maret 2021	29 s.d 30 November 2021
2	Pengadilan Negeri Rangkasbitung	25 s.d 26 Maret 2021	09 s.d 10 November 2021
3	Pengadilan Negeri Serang	29 s.d 30 Maret 2021	14 s.d 15 Desember 2021
4	Pengadilan Negeri Tangerang	31 Maret s.d 01 April 2021	13 Desember 2021

Dan pada Pengadilan Negeri Pandeglang dan Rangkasbitung jadwal pengawasan daerah (bulan November 2021) tersebut dibarengi dengan kegiatan asistensi dan audit eksternal/ surveillance, sebagai wujud dari implementasi akreditasi penjaminan mutu yaitu Pelaksanaan pengawasan ini berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Banten. Yang di dalamnya menunjuk Hakim Tinggi Pengawas Daerah dengan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai koordinator Hakim Tinggi Pengawas Daerah.

Selain pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Tinggi Banten, Pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten juga telah berjalan dengan baik. Berikut ini dipaparkan pelaksanaan pengawasan internal di Pengadilan Negeri sewilayah Banten :

a. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Tangerang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas dan disiplin di berbagai bidang khususnya para pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Tangerang, telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

1). Menegakkan Disiplin Kerja, dengan tujuan meningkatnya disiplin dan kualitas kerja aparat peradilan, terwujudnya aparat peradilan yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan tugas peradilan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*, bersih dan bebas dari KKN, terciptanya pelayanan prima terhadap masyarakat pencari keadilan sesuai asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

2). Rapat Koordinasi

Rapat koordinasi pada Pengadilan Negeri Tangerang terdiri dari Rapat koordinasi Hakim, seluruh Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan Pegawai yang tersusun dalam jadwal rapat koordinasi.

3). Pengawasan

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Tangerang telah membentuk Hakim Pengawas Bidang dengan Surat Keputusan Nomor W.29.U4/1119/KP.10.10/12/2021, tertanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang.

Tabel Hakim Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Tangerang

No.	Nama / NIP	Jabatan Internal dalam unit organisasi
1	Barita Sinaga, SH, M.H	Koordinator Pengawas, Pengawas PP, JS dan JSP
2	a) Sih Yuliarti, SH.MH	Pengawas Perdata
	b) Subchi Eko Putro , SH, MH	Pengawas Delegasi Perdata
	c) Lucky Rombot Kalalo, SH	
3	a) Emy Tjahjani Widiastoeti, SH, MHum	Pengawas Pidana
	b) Elly Istianawaty,SH, MH	
4	a) Mahmuriadin, SH, MH	Pengawas Hukum/Direktori Putusan
	b) Ismail Hidayat, SH, MH	
5	a) Wendra Rais, SH,MH	Pengawas Bidang Tata Usaha dan Keuangan, Pengawas Honoror
	b) Fathul Mujib, SH,MH	
6	a) Kamaruddin Simanjuntak, SH	Pengawas Bidang Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
	b) Agung Suhendro, SH, MH	
7	a) R. Aji Suryo, SH.,MH	Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
	b) Ferdinand M L, SH., MH	
8	a) Bestman Simarmata, SH., MH	Pengawas Eksekusi
	b) Edy Toto Purba,SH., MH	
9	a) Drs Tugiyanto, Bc.Ip, SH., M.H	Bidang Humas/ Juru Bicara, Pengawas PTSP
	b) Arif Budi Cahyono, SH., M.H	
10	a) Agus Iskandar, SH., M.H	Pengawas SIPP
	b) Nanik Handayani, SH, MH	

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang, didapatkan hasil terkait informasi dan pengaduan yakni sebanyak 54 jumlah layanan informasi dan 66 jumlah layanan pengaduan yang sifatnya tembusan ke Ketua PN Tangerang.

b. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Serang

Assesment internal berdasarkan manual mutu seharusnya dilaksanakan 2 (dua) kali dalam setahun. Assesment internal Pertama pada tanggal 15 Juni 2021 dan Assesmen Internal kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November 2021.

Ada beberapa hal yang menjadi penilaian dalam Assesment Internal untuk 4 pilar terdiri dari : Pembangunan ZI, Monitoring Evaluasi, Penetapan Agen Perubahan, Monitoring Biaya Perkara, Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi, Pengisian Lembar Kerja, SIPP.

Selain Audit Internal, dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Ketua Pengadilan Negeri Serang mengeluarkan Surat Keputusan tentang Tim Pengawas Penegakan disiplin kerja pegawai dengan tugas :

- Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan;
- Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menentukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku;
- Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan.

c. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Pandeglang

Dalam melaksanakan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Pandeglang telah melaksanakan pengawasan internal antara lain :

- 1). Melaksanakan rapat bulanan secara rutin yang membahas antara lain :
 - Evaluasi kinerja dan penyampaian hasil temuan dari masing-masing hakim pengawas bidang disertai rekomendasi dan tindak lanjut;
 - Mengumumkan bila ada peraturan, kebijakan baru serta informasi

penting baik yang berasal dari Pimpinan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi ataupun yang berasal dari instansi lain yang perlu disampaikan kepada seluruh hakim dan pegawai;

- Laporan minutası perkara termasuk pengecekan pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
- 2). Secara berkala dilakukan rapat khusus Hakim, Pejabat Struktural, Panitera Pengganti serta rapat khusus Jurusita / Jurusita Pengganti untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing bagian dalam pelaksanaan tugas Pokok dan Fungsinya serta mencari solusi pemecahannya.
 - 3). Secara berkala melakukan pemeriksaan / peninjauan langsung tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
 - 4). Pengawasan kedisiplinan dilakukan pengecekan rutin terhadap absensi Hakim dan Pegawai.

Secara berkala dilakukan pemeriksaan uang kas bendahara pengeluaran, serta pembukuan dan penatalaksanaan arsipnya.

d. Pengawasan Internal di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Pengawasan melekat dalam organisasi Mahkamah Agung dan Lembaga Peradilan di bawahnya adalah pengawasan secara struktural yang melekat dalam suatu organisasi, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pengawasan Melekat. Dengan pedoman aturan tersebut kantor Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan secara terus-menerus. Dalam rangka menegakkan disiplin pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dalam kesempatan apel pagi pembina apel selalu mengingatkan Penegakan Disiplin Kerja Pegawai pada Pengadilan Negeri Kelas II. Hal tersebut sesuai dengan pelaksanaan Perma No. 7,8,9 Tahun 2016 mengenai kedisiplinan. Adapun tugas tim pengawasan penegakan disiplin kerja pegawai adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan perilaku kepada pegawai akan ketaatan terhadap disiplin kerja yang telah ditetapkan.
2. Menentukan dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai dalam hal menemukan pegawai tidak memenuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan mengenai disiplin kerja dan kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku.
3. Melakukan pengawasan terhadap Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMS/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai

Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

4. Memberikan rekomendasi tindaklanjut kepada atasan secara berjenjang dalam hal tindak lanjut yang diperlukan tentang pengawasan yang dilaksanakan oleh Hakim Pengawas Bidang maka Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung menunjuk hakim-hakim untuk mengawasi bagian-bagian dengan SK nomor : W29-U3/1336/KOT.00.08/XI/2021 tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang:
 1. Lucia Ridayanti, SH.MH., Koordinator Hakim Pengawas Bidang Perdata ;
 2. Yudi Rozandinata, SH. Hakim Pengawas Bidang Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan;
 3. Iche purnawaty, SH.,MH. Hakim Pengawas Bidang Kepegawaian dan ortala;
 4. Ina Dwi Mahardeka, SH.MH. Hakim Pengawas Bidang Umum dan Keuangan;
 5. Danu Arman, SH.MH. Hakim pengawas bidang Pidana
 6. Rani Suryani Pustikasari, SH.MH. Hakim Pengawas Hukum dan Arsip.

Dari pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan di lingkungan kantor Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri se-wilayah Banten, didapatkan hasil terkait informasi dan pengaduan sebagai berikut:

Tabel Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten Tahun 2021

No.	Rekapitulasi	Jumlah
1	Sisa pengaduan Tahun 2020	-
2	Pengaduan yang diterima selama Tahun 2021	7
3	Pengaduan yang diteruskan ke Badan Pengawasan MARI	3
4	Pengaduan yang sedang ditangani oleh Pengadilan Tinggi dengan membentuk Tim Pemeriksa	-
5	Pengaduan yang didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Pertama	-
6	Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti dengan LHP ke Badan Pengawasan MARI tetapi sudah selesai pada tingkat Pengadilan Tinggi	-
7	Pengaduan yang telah selesai ditangani, LHP disampaikan ke Badan Pengawasan MARI	4
8	Sisa pengaduan yang belum selesai Tahun 2021	-
9	Jumlah Hakim dan Pegawai Non-Hakim yang dijatuhi hukuman disiplin	-

Tabel Rekapitulasi Data Pelayanan Informasi dan Pengaduan pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah Banten Tahun 2021

No.	Satker	Jumlah Layanan Informasi	Jumlah Layanan Pengaduan
1	PT Banten	39	7
2	PN Tangerang	66	54
3	PN Serang	20	19
4	PN Pandeglang	42	1
5	PN Rangkasbitung	61	NIHIL
Jumlah		228	81

B. EVALUASI

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya.

1. Pengadilan Tinggi Banten

Adapun hal-hal yang ditindaklanjuti sudah dilaksanakan, seperti Laporan Monev KPN Sebagai Role Model pada akhir tahun 2021, Setiap bulan membuat laporan Monitoring dan Evaluasi verifikasi pengguna e-court, Setiap rapat bulanan membahas teknis pengelolaan ASN, sudah membuat surat untuk pelatihan disabilitas, Mengupdate SK – SK yang harus diperbaharui, mengirim surat ke PN Sewilayah Banten untuk mengirimkan laporan Survei Kepuasan Masyarakat dan melakukan analisis. Dsb sesuai dengan tabel ketidaksihinggaan audit internal dibawah ini :

TEMUAN MAJOR : -
TEMUAN MINOR : 26 (SUDAH DI TINDAK LANJUTI)

NO	KETIDAK SESUAIAN	ANALISA PENYEBAB TIMBULNYA KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN PERBAIKAN / SOLUSI KETIDAKSESUAIAN	TINDAKAN PENCEGAHAN
Top Manajemen (Ketua, Wakil, Panitera Sekretaris)				
1	Dalam Pengelolaan Asesment PMPT PT belum melakukan Diskusi mengenai Teknik Pelaksanaan Asesment secara berkala (minimal satu bulan sekali)	Tim PMPT telah melaksanakan Diskusi Teknik Pelaksanaan Asesmen, namun diadakan hanya disaat akan melaksanakan asesmen saja	Dalam setiap rapat bulanan Pengadilan Tinggi Banten melakukan diskusi atau pembahasan mengenai Teknis Pengelolaan Asesmen	Ketua Pengadilan Tinggi Banten sebagai Tim PMPT melakukan pengawasan secara rutin setiap bulan, terkait diskusi atau pembahasan mengenai Teknis Pengelolaan Asesmen
2	KPT belum melakukan monev terhadap KPN sebagai role model	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan check list terbaru TAPM Badilum yang dikeluarkan bulan Mei 2021, kegiatan Monev tersebut harus dilakukan setiap Tahun - Ketua Pengadilan Tinggi Banten baru melaksanakan tugas di PT Banten pada tanggal 22 September 2021 	Laporan Monev KPT terhadap KPN sebagai role model akan dilakukan setiap akhir tahun	Ketua Pengadilan Tinggi Banten menjelang akhir tahun akan menyusun laporan monev terhadap KPN sebagai role model
3	Verifikasi pengguna e-court belum dibuat laporan monitoring dan evaluasinya	Kurangnya koordinasi dalam membuat monitoring dan evaluasi.	Dibuat Monitoring dan Evaluasi per bulan	Lebih memahami dalam pembuatan Monitoring dan Evaluasi.
4	Petugas PTSP belum mendapatkan pelatihan disabilitas	Belum dilaksanakannya pelatihan pelayanan disabilitas kepada petugas PTSP dikarenakan belum adanya jadwal untuk kegiatan tersebut	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten telah membuat dan mengirimkan surat permohonan pelatihan disabilitas untuk petugas PTSP	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten menjadwalkan ditahun berikutnya untuk diadakannya pelatihan disabilitas kepada petugas PTSP

5	Belum semua pelayanan disabilitas pada Pelayanan PTSP terpenuhi diantaranya media informasi braile dan papan informasi visual	Belum terpenuhinya pelayanan disabilitas pada pelayanan PTSP seperti media informasi braile dan papan informasi visual dikarenakan belum adanya anggaran untuk itu	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memerintahkan kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan untuk memenuhi fasilitas pada PTSP terutama pada pelayanan PTSP	Kepala Bagian Umum dan Keuangan Memastikan semua fasilitas pada pelayanan PTSP terpenuhi dengan memerintahkan kepada Kasubag TURT untuk selalu memonitoring sarana dan prasarana di lingkungan kerja pengadilan Tinggi Banten
6	SK Pola Mutasi internal belum dilakukan update	Sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi tidak teliti dalam melakukan inventarisir pembaruan SK – SK yang terjadi karena penggantian Ketua Pengadilan Tinggi Banten	Melakukan update SK Pola Mutasi Internal yang ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten yang menjabat	Disaat ada pergantian Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sub bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi segera menginventarisir SK – SK apa saja yang harus di perbarui.
7	Laporan Monev Whistle Blowing System belum ada	Kurangnya koordinasi di Kepaniteraan Muda Hukum dalam melakukan monitoring dan evaluasi Pengaduan dan <i>Whistle Blowing System</i>	Dibuat Monitoring dan Evaluasi per bulan	Lebih memahami dalam pembuatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan dan <i>Whistle Blowing System</i>
8	Laporan Monev E-Court belum ada	Kurangnya koordinasi dalam membuat monitoring dan evaluasi.	Dibuat Monitoring dan Evaluasi per bulan	Lebih memahami dalam pembuatan Monitoring dan Evaluasi.
9	Laporan Monev Delegasi tidak pernah dilakukan	Pengadilan Tinggi Banten telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Negeri untuk selalu mengirimkan data bantuan penanganan delegasi secara rutin setiap bulan, akan tetapi Pengadilan Negeri tidak tertib mengirimnya	Mengirimkan surat kembali ke Pengadilan Negeri Pengaju untuk mengingatkan hal tersebut	Melakukan pembahasan terkait Monev delegasi dalam rapat internal Kepaniteraan Muda Perdata

10	Belum pernah dilakukan Monev SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2010 tentang Salinan dan Petikan Putusan	SEMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 2010 tentang Salinan dan Petikan Putusan tersebut yang melaksanakan adalah Pengadilan Negeri. Pengadilan Tinggi hanya mengawasi pelaksanaannya berdasarkan laporan yang dikirimkan oleh Pengadilan Negeri.	Ketua Pengadilan Tinggi Banten mengeluarkan surat Tindak lanjut SEMA Nomor 1 Tahun 2011	Setiap bulan Pengadilan Tinggi Banten memantau kepatuhan Pengadilan Negeri dalam melaporkan penyampaian salinan dan petikan putusan
11	Belum semua pegawai tertib dalam melakukan Pengisian E - LLK	Kurangnya monitoring atasan langsung kepada para pegawai terkait pelaksanaan pengisian LLK	Pada setiap rapat bulanan di sub bagian maupun kepaniteraan muda selalu dimonitoring pelaksanaan dan dituangkan dalam notulen rapat bulanan	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten telah menerbitkan Surat edaran Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 17 September 2021 tentang Pembuatan Laporan Lembar Kerja. Dan selalu diadakan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya.
MR/Wakil, DC, IA, Survei Harian, Survei Kepuasan Masyarakat & Survei Persepsi Anti Korupsi				
12	Belum dilakukan Analisa dan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh PN Sewilayah PT.BANTEN	Belum diterimanya Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Banten untuk dasar analisa dan pengembangan kompetensi.	Telah dikirim surat Permintaan Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat dari Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Banten untuk dijadikan sebagai dasar dalam melakukan Analisa pengembangan kompetensi.	Memonitor Hasil Laporan Survei pada Pengadilan Negeri se-wilayah Pengadilan Tinggi Banten melalui website-nya masing-masing.
Kepaniteraan dan Kesekretariatan				

13	SK Pemberlakuan SOP pada bagian perdata belum diperbaharui	Karena SK pemberlakuan SOP pada Kepaniteraan Perdata berlaku secara kolektif Bersama dengan SOP Pidana dan Tipikor, Apabila akan diperbaharui tentu juga diperlukan adanya koordinasi dengan Kepaniteraan Tipikor dan Pidana, sehingga Perdata tidak dapat memperbaharui SK Pemberlakuan SOP tersebut secara terpisah	Akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Kepaniteraan Tipikor dan Pidana terkait perubahan SK tersebut	Akan selalu memonitor dan mengevaluasi SK tersebut setiap penggantian Pimpinan
14	Berita Acara Penyerahan Berkas perkara yang telah putus No. 223/PDT/2021/PT.BTN, tidak ditemukan dalam Bundel Penyimpanan Berita Acara Penyerahan Berkas dan tidak didapati tanda terima pada Buku Ekspedisi. Setelah dilakukan penelitian, bahwa ternyata Bundel Berkas perkara tersebut telah diserahkan kepada Kepaniteraan Hukum namun Petugas Kepaniteraan Hukum belum menyerahkan kembali Berita Acara Penyerahan Berkas ke Kepaniteraan Perdata karena masih dalam proses pengecekan kelengkapan bundel perkara dan oleh karenanya penyerahan berkas ke Hukum belum dicatatkan ke	Karena mekanisme penerimaan berkas pada bagian hukum diteliti terlebih dahulu kelengkapan berkasnya, apabila telah lengkap barulah Berita Acara ditandatangani oleh Petugas bagian hukum, dan setelah ditandatangani barulah dikembalikan ke Kepaniteraan Perdata, sedangkan pada saat diteliti terlebih dahulu Kembali tanpa membawa Berita Acara Penyerahan Berkas	Sesegera mungkin apabila berkas telah diserahkan, Kepaniteraan Perdata meminta kembali Berita Acara yang telah diserahkan yang sudah ditandatangani oleh Petugas bagian hukum	Diusahakan agar setelah berkas setelah diserahkan, maka Petugas bagian Perdata dan Petugas Bagian Hukum segera menandatangani Berita Acara tersebut

	dalam Buku Ekspedisi.(fotocopyBA Penyerahan Berkas No. 223/PDT/2021/PT.BTN terlampir)			
15	Pada Bagian Pidana Belum ada Penyerahan bukti buku serah terima laporan hasil pengawasan ke Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten	Laporan hasil pengawasan sudah diserahkan setiap bulan, namun tidak menyerahkan tanda terima	Dibuat buku tanda terima penyerahan hasil pengawasan untuk Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dan Panitera Pengadilan Tinggi Banten	Monitoring dari Panitera Muda Pidana secara rutin terkait penyerahan hasil pengawasan
16	Pencarian Berkas Arsip pada Kepaniteraan muda Pidana tidak dapat ditemukan dalam waktu 5 menit	Belum adanya lemari untuk menyusun seluruh Arsip Berkas Pidana	Meminta Lemari Penyimpanan Arsip pada bagian TURT.	Merapikan Arsip Berkas Pidana yang belum tersimpan di lemari.
17	Belum tersedianya APAR di ruangan Arsip	Posisi peletakan APAR diruang arsip masih belum pada posisi yang sesuai sehingga jarak antara ruang arsip dan APAR masih agak jauh	Kabag Umum dan Keuangan memerintahkan kepada Kasubag TURT beserta staf untuk menata ulang peletakan APAR agar lebih efektif dan efisien	Kasubag TURT beserta staf mengajukan persediaan APAR baru apabila dianggap kurang
18	Hasil monev dan hasil laporan pengawasan bidang Panmud Tipikor telah dilakukan, namun penyerahannya belum menggunakan surat pengantar, hanya menggunakan buku ekspedisi saja.	Kurang cermatnya Kepaniteraan muda tipikor dalam memenuhi kelengkapan penyerahan hasil monev dan laporan hasil pengawasan bidang.	Dibuat surat pengantar penyerahan hasil monev dan Laporan Hasil Pengawasan Bidang Kepaniteraan Tipikor.	Panitera Muda Tipikor secara rutin Memonitor kelengkapan penyerahan hasil monev dan Laporan Hasil Pengawasan.

19	Monitoring dan Evaluasi Bagian Tipikor sudah dibuat, namun dibuat secara keseluruhan bukan per item.	Monitoring dan evaluasi di buat secara keseluruhan karena dibahas dalam satu kegiatan yang sama	Dibuat monitoring dan evaluasi berdasarkan per item kegiatan	Panitera Muda Tipikor secara rutin mengawasi penyusunan laporan monev
20	Arsip Kepegawaian sudah tersusun rapi dan lengkap hanya belum tersusun secara sistematis sesuai jabatan (DUK)	Masih ada pegawai yang meminjam arsip kepegawaian untuk keperluan update MySAPK, SITARA, SIKEP maupun keperluan pribadi. Namun setelah meminjam tidak dikembalikan sesuai dengan susunan sebelumnya	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi melakukan penyusunan kembali arsip kepegawaian sesuai DUK nya	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi akan melakukan pengecekan urutan arsip kepegawaian setiap bulan
21	SK Tim Pengelola Website belum diupdate	Sub Bagian Kepegawaian tidak teliti dalam melakukan Pembaruan SK-SK disaat terjadi penggantian Pimpinan	Memperbaiki SK Tim Pengelola website dengan pimpinan yang menjabat sekarang	Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi melakukan pembaruan SK – SK disaat terjadi penggantian pimpinan
22	Pada sub bagian TURT, SK tentang Pemberlakuan SOP belum di update sehingga bisa dilakukan monitoring dan evaluasi implementasi SOP	Dikarenakan Monev belum dilakukan, sehingga belum ada SK pemberlakuan maupun pengesahan SOP terbaru yang telah di monev	Kasubag TURT beserta staf telah melakukan Monev dan akan diserahkan kepada Sub Bagian Kepegawaian dan berkoordinasi terkait SK pemberlakuan SOP yang terbaru	Kabag Umum dan Keuangan memerintahkan kepada Kasubag TURT beserta staf untuk melakukan monitoring dan evaluasi SOP minimal setahun sekali untuk mengetahui kesesuaian dengan aturan terbaru

23	Jalur evakuasi, titik kumpul dan petunjuk titik kumpul perlu diupdate	Dikarenakan adanya beberapa perbaikan dan renovasi pada lingkungan Pengadilan Tinggi Banten sehingga Jalur evakuasi, titik kumpul dan petunjuk titik kumpul belum di update	Kasubag TURT beserta staf telah membuat dan memasang Jalur evakuasi, titik kumpul dan petunjuk titik kumpul	Kabag Umum dan Keuangan memerintahkan kepada Kasubag TURT untuk senantiasa melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana yang harus diperbaiki dan diupdate
24	CCTV belum ada kartu Control Service	Dikarenakan adanya perubahan letak CCTV pada ruangan depan sehingga kartu kontrolcctv belum terpasang	Kasubag TURT beserta staf telah membuat dan memasang kartu Control Service CCTV	Kabag Umum dan Keuangan memerintahkan kepada Kasubag TURT untuk senantiasa melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana yang harus diperbaiki dan diupdate
25	Belum ada monitor CCTV padaruang KPT	Monitor CCTV pada ruangan KPT telah tersedia, namun monitor tersebut dalam perbaikan	Kasubag TURT beserta staf telah memasang kembali monitor CCTV pada ruang KPT	Kabag Umum dan Keuangan memerintahkan kepada Kasubag TURT untuk senantiasa melakukan monitoring terhadap sarana dan prasarana yang belum tersedia dan agar segera mencari solusi untuk sarana dan prasarana yang rusak atau bermasalah
26	Simulasi tanggap darurat dan kebakaran belum dilaksanakan	Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten telah membuat surat pengajuan simulasi tanggap darurat dan kebakaran akan tetapi karena terbentur waktu dan kondisi anggaran sehingga kegiatan tersebut belum dapat dilaksanakan	Kasubag TURT beserta staf telah menjadwalkan pelaksanaan simulasi tanggap darurat dan kebakaran pada awal tahun dengan menggunakan anggaran DIPA TA. 2022	Kabag Umum dan Keuangan atas persetujuan sekretaris menjadwalkan setiap tahunnya kegiatan tersebut

2. Pengadilan Negeri Tangerang

Seluruh hasil dan temuan terhadap pemeriksaan dan pengawasan yang telah dilakukan oleh para hakim pengawas bidang pada Pengadilan Negeri Tangerang baik dengan pelaksanaan tugas pokok di lingkungan kepaniteraan maupun kesekretariatan serta evaluasi atas penyelenggaraan manajemen peradilan, kinerja lembaga peradilan dan kualitas pelayanan publik, dituangkan dalam bentuk laporan tertulis atau berita acara pemeriksaan dengan susunan dan format yang sistematis, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang.

Terhadap temuan-temuan atau hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut para hakim pengawas merekomendasikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang atau para pejabat yang berkompeten untuk segera menindak lanjuti hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun - tahun berikutnya dapat disusun program kerja secara cermat dan tepat serta kendala-kendala yang ada dapat segera diselesaikan, sehingga tidak muncul lagi pada pelaksanaan tugas tahun anggaran berikutnya

3. Pengadilan Negeri Serang

Berdasarkan hasil assesmen internal dan tindak lanjut atas temuan assesmen internal temuan dari manajemen terdahulu yang belum dapat ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

- Lahan Parkir
- Tambahan Genset
- Ruang Back Office Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Temuan tersebut diatas belum bisa ditindaklanjuti karena terkait dengan ketersediaan anggaran dan keterbatasan ruangan pada Pengadilan Negeri / PHI / Tipikor Serang Kelas IA.

4. Pengadilan Negeri Pandeglang

Pada umumnya pengawasan di Pengadilan Negeri Pandeglang telah berjalan dengan baik, karena Pengawasan melekat telah berjalan dan dilaksanakan oleh pimpinan dan pejabat yang bertanggung jawab. Pengawasan oleh Hakim Pengawas Bidang juga telah dilaksanakan dan berjalan dengan baik, karena Pengawas Bidang telah menjalankan tugasnya untuk memberikan pengawasan dan arahan-arahan, selanjutnya membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui Wakil Ketua Pengadilan setiap bulan. Selain pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas bidang, pimpinan juga melakukan evaluasi melalui forum rapat bulanan yang membahas kinerja

melalui aplikasi-aplikasi pendukung baik di bagian Kepaniteraan maupun di bagian Kesekretariatan.

Hasil evaluasi dan pengawasan internal pada masing-masing bagian, masih ditemukan permasalahan dan hambatan-hambatan sebagai berikut :

- Masih banyaknya Panitera Pengganti yang diperbantukan di Kepaniteraan Pidana, Kepaniteraan Perdata dan Kepaniteraan Hukum, hal ini disebabkan karena kurangnya pegawai pada Pengadilan Negeri Pandeglang
- Adanya Jabatan Panitera Muda Pidana yang belum terisi dan hanya di isi oleh seorang Pelaksana tugas
- Kurangnya Staf Pelaksana pada Pengadilan Negeri Pandeglang
- Belum adanya Smoking Area di Pengadilan Negeri Pandeglang
- Pengadilan Negeri Pandeglang membutuhkan Staf Pelaksana dibidang IT agar implementasi SIPP, e-court dan e-litigasi bisa berjalan dengan maksimal
- Masih banyak rumah dinas yang rusak berat dan harus segera diperbaiki
- Masih ada tenaga Honorer yang belum masuk kedalam DIPA

DIPA yang akan datang agar lebih ditingkatkan lagi, sehingga dana operasional kegiatan kantor bisa tercukup

5. Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Dari hasil pengawasan yang telah dilaksanakan baik Hakim Pengawas Bidang maupun Hakim Pengawas dan Pengamat telah dilaksanakan evaluasi yang dilaksanakan sekaligus bersamaan dengan Rapat bulanan secara rutin minimal 1 kali dalam 1 bulan. Yang dimulai dengan rapat berjenjang dari yang paling bawah pada minggu ke 2 hasil Temuan-temuan dan permasalahan dari hasil pengawasan sudah hampir semua dibenahi dan dilaksanakan sesuai arahan Hakim Pengawas Bidang dan dari hasil evaluasi.

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 sebagaimana disampaikan di depan dapat memberikan gambaran secara umum tentang keadaan dari masing-masing satuan kerja yang ada dalam wilayah Pengadilan Banten di tahun 2021, dari laporan tersebut disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, yaitu antara lain :

1. Secara umum bahwa Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri Sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan pengelolaan Administrasi Perkara dan Administrasi Umum dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan telah melaksanakan program Akreditasi Penjaminan Mutu, namun demikian masih banyak yang perlu dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, terutama menyangkut peningkatan kinerja para pegawai dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.
2. Implementasi e-court dan SIPP di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten telah berjalan baik dan didukung oleh sarana teknologi informasi yang cukup memadai, namun masih perlu peningkatan kinerja untuk meningkatkan nilai kepatuhan pengisian data SIPP yang termonitoring melalui aplikasi MIS (Aplikasi Monitoring Implementasi SIPP).
3. Pelaksanaan program Akreditasi Penjaminan Mutu berusaha untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan demi peningkatan pelayanan publik. Program ini menjadi pendukung pelaksanaan pengawasan di lingkungan Peradilan, baik internal satuan kerja maupun pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Banten terhadap Pengadilan Negeri sewilayah Banten.
4. Baik Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Banten telah melaksanakan Pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
5. Program Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud transparansi, efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan pelayanan peradilan menjadi perhatian utama semua satuan kerja Peradilan Umum sewilayah Banten. Program ini selalu disempurnakan dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang ada.

Pengembangan inovasi pelayanan publik menjadi nilai tambah masing-masing Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sewilayah Banten dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat pencari keadilan. Setiap satuan kerja berlomba memberikan dedikasinya dalam pengembangan inovasi pelayanan publik.

B. REKOMENDASI

Dalam rangka peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten sehingga dapat melaksanakan fungsi peradilan dan pelayanan publik yang terbaik, maka rekomendasi yang ditujukan kepada pimpinan Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Penambahan tenaga pelaksana/ staf administrasi bagi Pengadilan tingkat pertama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Banten mendesak untuk dipenuhi, beberapa diantaranya untuk kebutuhan staf administrasi perkara, arsiparis, pustakawan dan penata laporan.
2. Perlunya pembinaan sumber daya manusia dalam berbagai bentuk kegiatan bimbingan atau pendidikan atau pelatihan agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.
3. Penambahan alokasi anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana, diantaranya untuk renovasi gedung Pengadilan (penambahan Aula untuk Pengadilan Tinggi Banten), renovasi rumah dinas hakim untuk Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten, lahan parkir untuk gedung Pengadilan Negeri Serang karena area parkir yang ada sekarang tidak mencukupi sehingga tidak tertata rapi dan pengadaan sarana / prasarana terutama yang menunjang pelayanan publik dalam hal PTSP, E-court dan SIPP.
4. Penambahan alokasi DIPA untuk mendukung program Akreditasi Penjaminan Mutu.

Melalui laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021 Pengadilan Tinggi Banten ini, semoga segala kekurangan dan kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi Banten dan Pengadilan Negeri sewilayah Banten dapat segera teratasi dengan adanya tindaklanjut dari mahkamah Agung.

LAMPIRAN :

1. Laporan Keadaan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Banten
2. Laporan Keadaan Perkara Pidana Pengadilan Tinggi Banten
3. Laporan Keadaan Perkara Tipikor Pengadilan Tinggi Banten
4. Data Stistik Perkara SIPP sewilayah Pengadilan Tinggi banten
5. SK Penunjukan Tim APM Pengadilan Tinggi Banten
6. SK Penunjukan Tim Pembangunan ZI Pengadilan Tinggi Banten

LAPORAN KEADAAN PERKARA PERDATA
TAHUN 2021

NO.	PERKARA MASUK	NAMA MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN MAJELIS (DAFTAR URUT SENIORITAS)
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN MAJELIS HAKIM	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	134/PDT/2020/PT BTN 22/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C21.C8.C22.D11	26.11.2020	26.11.2020	04.01.2021 Membatalkan				Ketua : RESPATUN WISNU WARDOYO, SH
2	139/PDT/2020/PT BTN 27/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17.C1.C25.D7	30.11.2020	30.11.2020	20.01.2021 Membatalkan				Wakil Ketua : H. SUDIYATNO, SH.,MH
3	142/PDT/2020/PT BTN 752/Pdt.G/2019/PN Tng Wanprestasi	C7.C16.C20.D16	02.12.2020	02.12.2020	20.01.2021 Memperbaiki				1 MASRUDIN CANIAGO, S.H., MH 2 DORTIANNI FARDEDE, S.H.,M.H.
4	143/PDT/2020/PT BTN 75/Pdt.G/2020/PN Srg Wanprestasi	C8.C21.C22.D15	04.12.2020	04.12.2020	05.01.2021 Menguatkan				3 MUHAMMAD NURZAMAN, SH.,MH 4 HASIAMAH DISTIYAWATI, SH.,MH 5 AGUS HERDIOND, SH.,MH 6 MARIANA S.M PANJAITAN, SH.,MH 7 SITI FARIDA NI, SH.,MH 8 HARTADI, SH.,MH 9 H. ERLIN HERMANTO, SH.,MH 10 BUDI HAPSARI, SH.,MH 11 ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH.,MH 12 H. FERI FARDIAMAN, SH.,MH 13 DR. WAHIDIN, SH.,MHum 14 M. CH. SIAMTRI ENDE, SH 15 SUBACHRAN HARDI MUEYONO, SH.,MH 16 SOLAHUDDIN, SH.,MH 17 DR. BINSAR GULTOM, SH.,SE.,MH 18 KUSRIYANTO, SH.,MHum 19 H. SARPIN RIZALDI, SH.,MH 20 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,MHum 21 POSMAN BAKARA, SH.,MH 22 ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH 23 AGUNG SUBADI, SH 24 ERRY MUSTIANTO, SH 25 AGUNG SURADI, SH 26 ERRY MUSTIANTO, SH 27 M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH 28. IMANUEL SEMBRING, SH 29. RAMLI DARASAH, SH.,MHum 30. SOFYANSYAH, SH.,MH
5	144/PDT/2020/PT BTN 934/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C23.C27.D7	04.12.2020	04.12.2020	05.01.2021 Menguatkan				
6	146/PDT/2020/PT BTN 895/Pdt.G/2019/PN Tng Perceraian	A.C1.C25.D12	07.12.2020	07.12.2020	05.01.2021 Memperbaiki				
7	147/PDT/2020/PT BTN 1058/Pdt.G/2019/PN Tng Wanprestasi	B.C20.C15.D1	07.12.2020	07.12.2020	14.01.2021 Membatalkan				
8	148/PDT/2020/PT BTN 1137/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C2.C19.D9	08.12.2020	08.12.2020	07.01.2021 Menguatkan				
9	150/PDT/2020/PT BTN 119/Pdt.G/2019/PN Srg Wanprestasi	C9.C10.C24.D4	08.12.2020	08.12.2020	05.01.2021 Menguatkan				
10	151/PDT/2020/PT BTN 1103/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C22.C8.C21.D10	11.12.2020	11.12.2020	18.01.2021 Menguatkan				
11	152/PDT/2020/PT BTN 236/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C25.C22.D13	11.12.2020	11.12.2020	06.01.2021 Menguatkan				
12	154/PDT/2020/PT BTN 991/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	B.C18.C10.D02	14.12.2020	14.12.2020	13.01.2021 Menguatkan				
13	155/PDT/2020/PT BTN 325/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C2.C15.D7	14.12.2020	14.12.2020	11.01.2021 Memperbaiki				
14	156/PDT/2020/PT BTN 251/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	A.C15.C10.D1	16.12.2020	16.12.2020	19.01.2021 Membatalkan				Panitera : YUNDA HASBI, SH.,MH 1 H. SUNIYANTA, SH 2 AIF SAIFUDALLAH, SH. MH 3 WILAN WITARSIH, SH. 4 SITI SUSILAWATI, SH 5 ITAIDA LANTIUR P, SH 6 YANTO BUDIANTO, SH 7 PATUAN SIMARUUNTAK, SH., MH.
15	157/PDT/2020/PT BTN 162/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	C70.C16.C26.D13	17.12.2020	17.12.2020	14.01.2021 Membatalkan				
16	158/PDT/2020/PT BTN	C16.C10.CC24.D18	18.12.2020	18.12.2020	12.01.2021				

17	863/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum 159/PDT/2020/PT BTN eCourt 19/Pdt.G/2020/PN Rkb Perbuatan Melawan Hukum	C22.C8.C21.DC15	21.12.2020	21.12.2020	Memperbaiki 13.01.2021 Memperbaiki			8 IDRIS AWALUDDIN, SH, MH 9 SUTISNA, SH 10 CHRISTANTO PUJIONO, SH, MH 11 POEJI RAHARDJO, SH 12 TRI WODOO, SH, MH 13 BASRIDA MURNI, SH 14 NURFUAD, SH 15 NURMAINAH, SH 16 ENAR SUNARYA, SH 17 FERI ARDIANSYA, SH, MH 18 AHMAD BAEDOWI, SH
18	160/PDT/2020/PT BTN 55/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C24.C10.C25.D9	21.12.2020	21.12.2020	11.01.2021 Menguatkan			
19	161/PDT/2020/PT BTN 6/Pdt.G/2020/PN Rkb Perbuatan Melawan Hukum	C22.C21.C16.D6	22.12.2020	22.12.2020	13.01.2021 Tidak dapat			
20	162/PDT/2020/PT BTN 13/Pdt.G/2020/PN Pdt Perbuatan Melawan Hukum	C14.C15.C13.D4	22.12.2020	22.12.2020	12.01.2021 Menguatkan			
21	163/PDT/2020/PT BTN 6/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C17.C1.C25.D10	22.12.2020	22.12.2020	03.02.2021 Menguatkan			Rekapitulasi Perkara : 1 Sisa Bulan Lalu 25 2 Masuk Bulan Ini 15 3 Putus 27 4 Cabut Bonding 0 5 Sisa Akhir 13 a. Sudah dibagi 0 b. Belum dibagi 0 6 Sisa Belum Diminutasi 0
22	164/PDT/2020/PT BTN 64/Pdt.G/2020/PN Srg Wanprestasi	C18.C13.C4.D5	23.12.2020	23.12.2020	07.01.2021 Menguatkan			
23	165/PDT/2020/PT BTN 12/Pdt.G/2020/PN Srg Wanprestasi	A.C18.C14.D1	23.12.2020	23.12.2020	21.01.2021 Menguatkan			
24	166/PDT/2020/PT BTN 79/Pdt.G/2020/PN Srg Harta Bersama	C18.C13.C4.D7	23.12.2020	23.12.2020	06.01.2021 Menguatkan			
25	167/PDT/2020/PT BTN 16/Pdt.G/2020/PN Rkb Penyalahgunaan Hak	C21.C16.C20.D17	29.12.2020	29.12.2020	27.01.2021 Menguatkan			
1	1/PDT/2021/PT BTN 848/Pdt.G/2018/PN Tng Perceraian	C15.C10.C13.D16	05.01.2021	05.01.2021	21.01.2021 Menguatkan			Ketua : RESPATUN WISNU WARDOYO, SH A
2	2/PDT/2021/PT BTN 120/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16.C20.C22.D6	05.01.2021	05.01.2021	20.01.2021 Menguatkan			Wakil Ketua : H. SUDIYATNO, SH, MH B
3	3/PDT/2021/PT BTN 131/Pdt.G/2019/PN Srg Jual Beli	C10.C24.C4.D12	08.01.2021	08.01.2021	28.01.2021 Menguatkan			1 MASRUDIN CANIAGO, S.H., MH C 2 DORTIANNIA PARDEDE, S.H., M.H. 3 MUHAMMAD NURZAMAN, SH, MH 4 NASIAMAH DISTIYAWATI, SH, MH 5 AGLIS HERDIONO, SH, MH 6 MARIANA S.M PANJAITAN, SH, MH 7 SITI FARIDA MT, SH, MH 8 HARTADI, SH, MH 9 H. ERLIN HERMANTO, SH, MH 10 BUDI HAPSARI, SH, MH 11 ALBERT MONANG SIRINGO RINGO, SH, MH 12 H. FERI FARDIAMAN, SH, MH 13 DR. WAHIDIN, SH, MHum 14 M. CH. SIAMTRI ENDI, SH 15 SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH, MH 16 SOLAHUDDIN, SH, MH 17 DR. BINSAR GULTOM, SH, SE, MH 18 KUSRIYANTO, SH, MHum 19 H. SARPIN REZALDI, SH, MH 20 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH, MHum 21 POSMAN BAKARA, SH, MH
4	4/PDT/2021/PT BTN 785/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C1.C23.C17.D18	12.01.2021	12.01.2021	10.02.2021 Menguatkan			
5	5/PDT/2021/PT BTN 1134/Pdt.G/2019/PN Tng Perceraian	C11.C27.C23.D15	12.01.2021	12.01.2021	08.02.2021 Menguatkan			
6	6/PDT/2021/PT BTN 71/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13.C18.C4.D9	14.01.2021	14.01.2021	04.02.2021 Menguatkan			
7	7/PDT/2021/PT BTN 1135/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C21.C15.C23.D4	14.01.2021	14.01.2021	22.02.2021 Menguatkan			
8	8/PDT/2021/PT BTN 800/Pdt.PLW/2019/PN Tng Perceraian	C18.C8.C4.D13	14.01.2021	14.01.2021	04.02.2021 Menguatkan			
9	9/PDT/2021/PT BTN 680/Pdt.G/2018/PN Tng Wanprestasi	A.C22.C13.D10	20.01.2021	20.01.2021	17.02.2021 Menguatkan			

29	Perbuatan Melawan Hukum 29/PDT/2021/PT.BTN 252/Pdt.G/2020/PN Tng	C11.C13.C27.D06	02.03.2021	02.03.2021	17.03.2021 Menguatkan				
30	Perbuatan Melawan Hukum 30/PDT/2021/PT.BTN 257/Pdt.G/2020/PN Tng	C17.C01.C23.D18	02.03.2021	02.03.2021	05.04.2021 Membatalkan				
31	Perbuatan Melawan Hukum 31/PDT/2021/PT.BTN 961/Pdt.G/2019/PN Tng	C22.C18.C21.D09	04.03.2021	04.03.2021	24.03.2021 Menguatkan				
32	Perbuatan Melawan Hukum 32/PDT/2021/PT.BTN 926/Pdt.G/2018/PN Tng	C04.C16.C20.D17	04.03.2021	04.03.2021	25.03.2021 Menguatkan				
33	Percepatan 33/PDT/2021/PT.BTN 83/Pdt.G/2020/PN Tng	B.C11.C16.D14	08.03.2021	08.03.2021	26.03.2021 Menguatkan				
34	Perbuatan Melawan Hukum 34/PDT/2021/PT.BTN 125/Pdt.G/2020/PN Srg	C28.C29.C30.D13	08.03.2021	08.03.2021	19.04.2021 Menguatkan				
35	Perbuatan Melawan Hukum 35/PDT/2021/PT.BTN 87/Pdt.G/2020/PN Srg	C11.C27.C13.D17	08.03.2021	08.03.2021	23.03.2021 Menguatkan				
36	Perbuatan Melawan Hukum 36/PDT/2021/PT.BTN 278/Pdt.G/2015/PN Tng	A.C18.C21.D11	09.03.2021	09.03.2021	12.04.2021 Membatalkan				
37	Perbuatan Melawan Hukum 37/PDT/2021/PT.BTN 94/Pdt.G/2020/PN Srg	C17.C01.C23.D16	09.03.2021	09.03.2021	29.03.2021 Menguatkan				
38	Wanprestasi 38/PDT/2021/PT.BTN 793/Pdt.G/2018/PN Tng	C24.C15.C10.D12	10.03.2021	10.03.2021	08.04.2021 Menguatkan				
39	Ganti Rugi 39/PDT/2021/PT.BTN 92/Pdt.G/2019/PN Tng	C18.C22.C21.D06	10.03.2021	10.03.2021	06.04.2021 Membatalkan				
40	Perbuatan Melawan Hukum 40/PDT/2021/PT.BTN 92/Pdt.G/2019/PN Tng	C16.C20.C04.D14	15.03.2021	15.03.2021	22.04.2021 Menguatkan				
41	Wanprestasi 41/PDT/2021/PT.BTN 667/Pdt.G/2019/PN Tng	B.C01.C16.D16	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021 Menguatkan				
42	Wanprestasi 42/PDT/2021/PT.BTN 819/Pdt.G/2019/PN Tng	C29.C30.C28.D12	15.03.2021	15.03.2021	06.04.2021 Membatalkan				
43	Perbuatan Melawan Hukum 43/PDT/2021/PT.BTN 960/Pdt.G/2017/PN Tng	C27.C11.C13.D08	15.03.2021	15.03.2021	07.04.2021 Memperbaiki				
44	Perbuatan Melawan Hukum 44/PDT/2021/PT.BTN 898/Pdt.Plw/2018/PN Tng	C01.C23.C17.D18	15.03.2021	15.03.2021	07.04.2021 Menguatkan				
45	Perbuatan Melawan Hukum 45/PDT/2021/PT.BTN 1018/Pdt.G/2018/PN Tng	C15.C24.C10.D17	15.03.2021	15.03.2021	12.04.2021 Memperbaiki				
46	Perbuatan Melawan Hukum 46/PDT/2021/PT.BTN 73/Pdt.G/2020/PN Srg	C21.C18.C22.D06	17.03.2021	17.03.2021	29.04.2021 Menguatkan				
47	Wanprestasi 47/PDT/2021/PT.BTN 128/Pdt.G/2020/PN Srg	C20.C16.C04.D05	17.03.2021	17.03.2021	07.04.2021 Menguatkan				

48	Perbuatan Melawan Hukum 48/PDT/2021/PT.BTN 505/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	C30.C29.C28.D09	18.03.2021	19.03.2021	06.04.2021 Menguatkan				
49	49/PDT/2021/PT.BTN 998/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	B.C23.C29.D03	18.03.2021	19.03.2021	08.04.2021 Menguatkan				
50	50/PDT/2021/PT.BTN 35/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C13.C11.C27.D08	18.03.2021	19.03.2021	13.04.2021 Memperbaiki				
51	51/PDT/2021/PT.BTN 4/Pdt.G/2020/PN Rkb Perbuatan Melawan Hukum	C01.C23.C17.D02	22.03.2021	22.03.2021	27.04.2021 Menguatkan				
52	52/PDT/2021/PT.BTN 130/Pdt.G/2019/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	A.C24.C30.D10	22.03.2021	22.03.2021	16.04.2021 Menguatkan				
53	53/PDT/2021/PT.BTN 734/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C24.C10.D04	22.03.2021	22.03.2021	15.04.2021 Menguatkan				
54	54/PDT/2021/PT.BTN 402/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C21.C18.C22.D14	22.03.2021	22.03.2021	22.04.2021 Menguatkan				
55	55/PDT/2021/PT.BTN 992/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C04.C16.C20.D04	23.03.2021	23.03.2021	22.04.2021 Menguatkan				
56	56/PDT/2021/PT.BTN 1000/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C28.C29.C30.D13	23.03.2021	23.03.2021	28.04.2021 Menguatkan				
57	57/PDT/2021/PT.BTN 1203/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	B.C129.C04.D09	23.03.2021	23.03.2021	19.04.2021 Menguatkan				
58	58/PDT/2021/PT.BTN 892/Pdt.G/2019/PN Tng 892/Pdt.G/2019/PN Tng	C27.C11.C13.D08	23.03.2021	23.03.2021	13.04.2021 Menguatkan				
59	59/PDT/2021/PT.BTN 370/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C23.C01.C17.D15	29.03.2021	29.03.2021	27.04.2021 Menguatkan				
60	60/PDT/2021/PT.BTN 111/Pdt.G/2019/PN Srg Objek Sengketa Tanah	A.C18.C21.D06	29.03.2021	29.03.2021	21.04.2021 Membatalkan				
61	61/PDT/2021/PT.BTN 77/Pdt.G/2020/PN Rkb Perbuatan Melawan Hukum	C04.C16.C20.D12	29.03.2021	29.03.2021	27.04.2021 Menguatkan				
62	62/PDT/2021/PT.BTN 726/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C15.C24.D06	29.03.2021	29.03.2021	27.04.2021 Memperbaiki				
63	63/PDT/2021/PT.BTN 118/Pdt.G/2020/PN Srg Wanprestasi	C21.C18.C22.D05	01.04.2021	01.04.2021	29.04.2021 Membatalkan				
64	64/PDT/2021/PT.BTN 40/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C29.C28.C30.D15	01.04.2021	01.04.2021	29.04.2021 Menguatkan				
65	65/PDT/2021/PT.BTN 211/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18.C21.C23.D16	07.04.2021	07.04.2021	03.05.2021 Menguatkan				
66	66/PDT/2021/PT.BTN 2079/Pdt.G/2019/PN Tng	B.C16.C11.D03	07.04.2021	07.04.2021	05.05.2021 Memperbaiki				

67	Wanprestasi 67/PDT/2021/PT BTN 576/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C27.C11.C13.D17	15.04.2021	15.04.2021	10.05.2021 Menguatkan				
68	68/PDT/2021/PT BTN 1035/Pdt.G/2018/PN Tng Wanprestasi	C01.C23.C17.D13	15.04.2021	15.04.2021	06.05.2021 Memperbaiki				
69	69/PDT/2021/PT BTN 1031/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C24.C10.D04	15.04.2021	15.04.2021	05.05.2021 Membatalkan				
70	70/PDT/2021/PT BTN 614/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C20.C16.C04.D18	15.04.2021	15.04.2021	10.05.2021 Menguatkan				
71	71/PDT/2021/PT BTN 842/Pdt.G/2019/PN Tng Wanprestasi	C29.C28.C30.D08	15.04.2021	15.04.2021	10.05.2021 Membatalkan				
72	72/PDT/2021/PT BTN 769/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	B.C29.C23.D06	15.04.2021	15.04.2021	10.05.2021 Menguatkan				
73	73/PDT/2021/PT BTN 884/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	A.C11.C13.D11	16.04.2021	16.04.2021	03.05.2021 Membatalkan				
74	74/PDT/2021/PT BTN 785/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C22.C18.C21.D12	20.04.2021	20.04.2021	17.05.2021 Menguatkan				
75	75/PDT/2021/PT BTN 19/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C11.C27.C13.D17	20.04.2021	20.04.2021	10.05.2021 Menguatkan				
76	76/PDT/2021/PT BTN 466/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17.C01.C23.D02	20.04.2021	20.04.2021	24.05.2021 Memperbaiki				
77	77/PDT/2021/PT BTN 223/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C24.C15.C10.D09	20.04.2021	20.04.2021	11.05.2021 Menguatkan				
78	78/PDT/2021/PT BTN 640/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	C04.C16.C20.D14	20.04.2021	20.04.2021	05.05.2021 Menguatkan				
79	79/PDT/2021/PT BTN 686/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C30.C29.C28.D13	22.04.2021	22.04.2021	10.05.2021 Menguatkan				
80	80/PDT/2021/PT BTN 1172/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C21.C18.C22.D06	22.04.2021	22.04.2021	11.06.2021 (Dibatalkan)				
81	81/PDT/2021/PT BTN 494/Pdt.G/2019/PN Tng Lain-Lain	B.C30.C04.D04	22.04.2021	22.04.2021	17.05.2021 Menguatkan				
82	82/PDT/2021/PT BTN 132/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C27.C11.C23.D08	03.05.2021	03.05.2021	21.05.2021 Menguatkan				
83	83/PDT/2021/PT BTN 26/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C17.C01.C25.D18	03.05.2021	03.05.2021	08.06.2021 (Menguatkan)				
84	84/PDT/2021/PT BTN 405/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C15.C24.D03	19.05.2021	19.05.2021	16.06.2021 (Menguatkan)				
85	85/PDT/2021/PT BTN 404/Pdt.G/2020/PN Tng	C23.C01.C17.D08	19.05.2021	19.05.2021	08.06.2021 (Menguatkan)				

86	Perbuatan Melawan Hukum 86/PDT/2021/PT BTN 392/Pdt.G/2020/PN Tng	C18.C21.C22.D05	19.05.2021	19.05.2021	22.07.2021 Menguatkan
87	Perbuatan Melawan Hukum 87/PDT/2021/PT BTN 85/Pdt.G/2020/PN Srg	C16.C20.C04.D09	19.05.2021	19.05.2021	16.06.2021 (Dibatalkan)
88	Perbuatan Melawan Hukum 88/PDT/2021/PT BTN 139/Pdt.G/2020/PN Srg Wanprestasi	C28.C29.C30.D04	19.05.2021	19.05.2021	16.06.2021 (Menguatkan)
89	Perbuatan Melawan Hukum 89/PDT/2021/PT BTN 48/Pdt.G/2020/PN Tng	C15.C10.C26.D06	19.05.2021	19.05.2021	16.06.2021 (Menguatkan)
90	Perbuatan Melawan Hukum 90/PDT/2021/PT BTN 212/Pdt.G/2020/PN Tng	C26.C15.C10.D10	24.05.2021	24.05.2021	05.07.2021 Menguatkan
91	Perbuatan Melawan Hukum 91/PDT/2021/PT BTN 14/Pdt.G/2020/PN Tng	C30.C28.C29.D12	24.05.2021	24.05.2021	15.06.2021 (Dibatalkan)
92	Perbuatan Melawan Hukum 92/PDT/2021/PT BTN 52/Pdt.G/2018/PN Srg	C01.C23.C17.D14	24.05.2021	24.05.2021	29.06.2021 (Menguatkan)
93	Perbuatan Melawan Hukum 93/PDT/2021/PT BTN 60/Pdt.G/2020/PN Srg	C22.C18.C21.D13	24.05.2021	24.05.2021	24.06.2021 (Menguatkan)
94	Perbuatan Melawan Hukum 94/PDT/2021/PT BTN 56/Pdt.Phw/2019/PN Srg Objek Sengketa Tanah	C20.C16.C04.D16	24.05.2021	24.05.2021	02.07.2021 Menguatkan
95	Perbuatan Melawan Hukum 95/PDT/2021/PT BTN 420/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	B.C24.CC29.D08	24.05.2021	24.05.2021	28.06.2021 (Menguatkan)
96	Perbuatan Melawan Hukum 96/PDT/2021/PT BTN 20/Pdt.G/2020/PN Pdl	C15.C10.C24.D17	24.05.2021	24.05.2021	05.07.2021 Menguatkan
97	Perbuatan Melawan Hukum 97/PDT/2021/PT BTN 83/Pdt.G/2020/PN Srg	C13.C1.C6.D16	03.06.2021	03.06.2021	29.06.2021 (Menguatkan)
98	Perbuatan Melawan Hukum 98/PDT/2021/PT BTN 776/Pdt.G/2019/PN Tng	C17.CC16.C18.D17	03.06.2021	03.06.2021	22.06.2021 (Dibatalkan)
99	Perbuatan Melawan Hukum 99/PDT/2021/PT BTN 1095/Pdt.G/2019/PN Tng	C9.C7.CC15.D15	03.06.2021	03.06.2021	01.07.2021 Menguatkan
100	Perbuatan Melawan Hukum 100/PDT/2021/PT BTN 36/Pdt.G/2020/PN Tng	C12.C4.C3.D12	03.06.2021	03.06.2021	05.07.2021 Diperbaiki
101	Perbuatan Melawan Hukum 101/PDT/2021/PT BTN 103/Pdt.G/2020/PN Srg	C2.C5.C8.D14	03.06.2021	03.06.2021	03.08.2021 Menguatkan
102	Perbuatan Melawan Hukum 102/PDT/2021/PT BTN 440/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	C18.C17.C16.D6	07.06.2021	07.06.2021	22.07.2021 Menguatkan
103	Perbuatan Melawan Hukum 103/PDT/2021/PT BTN 264/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C5.C8.C7.D13	07.06.2021	07.06.2021	09.08.2021 Menguatkan
104	Perbuatan Melawan Hukum 104/PDT/2021/PT BTN	C9.C7.C15.D8	07.06.2021	07.06.2021	01.07.2021

	141/Pdt.G/2020/PN.Tng Tanah				Menguatkan				
143	143/PDT/2021/PT BTN 951/Pdt.G/2020/PN.Tng Perceraian	B.C12.C3.D9	13.08.2021	13.08.2021	09.09.2021 Menguatkan				
144	144/PDT/2021/PT BTN 690/Pdt.G/2020/PN.Tng Perceraian	C7.C9.C16.D16	13.08.2021	13.08.2021	09.09.2021 Menguatkan				
145	145/PDT/2021/PT BTN 828/Pdt.G/2020/PN.Tng Wanprestasi	C12.C4.C3.D18	13.08.2021	13.08.2021	20.09.2021 Menguatkan				
146	146/PDT/2021/PT BTN 1041/Pdt.G/2020/PN.Tng Perceraian	C15.C5.C8.D1	13.08.2021	13.08.2021	29.09.2021 Dibatalkan				
147	147/PDT/2021/PT BTN 878/Pdt.G//2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C2.C18.D8	13.08.2021	13.08.2021	01.09.2021 Diperbaiki				
148	148/PDT/2021/PT BTN 409/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9.C7.C14.D12	19.08.2021	19.08.2021	16.09.2021 Menguatkan				
149	149/PDT/2021/PT BTN 1157/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C9.C7.D12	19.08.2021	19.08.2021	16.09.2021 Menguatkan				
150	150/PDT/2021/PT BTN 1216/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C4.C12.D20	19.08.2021	19.08.2021	21.09.2021 Menguatkan				
151	151/PDT/2021/PT BTN 207/Pdt.G/2020/PN.Tng Wanprestasi	C6.C1.C11.D1	19.08.2021	19.08.2021	07.09.2021 Menguatkan				
152	152/PDT/2021/PT BTN 24/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C8.C15.D19	19.08.2021	19.08.2021	04.10.2021 (Dikurikan)				
153	153/PDT/2021/PT BTN 143/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16.C10.C2.D20	19.08.2021	19.08.2021	06.09.2021 Menguatkan				
154	154/PDT/2021/PT BTN 467/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13.C17.C18.D21	19.08.2021	19.08.2021	09.09.2021 Menguatkan				
155	155/PDT/2021/PT BTN 1/Pdt.G/2020/PN.Srg Perbuatan Melawan Hukum	C6.C1.C11.D21	24.08.2021	24.08.2021	16.09.2021 Menguatkan				
156	156/PDT/2021/PT BTN 239/Pdt.Bih/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C10.C16.D4	24.08.2021	24.08.2021	01.09.2021 Menguatkan				
157	157/PDT/2021/PT BTN 920/Pdt.G/2020/PN.Tng Harta Bersama	C4.C12.C3.D19	24.08.2021	24.08.2021	21.09.2021 Dibatalkan				
158	158/PDT/2021/PT BTN 865/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C8.C5.C15.D3	24.08.2021	24.08.2021	29.09.2021 Menguatkan				
159	159/PDT/2021/PT BTN 804/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C1.C11.C6.D17	24.08.2021	24.08.2021	16.09.2021 Diperbaiki				
160	160/PDT/2021/PT BTN 1077/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18.C13.C17.D20	24.08.2021	24.08.2021	22.09.2021 Menguatkan				
161	161/PDT/2021/PT BTN	C7.C9.C14.D18	24.08.2021	24.08.2021	16.09.2021				

	G77/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum				Menguatkan			
162	162/PDT/2021/PT BTN 115/Pdt.G/2020/PN.Srg Perbuatan Melawan Hukum	C5.C8.C15.D14	25.08.2021	25.08.2021	29.09.2021 Menguatkan			
163	163/PDT/2021/PT BTN 296/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4.C12.C3.D12	25.08.2021	25.08.2021	29.09.2021 Menguatkan			
164	164/PDT/2021/PT BTN 2401/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C2.C16.D13	25.08.2021	25.08.2021	16.09.2021 Menguatkan			
165	165/PDT/2021/PT BTN 78/Pdt.G/2020/PN.Tng Hak Asuh Anak	C17.C13.C18.D15	25.08.2021	25.08.2021	27.09.2021 Menguatkan			
166	166/PDT/2021/PT BTN 38/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9.C14.C7.D16	25.08.2021	25.08.2021	16.09.2021 Menguatkan			
167	167/PDT/2021/PT BTN 1135/Pdt.G/2020/PN.Tng Wanprestasi	C11.C6.C1.D6	25.08.2021	25.08.2021	08.09.2021 Menguatkan			
168	168/PDT/2021/PT BTN 53/Pdt.G/2020/PN.Tng Wanprestasi	C13.C17.C18.D7	30.08.2021	30.08.2021	22.09.2021 Menguatkan			
169	169/PDT/2021/PT BTN 945/Pdt.G/2020/PN.Tng Wanprestasi	C5.C8.C15.D8	30.08.2021	30.08.2021	29.09.2021 Menguatkan			
170	170/PDT/2021/PT BTN 488/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C7.C9.D10	30.08.2021	30.08.2021	15.09.2021 Menguatkan			
171	171/PDT/2021/PT BTN 865/Pdt.G/2017/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C1.C6.C11.D19	02.09.2021	02.09.2021	23.09.2021 Dibatalkan		Ketua :	A
172	172/PDT/2021/PT BTN 116/Pdt.G/2017/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C20.C15.D20	02.09.2021	02.09.2021	30.09.2021 Menguatkan		H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH	
173	173/PDT/2021/PT BTN 988/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C7.C16.C9.D17	02.09.2021	02.09.2021	30.09.2021 Menguatkan		Wakil Ketua :	B
174	174/PDT/2021/PT BTN 230/Pdt.G/2017/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18.C10.C2.D18	02.09.2021	02.09.2021	06.10.2021 (Dikuatkan)		H. SUDIYATNO, SH., MH	C
175	175/PDT/2021/PT BTN 66/Pdt.G/2018/PN.Srg Perbuatan Melawan Hukum	C12.C4.C3.D21	02.09.2021	02.09.2021	29.09.2021 Menguatkan		1 MASRUDDIN CANIAGO, S.H., MH	
176	176/PDT/2021/PT BTN 1205/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C8.C5.C17.D16	06.09.2021	06.09.2021	12.10.2021 (Dikuatkan)		2 HASIAMAH DISTIYAWATI, SH., MH	
177	177/PDT/2021/PT BTN 338/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C20.C19.C15.D15	06.09.2021	06.09.2021	29.09.2021 Menguatkan		3 BUDI HAPSARI, SH., MH	
178	178/PDT/2021/PT BTN 259/Pdt.G/2020/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13.C17.C18.D14	06.09.2021	06.09.2021	23.09.2021 Menguatkan		4 SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH., MH	
179	179/PDT/2021/PT BTN 716/Pdt.G/2019/PN.Tng Perbuatan Melawan Hukum	C2.C10.C16.D13	05.09.2021	09.09.2021	29.09.2021 Diperbaiki		5 SOLAHUDDIN, SH., MH	
180	180/PDT/2021/PT BTN	C17.C5.C8.D6	09.09.2021	09.09.2021	12.10.2021		6 DR. BINSAR GULTOM, SH., SE., MH	
							7 KUSRIYANTO, SH., MHum	
							8 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH., MHum	
							9 POSMAN BAKARA, SH., MH	
							10 ENNID HASANUDDIN, SH., CN., MH	
							11 AGUNG SURADI, SH	
							12 ERRY MUSTIANTO, SH	
							13 AGUNG SURADI, SH	
							14 ERRY MUSTIANTO, SH	
							15 M. TUCHFATUL ANAM, SH., MH	
							16 IMANUEL SEMBIRING, SH	
							17 RANLI DARASAH, SH., MHum	
							18 SOFYANSYAH, SH., MH	
							19 LAURENSIUS SIBARANI, SH., MH	
							20 EFFENDI PASARIBU, SH., MH	
							Palitera :	

	953/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum				(Dikuatkan)				YUNDA HASBI, SH., MH
181	181/PDT/2021/PT BTN 586/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C6.C1.C11.D1	10.09.2021	10.09.2021	30.09.2021 Menguatkan				1 H. SUNYANTA, SH 2 AIF SAIFUDAULLAH, SH, MH 3 WILAN WITARSHI, SH 4 SITI SUSILAWATI, SH 5 ITAIDA LAMTIUR P, SH 6 YANTO BUDIANTO, SH 7 IDRIS AWALUDDIN, SH, MH 8 SUTISNA, SH 9 CHRISTANTO PUDIJONO, SH., MH 10 POEDJI RAHARDJO, SH 11 TRI WIDODO, SH., MH 12 BASRIDA MURNI, SH 13 NURFUAD, SH 14 NURMAINAH, SH 15 ENAR SUNARYA, SH 16 FERI ARDIANSYA, SH, MH 17 AHMAD BAEDOWI, SH 18 YANI SOFYAN, SH 19 YANI IRAWATI, SH 20 MEFTA YULIANA, SH 21 RYAN ABURISMAN, SH
182	182/PDT/2021/PT BTN 1004/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4.C3.C12.D8	10.09.2021	10.09.2021	06.10.2021 (Dikuatkan)				
183	183/PDT/2021/PT BTN 70/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9. C7.C16.D7	10.09.2021	10.09.2021	05.10.2021 (Dibatalkan)				
184	184/PDT/2021/PT BTN 401/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C5.C8.D5	14.09.2021	14.09.2021	21.10.2021 (Dikuatkan)				
185	185/PDT/2021/PT BTN 1043/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9. C7.C16.D3	14.09.2021	14.09.2021	07.10.2021 (Dikuatkan)				
186	186/PDT/2021/PT BTN 381/Pdt.PLW/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C15.C20.D12	14.09.2021	14.09.2021	14.10.2021 (Dikuatkan)				
187	187/PDT/2021/PT BTN 536/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C2.C16.D13	14.09.2021	14.09.2021	18.10.2021 (Dikuatkan)				
188	187a/PDT/2021/PT BTN 310/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	B.C14.B3.D11	14.09.2021	14.09.2021	13.10.2021 (Dikuatkan)				
189	188/PDT/2021/PT BTN 974/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C5.C8.C17.C20	16.09.2021	16.09.2021	14.10.2021 (Dikuatkan)				
190	189/PDT/2021/PT BTN 172/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C19.C15.C20.D11	16.09.2021	16.09.2021	13.10.2021 (Dikuatkan)				
191	190/PDT/2021/PT BTN 261/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C12.C4.C3.D6	21.09.2021	21.09.2021	18.10.2021 (Dikuatkan)				
192	191/PDT/2021/PT BTN 156/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13.C17.C18.D14	21.09.2021	21.09.2021	07.10.2021 (Dikuatkan)				
193	192/PDT/2021/PT BTN 710/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C15.C20.D17	21.09.2021	21.09.2021	21.10.2021 (Dikuatkan)				
194	193/PDT/2021/PT BTN 132/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C8.C5.C17.D13	21.09.2021	21.09.2021	19.10.2021 (Dikuatkan)				
195	194/PDT/2021/PT BTN 968/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C7.C9.C16.D15	21.09.2021	21.09.2021	19.10.2021 (Dibatalkan)				
196	195/PDT/2021/PT BTN 156/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C6.C1.C11.D4	24.09.2021	24.09.2021	26.10.2021 (Dikuatkan)				
197	196/PDT/2021/PT BTN 61/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C19.C20.D5	24.09.2021	24.09.2021	21.10.2021 (Dibatalkan)				
198	197/PDT/2021/PT BTN 575/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C16.C9.C7.D7	24.09.2021	24.09.2021	21.10.2021 (Dibatalkan)				
199	198/PDT/2021/PT BTN	C4.C12.C3.D3	24.09.2021	24.09.2021	19.10.2021				

	536/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum				(Dikuatkan)				
200	199/PDT/2021/PT BTN 325/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C17.C5.C8.D8	24.09.2021	24.09.2021	12.10.2021 (Dikuatkan)				
201	200/PDT/2021/PT BTN 904/Pdt.G/2018/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C30.C18.C2.D12	28.09.2021	28.09.2021	04.11.2021 (Diperbaiki)				
202	201/PDT/2021/PT BTN 410/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C1.C11.C6.D18	06.10.2021	06.10.2021	28.10.2021 (Dikuatkan)				
203	202/PDT/2021/PT BTN 60/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C20.C19.C15.D16	06.10.2021	06.10.2021	27.10.2021 (Dikuatkan)				
204	203/PDT/2021/PT BTN 1066/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9.C7.C16.D21	08.10.2021	08.10.2021	02.11.2021 (Dikuatkan)				
205	204/PDT/2021/PT BTN 1100/Pdt.G/2020/PN Tng Perceraian	C2.C18.C10.D19	08.10.2021	08.10.2021	03.11.2021 (Diperbaiki)				
206	205/PDT/2021/PT BTN 1117/Pdt.G/2019/PN Tng Objek Sengketa Tanah	C1.C14.C3.D3	08.10.2021	08.10.2021	03.11.2021 (Dikuatkan)				
207	206/PDT/2021/PT BTN 991/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C5.C8.C17.D14	08.10.2021	08.10.2021	02.11.2021 (Dikuatkan)				
208	207/PDT/2021/PT BTN 599/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C11.C1.C6.D13	11.10.2021	11.10.2021	28.10.2021 (Dikuatkan)				
209	208/PDT/2021/PT BTN 54/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C15.C20.D7	11.10.2021	11.10.2021	27.10.2021 (Diperbaiki)				
210	209/PDT/2021/PT BTN 783/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C7.C9.C16.D11	11.10.2021	11.10.2021	03.11.2021 (Dikuatkan)				
211	210/PDT/2021/PT BTN 16/Pdt.G/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C18.C10.CC2.D6	11.10.2021	11.10.2021	16.11.2021 (Dikuatkan)				
212	211/PDT/2021/PT BTN 241/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C12.C4.C3.D5	11.10.2021	11.10.2021	03.11.2021 (Dikuatkan)				
213	212/PDT/2021/PT BTN 1122/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C16.C7.C9.D8	15.10.2021	15.10.2021	09.11.2021 (Dibatalkan)				
214	213/PDT/2021/PT BTN 789/Pdt.G/2020/PN Tng Lain-Lain	C17.C8.C5.D17	15.10.2021	15.10.2021	03.11.2021 (Dibatalkan)				
215	214/PDT/2021/PT BTN 49/Pdt.G/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C6.C1.C11.D17	21.10.2021	21.10.2021	11.11.2021 (Dikuatkan)				
216	215/PDT/2021/PT BTN 363/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C15.C19.C20.D21	21.10.2021	21.10.2021	11.11.2021 (Dikuatkan)				
217	216/PDT/2021/PT BTN 177/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9.C7.C16.D9	25.10.2021	25.10.2021	18.11.2021 (Dikuatkan)				
218	217/PDT/2021/PT BTN	C3.C4.C12.D19	25.10.2021	25.10.2021	16.11.2021				

	395/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum				(Dikuatkan)				
219	218/PDT/2021/PT BTN 146/Pdt.G/2020/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C10.C18.C2.D12	26.10.2021	26.10.2021	18.11.2021 (Dikuatkan)				
220	219/PDT/2021/PT BTN 9/Pdt.G/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C8.C5.C17.D15	26.10.2021	26.10.2021	15.11.2021 (Dikuatkan)				
221	220/PDT/2021/PT BTN 604/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C1.C11.D20	01.11.2021	01.11.2021	23.11.2021 (Dikuatkan)				Ketua : H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH
222	221/PDT/2021/PT BTN 537/Pdt.Pw/2018/PH Tng Objek Sengketa Tanah	C2.C6.C18.D4	01.11.2021	01.11.2021	16.11.2021 (Dikuatkan)				Wakil Ketua : H. SUDIYATNO, SH.,MH
223	222/PDT/2021/PT BTN 79/Pdt.G/2021/PN Tng Wangprestasi	C20.C7.C9.D14	02.11.2021	02.11.2021	23.11.2021 (Dibatalkan)				1 MASRUDDIN CANIAGO, S.H., MH 2 AGUNG SURADI, SH 3 DR. SITI SURYATI, SH.,MH.,MM 4 LAURENSIUS SIRARANI, SH.,MH 5 M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH 6 EFFENDI PASARIBU, SH.,MH 7 KUSRIYANTO, SH.,MHum 8 POSMAN BAKARA, SH.,MH 9 SUPRIYONO, SH.,MHum 10 SOFYANSYAH, SH.,MH 11 ENNO HASANUDDIN, SH.,CN.,MH 12 RAMLI DARASAH, SH.,MHum 13 SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH 14 ERY MUSTIANTO, SH 15 BUDI HAPSARI, SH.,MH 16 SOLAHUDDIN, SH.,MH 17 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,MHum 18 IMANUEL SEMBIRING, SH 19 HASAMAR DISTIYAWATI, SH.,MH 20 DR. BINSAR GULTOM, SH.,SE.,MH 21 EFFENDI PASARIBU, SH.,MH
224	223/PDT/2021/PT BTN 231/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C20.C17.C13.D18	02.11.2021	02.11.2021	17.11.2021 (Dikuatkan)				
225	224/PDT/2021/PT BTN 982/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4.C12.C3.D6	02.11.2021	02.11.2021	24.11.2021 (Dikuatkan)				
226	225/PDT/2021/PT BTN 401/Pdt.G/2021/PN Tng Perceraian	C5.C8.C14.D12	03.11.2021	03.11.2021	16.11.2021 (Dibatalkan)				
227	226/PDT/2021/PT BTN 147/Pdt.G/2020/PN Srg Wangprestasi	C19.C18.C20.D14	08.11.2021	08.11.2021	25.11.2021 (Dikuatkan)				
228	227/PDT/2021/PT BTN 737/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C11.C6.C9.D12	08.11.2021	08.11.2021	07.12.2021 (Dikuatkan)				
229	228/PDT/2021/PT BTN 178/Pdt.G/2021/PN Tng Perceraian	C1.C10.C19.D16	11.11.2021	11.11.2021	01.12.2021 (Diperbaiki)				
230	229/PDT/2021/PT BTN 272/Pdt.G/2021/PN Tng Perceraian	C12.C16.C18.D10	11.11.2021	11.11.2021	07.12.2021 (Dikuatkan)				Panitera : YUNDA HASBI, SH.,MH
231	230/PDT/2021/PT BTN 20/Pdt.G/2021/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C3.C8.C17.D7	11.11.2021	11.11.2021	01.12.2021 (Diperbaiki)				1 POEDJI RAHARDJO, SH 2 H. SUNIYANTA, SH 3 CHRISTANTO PUDJONO, SH., MH 4 TRI WIDODO, SH.,MH 5 ITAIDA LAMTIUR P, SH 6 YANTO BUDIANTO, SH 7 IDRIS AWALUDDIN, SH.,MH 8 SUTISNA, SH 9 WILAN WITARSIH, SH 10 SITI SUSILAWATI, SH 11 BASRIDA MURNI, SH 12 NURFUAD, SH 13 NURMAINAH, SH 14 ENAR SUNARYA, SH 15 FERI ARDIANSYA, SH.,MH 16 AHMAD BAEDOWI, SH 17 YANI SOPYAN, SH 18 YANI IRRAWATI, SH 19 MEITA YULIANA, SH
232	231/PDT/2021/PT BTN 925/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C4.C5.C6.D6	15.11.2021	15.11.2021	30.11.2021 (Dikuatkan)				
233	232/PDT/2021/PT BTN 348/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C7.C12.D4	15.11.2021	15.11.2021	15.12.2021 (Putusan Sela)				
234	233/PDT/2021/PT BTN - ecourt 13/Pdt.G/2021/PN Pdt Perbuatan Melawan Hukum	C20.C5.C15.D12	16.11.2021	16.11.2021	07.12.2021 (Diperbaiki)				
235	234/PDT/2021/PT BTN 542/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C10.C13.C12.D18	17.11.2021	17.11.2021	01.12.2021 (Diperbaiki)				
236	235/PDT/2021/PT BTN 807/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C9.C6.C11.D6	17.11.2021	17.11.2021	07.12.2021 (Menkuatkan)				
237	236/PDT/2021/PT BTN	C8.C3.C17.D6	17.11.2021	17.11.2021	14.12.2021				

	950/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum				(Menguatkan)			20. RYAN ABURISMAN, SH 21. TURASIH, SH 22. KOSASIH, SH
238	237/PDT/2021/PT BTN 602/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C18.C16.C13.D4	17.11.2021	17.11.2021	07.12.2021 (Menguatkan)			
239	238/PDT/2021/PT BTN 48/Pdt.G/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C4.C2.C13.D20	17.11.2021	17.11.2021	07.12.2021 (Dikuatkan)			
240	239/PDT/2021/PT BTN 8/Pdt.G/2021/PN Pdt Perbuatan Melawan Hukum	C15.C5.C20.D11	22.11.2021	22.11.2021	14.12.2021 (Dibatalkan)			
241	240/PDT/2021/PT BTN 178/Pdt.G/2020/PN Srg Gugatan Perwakilan (Class Action)	C17.C3.C8.D17	24.11.2021	24.11.2021	21.12.2021 (Menguatkan)			
242	240a/PDT/2021/PT BTN 330/Pdt.G/2020/PN Srg Perceraian	C12.C7.C14.D20	24.11.2021	24.11.2021	08.12.2021 (Dikuatkan)			
243	241/PDT/2021/PT BTN 577/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C19.C1.C10.D20	14.12.2021	14.12.2021		241/PDT/2021/PT BTN	Ketua : H. CHARIS MARDIYANTO, SH., MH	A
244	242/PDT/2021/PT BTN 13/Pdt.G/2021/PN Rkb Perbuatan Melawan Hukum	C13.C16.C18.D14	14.12.2021	14.12.2021	29.12.2021 (Menguatkan)		Wakil Ketua : H. SUROYATNO, SH.,MH	B
245	243/PDT/2021/PT BTN 31/Pdt.G/2021/PN Srg Wanprestasi	C5.C20.C15.D13	16.12.2021	16.12.2021	29.12.2021 (Menguatkan)		1 MASRUDDIN CANIAGO, S.H., MH 2 LAURENSIUS SIBARANI, SH.,MH 3 KUSRIYANTO, SH.,MHum	C
246	244/PDT/2021/PT BTN 98/Pdt.G/2020/PN Srg Objek Sengketa Bukan Tanah	C6.C11.C9.D15	16.12.2021	16.12.2021		244/PDT/2021/PT BTN	4 M. TUCHFATUL ANAM, SH.,MH 5 SOFYANSYAH, SH.,MH 6 SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH.,MH 7 SOLAHUDDIN, SH.,MH 8 POSMAN BAKARA, SH.,MH 9 BUDI HAPSARI, SH.,MH	
247	245/PDT/2021/PT BTN 32/Pdt.Btk/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C2.C4.C13.D5	16.12.2021	16.12.2021	29.12.2021 (Menguatkan)		10 AGUNG SURADI, SH 11 ERRY MUSTIANTO, SH 12 IWANUEL SEMBIRING, SH	
248	246/PDT/2021/PT BTN eCourt 12/Pdt.G/2021/PN Pdt Perbuatan Melawan Hukum	C3.C8.C17.D22	21.12.2021	21.12.2021		246/PDT/2021/PT BTN	13 EFFENDI PASARIBU, SH.,MH 14 VICTOR SELAMAT ZAGOTO, SH.,MHum 15 RAMLI DARASAH, SH.,MHum	
249	247/PDT/2021/PT BTN 650/Pdt.G/2020/PN Tng Wanprestasi	C16.C18.C13.D12	21.12.2021	21.12.2021		247/PDT/2021/PT BTN	16. HASANAH DISTIYAWATI, SH.,MH 17 SUPRIYONO, SH.,MHum 18 DR. BINSAR GULTOM, SH.,SE.,MH	
250	248/PDT/2021/PT BTN 1042/Pdt.G/2019/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C7.C14.C12.D21	21.12.2021	21.12.2021		248/PDT/2021/PT BTN	19 DR. SITI SURYATI, SH.,MH.,MH 20 ENNID HASANUDDIN, SH.,CN.,MH	
251	249/PDT/2021/PT BTN 1141/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C1.C10.C19.D9	21.12.2021	21.12.2021		249/PDT/2021/PT BTN		
252	250/PDT/2021/PT BTN 23/Pdt.G/2021/PN Srg Perbuatan Melawan Hukum	C11.C6.C9.D18	21.12.2021	21.12.2021		250/PDT/2021/PT BTN	Panitera : YUNDA HASBI, SH.,MH 1 POEDJI RAHARDJO, SH 2 H. SUNIYANTA, SH 3 CHRISTANTO PUJIONO, SH., MH	
253	251/PDT/2021/PT BTN 36/Pdt.G/2021/PN Srg	C15.C5.C20.D10	23.12.2021	23.12.2021	30.12.2021 (Menguatkan)			

	Perbuatan Melawan Hukum							4	TRI WIDODO, SH, MH	
254	252/PDT/2021/PT BTN 613/Pdt.Bih/2020/PN Tng Lain - lain	C14.C7.C12.D29	23.12.2021	23.12.2021		252/PDT/2021 1/PT BTN		5	ITAIDA LAMTIUR P, SH	
								6	YANTO BUDIANTO, SH	
								7	IDRIS AWALUDDIN, SH, MH	
255	253/PDT/2021/PT BTN 77/Pdt.Piw/2021/PN Srg Lain - lain	C18.C16.C13.D17	23.12.2021	23.12.2021		253/PDT/2021 1/PT BTN		8	SUTISNA, SH	
								9	WILAN WITARSIH, SH	
								10	SITI SUSILAWATI, SH	
256	254/PDT/2021/PT BTN 95/Pdt.G/2021/PN Tng Wanprestasi	C8.C3.C17.D16	27.12.2021	27.12.2021		254/PDT/2021 1/PT BTN		11	BASRIDA MURNI, SH	
								12	NURFUAD, SH	
								13	NURMAINAH, SH	
257	255/PDT/2021/PT BTN 373/Pdt.G/2015/PN Tng Wanprestasi	C9.C6.C11.D11	27.12.2021	27.12.2021		255/PDT/2021 1/PT BTN		14	ENAR SUNARYA, SH	
								15	FERI ARDIANSYA, SH, MH	
								16	AHMAD BAEDOWI, SH	
258	256/PDT/2021/PT BTN 562/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C13.C2.C4.D7	27.12.2021	27.12.2021		256/PDT/2021 1/PT BTN		17	YANI SOPYAN, SH	
								18	YANI IRAWATI, SH	
								19	MEITA YULIANA, SH	
259	257/PDT/2021/PT BTN 459/Pdt.G/2020/PN Tng Perbuatan Melawan Hukum	C14.C7.C12.D6	27.12.2021	27.12.2021		257/PDT/2021 1/PT BTN		20	RYAN ABURISMAN, SH	
								21	TURASIH, SH	
								22	KOSASIH, SH	
								1	Sisa Bulan Lalu	14
								2	Masuk Bulan Ini	17
								3	Putus	18
								4	Cabut Banding	0
								5	Sisa Akhir	13
								a.	Sudah dibagi	0
								b.	Belum dibagi	0
								6	Sisa Belum Diminutasi	0

Mengotahui,
PANITERA SAJUDA PERDATA


PREDR RAHARDJO, SH

Serang, 31 Desember 2021
PETUGAS PEMBAWA LAPORAN


TUTI ALAYIAH, SE

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA

BULAN : JANUARI-DESEMBER TAHUN : 2021

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIMI MAJELIS	TANGGAL			SIKA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PEKERMAAN	PEKERMAAN HAKIMI MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	140/PID/2020/PT.BTN	B. C11. C13. D13	08.12.2020	08.12.2020	11.01.2021				
2	142/PID.SUS/2020/PT.BTN	C5. C6. C11. D8	10.12.2020	10.12.2020	05.01.2021				
3	145/PID/2020/PT.BTN	C7. C13. C21. D10	10.12.2020	10.12.2020	05.01.2021				
4	147/PID/2020/PT.BTN	C7. C13. C21. D6	10.12.2020	10.12.2020	05.01.2021				
5	1/PID/2021/PT.BTN	C11. C6. C16. D16	08.01.2021	08.01.2021	27.01.2021				
6	2/PID/2021/PT.BTN	C11. C6. C16. D17	08.01.2021	08.01.2021	27.01.2021				
7	3/PID.SUS/2021/PT.BTN	C8. C1. C10. D5	08.01.2021	08.01.2021	26.01.2021				
8	4/PID.SUS/2021/PT.BTN	C2. C10. C15. D14	08.01.2021	08.01.2021	01.02.2021				
9	5/PID/2021/PT.BTN	C16. C20. C21. D12	08.01.2021	08.01.2021	20.01.2021				
10	6/PID.SUS/2021/PT.BTN	C1. C22. C17. D8	08.01.2021	08.01.2021	27.01.2021				
11	7/PID/2021/PT.BTN	C13. C21. C14. D6	08.01.2021	08.01.2021	25.01.2021				
12	8/PID.SUS/2021/PT.BTN	C21. C16. C20. D10	19.01.2021	19.01.2021	02.02.2021				
13	9/PID/2021/PT.BTN	C21. C14. C13. D7	20.01.2021	20.01.2021	03.02.2021				
14	10/PID/2021/PT.BTN	C6. C1. C10. D2	20.01.2021	20.01.2021	22.02.2021				
15	11/PID/2021/PT.BTN	C20. C16. C21. D16	27.01.2021	28.01.2021	23.02.2021				
16	12/PID.SUS/2021/PT.BTN	C10. C2. C15. D5	27.01.2021	28.01.2021	17.02.2021				
17	13/PID.SUS/2021/PT.BTN	C22. C1. C17. D17	27.01.2021	28.01.2021	18.02.2021				
18	14/PID.SUS/2021/PT.BTN	C2. C3. C6. D10	17.02.2021	22.02.2021	10.03.2021				
19	15/PID/2021/PT.BTN	C9. C8. C14. D7	17.02.2021	22.02.2021	04.03.2021				
20	16/PID.SUS/2021/PT.BTN	C17. C18. C19. D9	17.02.2021	22.02.2021	25.03.2021				
21	17/PID.SUS/2021/PT.BTN	C11. C13. C10. D2	01.03.2021	01.03.2021	17.03.2021				
22	18/PID.SUS/2021/PT.BTN	C3. C2. C6. D17	01.03.2021	01.03.2021	17.03.2021				
23	19/PID/2021/PT.BTN	C4. C16. C5. D14	02.03.2021	02.03.2021	24.03.2021				
24	20/PID.SUS/2021/PT.BTN	C18. C17. C19. D13	03.03.2021	03.03.2021	30.03.2021				
25	21/PID.SUS/2021/PT.BTN	C12. C1. C15. D5	08.03.2021	10.03.2021	29.03.2021				
26	22/PID.SUS/2021/PT.BTN	C19. C17. C18. D16	08.03.2021	10.03.2021	29.03.2021				
27	23/PID.SUS/2021/PT.BTN	C14. C9. C8. D7	09.03.2021	10.03.2021	30.01.2021				
28	24/PID.SUS/2021/PT.BTN	C14. C9. C8. D7	09.03.2021	10.03.2021	30.01.2021				
29	25/PID.SUS/2021/PT.BTN	C14. C9. C8. D7	09.03.2021	10.03.2021	30.01.2021				
30	26/PID.SUS/2021/PT.BTN	C1. C15. C12. D10	15.03.2021	15.03.2021	30.03.2021				
31	27/PID.SUS/2021/PT.BTN	C16. C4. C5. D9	15.03.2021	15.03.2021	29.03.2021				
32	28/PID.SUS/2021/PT.BTN	C6. C2. C3. D17	17.03.2021	18.03.2021	06.04.2021				
33	29/PID.SUS/2021/PT.BTN	C6. C2. C3. D11	17.03.2021	18.03.2021	06.04.2021				
34	30/PID.SUS/2021/PT.BTN	C17. C18. C19. D16	22.03.2021	23.03.2021	19.04.2021				
35	31/PID/2021/PT.BTN	C10. C13. C11. D12	22.03.2021	23.03.2021	07.04.2021				
36	32/PID/2021/PT.BTN	B. C8. C14. D14	22.03.2021	23.03.2021	08.04.2021				
37	33/PID/2021/PT.BTN	C5. C4. 16. D13	22.03.2021	23.03.2021	12.04.2021				
38	34/PID.SUS/2021/PT.BTN	C13. C11. C10. D14	25.03.2021	25.03.2021	08.04.2021				
39	35/PID.SUS/2021/PT.BTN	C15. C1. C12. D15	25.03.2021	25.03.2021	07.04.2021				
40	36/PID.SUS/2021/PT.BTN	B. C2. C3. D12	29.03.2021	29.03.2021	19.04.2021				
41	37/PID.SUS/2021/PT.BTN	C8. C9. C14. D6	29.03.2021	29.03.2021	15.04.2021				
42	38/PID/2021/PT.BTN	C3. C2. C6. D8	12.04.2021	12.04.2021	03.05.2021				
43	39/PID.SUS/2021/PT.BTN	C18. C19. C17. D6	12.04.2021	12.04.2021	05.05.2021				
44	40/PID.SUS/2021/PT.BTN	C4. C16. C5. D7	12.04.2021	12.04.2021	03.05.2021				
45	41/PID.SUS/2021/PT.BTN	C11. C13. C10. D13	22.04.2021	22.04.2021	06.05.2021				
46	42/PID.SUS/2021/PT.BTN	C12. C1. C15. D17	22.04.2021	22.04.2021	08.05.2021				
47	43/PID.SUS/2021/PT.BTN	C5. C4. C16. D10	27.04.2021	27.04.2021	19.05.2021				

Sumber: Media, Buletin, dan Laporan 2021

Nama: RESHATU WISMAWARDYO, S.H (A)

Wk. Karir: SUJAYATNO, S.H, M.H (B)

Isian Angka:

1. NASRULLOH CHAMROD, SH, MH
2. KUSRIYANTO, SH, MH
3. DORTIANA PARDEDE, SH, MH
4. SITI FARIDA MT, SH, MH
5. HARTADI, SH, M.H
6. POSMAN BAKARA, SH, MH
7. H. ERUN HERMANTO, S.H, M.H
8. ALBERT MOMANG BRINGO-RINGO
9. H. FER FARDAMAN, S.H, M.H
10. DR. H. WAHIDIN, SH, M.H
11. ENNO HASANLOON, SH, CN, MH
12. M. CH. SUMTRI ENO, S.H
13. BUDI HARSARI, SH, MH
14. SUBACHRAN NADI W.A.YONO, SH
15. HASAMAH DESTIYAWATI, SH, M.H
16. SOLAHUDDIN, SH, M.H
17. D. BINSAR GALTON S.H, S.E, M.H
18. UMIU JUMA, S.H, M.H
19. H. SAIPYKRIZALDI, S.H, M.H
20. VICTOR SELAMAT ZAGOTO, S.H, M
21. ERNY MUSTANTO, SH, MH
22. AGUNG SURADI, SH, MH
23. M. TUCHFATU, ANIM, S.H, M.H
24. IWANUEL, SEMBRINO, SH, MH
25. RAMI DARASAH, SH, MH
26. SOPHAN SYAH, SH, MH

1. H. SUWYANTA, S.H, M.H

2. AJI SAJUDARILLAH, S.H, M.H

3. POEDJIRAHARJO, SH

4. CHRISTANTO PUDJONO, SH, M

5. WILAN WITARSH, S.H

6. SITI SUSILAWATI, S.H

7. ITA DALAMTORIP, S.H

8. YANTO SUJAYANTO, S.H

9. IORIS ANALLLOON, SH

10. SUTONA, S.H

11. BAIRIDA MURNI, SH

12. TR. WOODO, SH

13. NURFUAD, SH

14. ENAR SUWARYA, SH

15. NURMAHAR, SH

16. FER ARDIANSYA, SH, MH

17. AHMAD BEDOWI, SH

106	100 / PD / 2021 / PT BTN	C6, C7, C12, D18	06.09.2021	06.09.2021	28.09.2021				
107	101 / PD / 2021 / PT BTN	C9, C11, C16, D16	08.09.2021	08.09.2021	29.09.2021				
108	102 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D9	21.09.2021	21.09.2021	13.10.2021				
109	103 / PD / 2021 / PT BTN	C11, C16, C9, D4	21.09.2021	21.09.2021	14.10.2021				
110	104 / PD / 2021 / PT BTN	C10, C1, 13, D19	21.09.2021	21.09.2021	30.09.2021				
111	105 / PD / 2021 / PT BTN	C3, C2, C15, D7	23.09.2021	23.09.2021	19.10.2021				
112	106 / PD / 2021 / PT BTN	C5, C8, C17, D12	23.09.2021	23.09.2021	07.10.2021				
113	107 / PD / 2021 / PT BTN	B, C12, C6, D11	24.09.2021	24.09.2021	18.10.2021				
114	108 / PD / 2021 / PT BTN	B, C12, C6, D11	24.09.2021	24.09.2021	18.10.2021				
115	109 / PD / 2021 / PT BTN	B, C12, C6, D1	24.09.2021	24.09.2021	18.10.2021				
116	110 / PD / 2021 / PT BTN	B, C12, C6, D1	24.09.2021	24.09.2021	18.10.2021				
117	111 / PD / 2021 / PT BTN	C7, C12, C6, D15	29.09.2021	29.09.2021	13.10.2021				
118	112 / PD / 2021 / PT BTN	C16, C9, C11, D14	01.10.2021	01.10.2021	19.10.2021				
119	113 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D6	06.10.2021	06.10.2021	27.10.2021				
120	114 / PD / 2021 / PT BTN	C1, C13, C10, D5	06.10.2021	06.10.2021	26.10.2021				
121	115 / PD / 2021 / PT BTN	C2, C3, C15, D10	06.10.2021	06.10.2021	25.10.2021				
122	116 / PD / 2021 / PT BTN	C17, C5, C8, D13	06.10.2021	06.10.2021	21.10.2021				
123	117 / PD / 2021 / PT BTN	C15, C2, C3, D17	07.10.2021	07.10.2021	21.10.2021				
124	118 / PD / 2021 / PT BTN	C11, C9, C16, D20	07.10.2021	07.10.2021	19.10.2021				
125	119 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C14, C19, D12	07.10.2021	07.10.2021	26.10.2021				
126	120 / PD / 2021 / PT BTN	C7, C12, C6, D7	07.10.2021	07.10.2021	21.10.2021				
127	121 / PD / 2021 / PT BTN	C5, C8, C17, D18	18.10.2021	18.10.2021	02.11.2021				
128	122 / PD / 2021 / PT BTN	C5, C8, C17, D19	18.10.2021	18.10.2021	02.11.2021				
129	123 / PD / 2021 / PT BTN	C10, C1, C13, D16	18.10.2021	18.10.2021	05.11.2021				
130	124 / PD / 2021 / PT BTN	C13, C10, C1, D15	25.10.2021	25.10.2021	11.11.2021				
131	1 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
132	2 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
133	3 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
134	4 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
135	5 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
136	6 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C19, C18, D6	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
137	7 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D9	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
138	8 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D9	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
139	9 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D9	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
140	10 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D9	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
141	11 / PD / 2021 / PT BTN	C19, C18, C14, D9	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
142	12 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C19, C14, D4	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
143	13 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C19, C14, D4	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
144	14 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C19, C14, D4	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
145	15 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C19, C14, D4	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
146	16 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C19, C14, D4	25.10.2021	25.10.2021	03.11.2021				
147	125 / PD / 2021 / PT BTN	C2, C4, C13, D8	01.11.2021	01.11.2021	16.11.2021				
148	126 / PD / 2021 / PT BTN	C1, C10, C19, D20	01.11.2021	01.11.2021	12.11.2021				
149	127 / PD / 2021 / PT BTN	C3, C8, C17, D4	01.11.2021	01.11.2021	18.11.2021				
150	128 / PD / 2021 / PT BTN	C16, C18, C13, D13	02.11.2021	02.11.2021	11.11.2021				
151	129 / PD / 2021 / PT BTN	C6, C11, C9, D19	02.11.2021	02.11.2021	09.11.2021				
152	130 / PD / 2021 / PT BTN	C7, C14, C12, D17	02.11.2021	02.11.2021	15.11.2021				
153	131 / PD / 2021 / PT BTN	C5, C20, C15, D18	02.11.2021	02.11.2021	09.12.2021				
154	132 / PD / 2021 / PT BTN	C6, C12, C19, D16	10.11.2021	10.11.2021	17.11.2021				
155	133 / PD / 2021 / PT BTN	C10, C1, C19, D15	10.11.2021	10.11.2021	23.11.2021				
156	134 / PD / 2021 / PT BTN	C10, C1, C19, D11	11.11.2021	11.11.2021	23.11.2021				
157	135 / PD / 2021 / PT BTN	C13, C4, C2, D14	11.11.2021	11.11.2021	18.11.2021				
158	136 / PD / 2021 / PT BTN	C8, C17, C3, D12	11.11.2021	11.11.2021	07.12.2021				
159	137 / PD / 2021 / PT BTN	C15, C20, C5, D10	11.11.2021	11.11.2021	31.11.2021				
160	138 / PD / 2021 / PT BTN	C11, C6, C9, D7	11.11.2021	11.11.2021	02.12.2021				
161	139 / PD / 2021 / PT BTN	C6, C9, C11, D14	11.11.2021	11.11.2021	01.12.2021				
162	140 / PD / 2021 / PT BTN	C14, C7, C112, D14	11.11.2021	11.11.2021	02.12.2021				
163	141 / PD / 2021 / PT BTN	C5, C20, C15, D17	26.11.2021	26.11.2021	22.12.2021				
164	142 / PD / 2021 / PT BTN	C2, C4, C13, D22	26.11.2021	26.11.2021	21.12.2021				
165	143 / PD / 2021 / PT BTN	C1, C10, C19, D21	26.11.2021	26.11.2021	29.12.2021				
166	144 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C16, C13, D16	26.11.2021	26.11.2021	21.12.2021				
167	145 / PD / 2021 / PT BTN	C18, C16, C13, D13	26.11.2021	26.11.2021	21.12.2021				
168	146 / PD / 2021 / PT BTN	C17, C3, C6, D19	26.11.2021	26.11.2021	15.12.2021				


Susunan Panitia Bina Desa Tahun 2021

Ketua	DHARA SUDYANTO, S.H., M.H.
Wakil Ketua	SUDYANTO, S.H., M.H.
Anggota	1. BASRIJUN DAMAD, S.H., M.H. ID 2. KUSRYANTO, S.H., M.H. Panitia Pengabdian 3. POLMAN SAKARA, S.H., M.H. YUNDAHALI, S.H., M.H. 4. ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, S.H., M.H. SUWANTA, S.H., M.H. 5. ENYD HANAJON, S.H., M.H. 2. PODOI RAMADU, S.H. 6. RUDI HAPSA, S.H., M.H. 3. CHRISTANTO PUDJACHO, S.H., M.H. 7. SUSACHRYANADI Mulyono, S.H., M.H. WILAN WITARDI, S.H. 8. HADIMAH DESTYHARTI, S.H., M.H. 5. SITI SUDJAWATI, S.H. 9. SOLAHJUDIN, S.H., M.H. 6. ITA DALARTER P, S.H. 10. DR. BANGSALUTOM, S.H., S.E., M.H. 7. YANIS SUDYANTO, S.H. 11. VICTOR SELAMATI ZAGOT, S.H., M.H. 8. IRIE AWALUDIN, S.H. 12. ERNY MURANTO, S.H., M.H. 9. SUTISNA, S.H. 13. AGUNG SURADI, S.H., M.H. 10. SAURDA MURNI, S.H. 14. M. TUCHFATILANAM, S.H., M.H. 11. TR. WIDODO, S.H. 15. ANNALIS GEMBRING, S.H. 12. NURFUAD, S.H. 16. RAMLI DARSAH, S.H., M.H. 13. ENAR SURARYA, S.H. 17. SOPHAN SYAH, S.H., M.H. 14. NURMANAR, S.H. 18. LAURENTEUS SIBIRAN, S.H. 15. FERI ARDIANSYA, S.H., M.H. 19. EFENDI HARISBI, S.H., M.H. 16. AHMAD BEDOWI, S.H. 20. DR. SITI SURAHAT, S.H., M.H., M.M. 17. YANISOPHAN, S.H. 21. SUPRIHANTO, S.H., M.H. 18. RIANADIRDMAN, S.H., M.H. 19. MEITA YULIANA, S.H. 20. YANIRAWATI, S.H., M.H. 21. TURASH, S.H. 22. KOSASH, S.H.

AC
G5

169	147/PID.SUS/2021/PT.BTN	C2 C4 C13 D22	01.12.2021	01.12.2021	21.12.2021			
170	148/PID.SUS/2021/PT.BTN	B C8 C3 D8	07.12.2021	07.12.2021	28.12.2021			
171	149/PID.SUS/2021/PT.BTN	C14 C7 C112 D7	07.12.2021	07.12.2021	23.12.2021			
172	150/PID.SUS/2021/PT.BTN	C20 C15 C5 D12	07.12.2021	07.12.2021	14.12.2021			
173	151/PID.SUS/2021/PT.BTN	C19 C1 C10 D14	07.12.2021	07.12.2021	21.12.2021			
174	152/PID.SUS/2021/PT.BTN	C4 C2 C13 D15	07.12.2021	07.12.2021	28.12.2021			
175	153/PID/2021/PT.BTN	C12 C14 C7 D5	27.12.2021	27.12.2021		153/PID/2021/PT.BTN		
176	154/PID.SUS/2021/PT.BTN	C13 C18 C16 D21	27.12.2021	27.12.2021		154/PID.SUS/2021/PT.BTN		
177	155/PID.SUS/2021/PT.BTN	C17 C3 C8 D18	27.12.2021	27.12.2021		155/PID.SUS/2021/PT.BTN		
178	156/PID/2021/PT.BTN	C9 C6 C11 D17	27.12.2021	27.12.2021		156/PID/2021/PT.BTN		
179	157/PID/2021/PT.BTN	C10 C1 C19 D11	27.12.2021	27.12.2021		157/PID/2021/PT.BTN		

Mengetahui
PANITERA ME DA PIDANA


H. SUNIYANTA, S.H., M.H.
NIP. 19660605 199203 1 007

Serang, 31 Desember 2021
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN


ARIANTI, S.E., M.H.
NIP. 19821218 200904 2 696

Rekapitulasi Perkara Pidana Umum

1. Sisa Tahun 2020	:	4 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2021	:	157 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2021	:	156 Perkara
4. Perkara dobat	:	0 Perkara
5. Sisa belum dibagi	:	0 Perkara
6. Sisa sudah dibagi	:	5 Perkara

Rekapitulasi Perkara Pidana Khusus

1. Sisa Tahun 2020	:	0 Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2021	:	16 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2021	:	16 Perkara
4. Perkara dobat	:	0 Perkara
5. Sisa belum dibagi	:	0 Perkara
6. Sisa sudah dibagi	:	0 Perkara

Catatan: Perhitungan Apudata terdapat 2 (dua) perkara VERDICT yang tidak masuk ke dalam SPP sehingga Pencatatan secara Manual

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA KHUSUS ANAK
BULAN : JANUARI-DESEMBER TAHUN : 2021

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	1/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C4, C5, C6, D13	07.01.2021	08.01.2021	13.01.2021				<p>Sisipan Majelis A.S. Juli Tahun 2021:</p> <p>Nama : RESPATUN WISNU WIRDOYO (A) W. Nama : SUYATNO, S.H.MH (B) Nama Anggota : 1. Ny. BUDI HAPSARI, S.H. M.H. 2. SUBACHRAN HARDI MULYON <i>Paralel Pengganti</i> 3. HASAMAH DISTIYAWATI, SH, H. YUNDA HASRI, SH, MH 4. SOLAHUDDIN, SH, MH 1. N. SUNYANTA, S.H., M.H. 5. VIKTOR SELAMAT ZAGOTO, I.2. AF SAFUDALAH, S.H., M.H. 6. POSMAN BAKARA, SH 3. POEJI RAHARJO, SH 4. CHRISTANTO PUDJONO, SH, MH 5. WILAN WITARSH, S.H. 6. SITI SUSLARATI, S.H. 7. ITADA LAMTUR P, S.H. 8. YANTO BUDIYANTO, S.H. 9. EDIS AWALIJON, SH, MH 10. SUTISKA, SH 11. BAGDA MURNI, SH 12. TRI WOODO, SH, MH 13. NURFIAD, SH 14. ENAR SUNARYA, SH 15. NURMANIAH, SH</p> <p>Sisipan Majelis Bulan Agustus s.d. Desember Tahun 2021:</p> <p>Nama : CHARIS MARDIYANTO, S.H. M.H (A) W. Nama : SUYATNO, S.H. M.H (B) Nama Anggota : 1. Ny. BUDI HAPSARI, S.H. M.H. 2. SUBACHRAN HARDI MULYON <i>Paralel Pengganti</i> 3. HASAMAH DISTIYAWATI, SH, H. SUNYANTA, S.H., M.H. 4. SOLAHUDDIN, SH, MH 2. POEJI RAHARJO, SH 5. VIKTOR SELAMAT ZAGOTO, I.3. CHRISTANTO PUDJONO, SH, MH 6. POSMAN BAKARA, SH 4. WILAN WITARSH, S.H. 7. Dr. SITI SURYATI, S.H. M.H. M.H. 5. SITI SUSLARATI, S.H. 6. ITADA LAMTUR P, S.H. 7. YANTO BUDIYANTO, S.H. 8. EDIS AWALIJON, SH 9. SUTISKA, S.H. 10. BAGDA MURNI, SH 11. TRI WOODO, SH 12. NURFIAD, SH 13. ENAR SUNARYA, SH 14. NURMANIAH, SH 15. FERDINANDIAH, SH, MH 16. AHMAD SEDOWI, SH 17. YAWI SOFYAN, SH 18. RANI AZULRISMAN, SH, MH 19. MITA YELIARI, SH 20. YAWI RAHWATI, SH, MH 21. TURASH, S.H. 22. ROSADI, S.H.</p> <p>Revisi: 1. Sisa Tahun 2021 : 0 Perkara 2. Perkara Masuk Tahun 2021 : 6 Perkara 3. Perkara Putus Tahun 2021 : 6 Perkara 4. Perkara domisi : 0 Perkara 5. Sisa belum dibagi : 0 Perkara 6. Sisa sudah dibagi : 6 Perkara</p>
2	2/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C8, C4, C5, D11	07.01.2021	08.01.2021	13.01.2021				
3	3/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C1, D1	13.08.2021	13.08.2021	18.08.2021				
4	4/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C3, D13	17.11.2021	17.11.2021	22.11.2021				
5	5/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C7, D18	23.11.2021	23.11.2021	29.11.2021				
6	6/PRD.SUS-ANAK/2021/PT.BTN	C3, C4, C5, D 13	27.12.2021	27.12.2021	29.12.2021				

Mengetahui :
PANITERA MUDA PIDANA

SUNIYANTA, S.H., MH
NIP. 19660608 199203 1 007

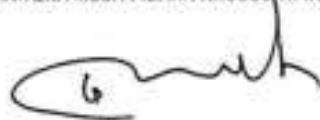
Sarang, 31 Desember 2021
PETUGAS PEMBUAT LAPORAN

ARIANTISE, MH
NIP. 19821218 200904 2 006

LAPORAN TAHUNAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BULAN : JANUARI - DESEMBER TAHUN : 2021

NO.	NOMOR PERKARA YANG BELUM DIPUTUS	NAMA HAKIM / MAJELIS	TANGGAL			SISA AKHIR BULAN			KETERANGAN
			PENERIMAAN	PENUNJUKKAN HAKIM / MAJELIS	PUTUSAN	BELUM DIBAGI	BELUM DIPUTUS	BELUM DIMINUTIR	
1	1/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN (L1)	C2.C4.C5.D13	27.1.2021	28.1.2021	1.3.2021 (Memperbaiki)			Minutasi tanggal : 3.3.2021	Susunan Majelis Hakim Tipikor tanggal 22 Januari 2021 : Ketua : : RESPATUN WISNU WARDYOYO, S.H. (A) Wakil Ketua : : H. SUDIYATNO, S.H.,M.H. (B) Hakim Anggota : 1. DR.WAHIDIN, S.H.,M.Hum. (C) 2. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H. 3. BUDI HAPSARI, S.H. 4. DR.BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H. 5. DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN. 6. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.
2	2/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN (L1)	C1.C3.C6.D18	18.11.2021	16.11.2021	8.12.2021 (Memperbaiki)			Minutasi tanggal : 9.12.2021	
3	3/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN (P1)	C1.C2.C6.D19	20.12.2021	20.12.2021			3/PID.SUS-TPK/2021/PT.BTN		Panitera Pengganti : YUNDA HASBI, S.H.,M.H. (D) 1. H. SUNYANTA, S.H.,M.H. 2. POEDJI RAHARDJO, S.H. 3. AF SAIFUDAULLAH, S.H.,M.H. 4. CHRISTANTO PUJIONO, S.H.,M.H. 5. IDHAM CHOLIQ, S.H. 6. IDRIS AWALUDDIN, S.H.,M.H. 7. ITAIDA LAMTIUR PANGARIBUHAN, S.H. 8. WILAN WITARSIH, S.H.,M.H. 9. YANTO BUDIYANTO, S.H. 10. SUTISNA, S.H. 11. SITI SUSILAWATI, S.H. 12. BASRIDA MURNI, S.H. 13. TRI WODOO, S.H.,M.H. 14. UDIING SAEFUDIN, S.H. 15. NURFUJAD, S.H. 16. ENAR SUMARYA, S.H. 17. NURMANIAH, S.H. 18. FERI ARDIANSYA, S.H.,M.H. 19. AHMAD BAEDOWI, S.H.
									Susunan Majelis Hakim Tipikor tanggal 15 Juli 2021 Ketua : : - (A) Wakil Ketua : : H. SUDIYATNO, S.H.,M.H. (B) Hakim Anggota : 1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H. (C) 2. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H. 3. DR.BINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H. 4. DERMAWAN S. DJAMIAN, S.H.,M.H.,CN. 5. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H. 6. UDIING SUMARDIANA, S.H.,M.H.
									Panitera Pengganti : YUNDA HASBI, S.H.,M.H. (D) 1. H. SUNYANTA, S.H.,M.H. 2. POEDJI RAHARDJO, S.H. 3. TRI WODOO, S.H.,M.H.

Mengetahui,
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS TIPIKOR



TRI WODOO, S.H.,M.H.

Serang, 31 Desember 2021
PEMBUAT LAPORAN TAHUNAN



SITI KHOIRUN NISA, S.H.

4. CHRISTANTO PUJIONO, S.H.,M.H.
5. IDRIS AWALUDDIN, S.H.,M.H.
6. ITAIDA LAMTILIR PANGARIBUAN, S.H.
7. WILAN WITARSH, S.H.,M.H.
8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
9. SUTISNA, S.H.
10. SITI SUSLAWATI, S.H.
11. BASRIDA MURNI, S.H.
12. NURFUAD, S.H.
13. ENAR SUNARYA, S.H.
14. NURMANIAH, S.H.
15. FERI ARDIANSYA, S.H.,M.H.
16. AHMAD BAEDOWI, S.H.
17. YANI IRAWATI, S.H.,M.H.
18. YANI SOFYAN, S.H.
19. RIAN ABURISMAN, S.H.
20. MEITA YULIANA, S.H.

Susunan Majelis Hakim Tipikor tanggal 25 Oktober 2021

Ketua : : CHARIS MARDIYANTO, S.H.,M.H. (A)

Wakil Ketua : : H. SUDIYATNO, S.H.,M.H. (B)

Hakim Anggota : : 1. SUBACHRAN HARDI MULYONO, S.H.,M.H. (C)

2. BUDI HAPSARI, S.H.,M.H.
3. DYBINSAR GULTOM, S.H.,S.E.,M.H.
4. DERMAWAN S. DJAMAH, S.H.,M.H.,CN.
5. EDI SUPARTA RASWADIPUTRA, S.H.
6. UDIING SUMARDIANA, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti : YUNDA HASBI, S.H.,M.H. (D)

1. H. SUNYANTA, S.H.,M.H.
2. POEDJI RAHARDJO, S.H.
3. TRI WODOO, S.H.,M.H.
4. CHRISTANTO PUJIONO, S.H.,M.H.
5. IDRIS AWALUDDIN, S.H.,M.H.
6. ITAIDA LAMTILIR PANGARIBUAN, S.H.
7. WILAN WITARSH, S.H.,M.H.
8. YANTO BUDIYANTO, S.H.
9. SUTISNA, S.H.
10. SITI SUSLAWATI, S.H.
11. BASRIDA MURNI, S.H.
12. NURFUAD, S.H.
13. ENAR SUNARYA, S.H.
14. NURMANIAH, S.H.
15. FERI ARDIANSYA, S.H.,M.H.
16. AHMAD BAEDOWI, S.H.
17. YANI IRAWATI, S.H.,M.H.
18. YANI SOFYAN, S.H.
19. RIAN ABURISMAN, S.H.
20. MEITA YULIANA, S.H.
21. TURASH, S.H.
22. KOSASIH, S.H.

REKAPITULASI :

1. Sisa Tahun 2020 : - Perkara
2. Perkara Masuk Tahun 2021 : 3 Perkara
3. Perkara Putus Tahun 2021 : 2 Perkara
4. Sisa belum dibagi : - Perkara
5. Sisa sudah dibagi : 1 Perkara



Dashboard

STATISTIK PERKARA TK BANTENG

Statistik Penanganan Perkara (Keadaan Perkara Berdasarkan Jenis Perkara & Waktu Tersebut)

RELAH PERIODE YANG DITAMPELKAN

01/01/2021 - 31/12/2021

Tampilkan

Kembali

Perdata

RASIO PENANGANAN PERKARA 95% ↑

Belum Proses 375
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Sisa Perkara 25
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Masuk Perkara 257
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Putus Perkara 269
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Sisa Akhir Perkara 13
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Pidana Biasa

RASIO PENANGANAN PERKARA 97% ↓

Belum Proses 185
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Sisa Perkara 4
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Masuk Perkara 173
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Putus Perkara 172
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Sisa Akhir Perkara 5
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Pidana Tipikor

RASIO PENANGANAN PERKARA 67% ↓

Belum Proses 3
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Sisa Perkara -
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Masuk Perkara 3
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Putus Perkara 2
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Sisa Akhir Perkara 1
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Pidana Khusus Anak

RASIO PENANGANAN PERKARA 100% ↑

Belum Proses 7
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Sisa Perkara -
Sampai Dengan Tanggal 01.01.2022

Masuk Perkara 6
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Putus Perkara 6
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021

Sisa Akhir Perkara -
Sampai Dengan Tanggal 31.12.2021



STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Januari 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minulasi	Belum Minulasi	Sisa
1	Gugatan	427	114	90	50	0	453
2	Pemohonan	45	50	59	47	0	44
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Santunan (sinden verbal)	10	4	0	0	0	14
8	Gugatan Sedehana	26	9	8	2	0	32
9	Pemohonan Komersial	351	14	5	8	0	340
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	401	142	202	125	0	541
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu Lintas	0	327	327	327	0	0
15	Pidana Anak	7	3	3	2	0	7
16	Pidana Propperadilan	2	0	2	1	0	0
Total							1472

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Februari 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minulasi	Belum Minulasi	Sisa
1	Gugatan	453	109	94	60	0	464
2	Pemohonan	44	83	92	76	0	89
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Santunan (sinden verbal)	14	1	3	2	0	12
8	Gugatan Sedehana	32	9	9	6	0	32
9	Pemohonan Komersial	340	7	14	14	0	351
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	541	177	157	129	0	531
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu Lintas	0	900	900	900	0	0
15	Pidana Anak	7	2	4	3	0	8
16	Pidana Propperadilan	0	3	0	0	0	3
Total							1499

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2021

Laporan Statistik Perkara

#Bil periode laporan : Maret 2021

No	Klasifikasi	Sta Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minufas	Belum Minufas	Sta
1	Gugatan	644	152	143	94	0	675
2	Pemohonan	59	109	93	54	0	73
3	Kepalitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundian Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (darden vepet)	13	5	3	1	0	15
8	Gugatan Sederhana	32	9	8	6	0	35
9	Pemohonan Kasinyal	351	15	0	0	0	366
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	501	215	197	125	0	549
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepaf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	0	2077	2077	2077	0	0
15	Pidana Anak	0	3	2	1	0	4
16	Pidana Propperadilan	3	1	4	4	0	0
Total							1717

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2021

Laporan Statistik Perkara

#Bil periode laporan : April 2021

No	Klasifikasi	Sta Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minufas	Belum Minufas	Sta
1	Gugatan	675	129	110	77	0	693
2	Pemohonan	73	116	118	114	0	71
3	Kepalitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundian Kewajiban Pembayaran Utang	3	0	0	0	0	3
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	3	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (darden vepet)	15	5	1	1	0	19
8	Gugatan Sederhana	33	6	12	5	0	29
9	Pemohonan Kasinyal	366	9	7	7	0	368
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	549	184	195	146	0	538
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepaf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	0	640	640	640	0	0
15	Pidana Anak	4	2	2	1	0	6
16	Pidana Propperadilan	3	1	1	1	0	2
Total							1724



STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Mei

2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluha	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	483	100	104	46	0	489
2	Pemukatan	21	29	37	19	0	43
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sederen vertikal)	19	4	3	2	0	21
8	Gugatan Sederhana	29	9	7	5	0	31
9	Pemohonan Konvensional	348	0	1	1	0	347
10	KPPs	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Bawa	606	177	140	118	0	647
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Jalil-Limbak	0	343	343	343	0	0
15	Pidana Anak	4	3	1	0	0	1
16	Pidana Prosepidikan	2	0	2	2	0	0
Total							1748

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juni

2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluha	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	489	124	122	88	0	491
2	Pemukatan	43	21	21	35	0	43
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sederen vertikal)	21	3	2	2	0	22
8	Gugatan Sederhana	31	5	11	9	0	23
9	Pemohonan Konvensional	347	0	3	3	0	345
10	KPPs	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Bawa	647	170	192	138	0	647
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Jalil-Limbak	0	174	174	174	0	0
15	Pidana Anak	1	4	1	1	0	10
16	Pidana Prosepidikan	0	1	1	1	0	0
Total							1713



STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Jul 2021

No	Kategori	Dasar Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minatitas	Iskara Minatitas	Dasar
1	Gugatan	481	79	79	47	0	477
2	Pemohonan	49	42	44	39	0	39
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (denda vanat)	23	1	0	0	0	23
8	Gugatan Sederhana	28	9	4	4	0	30
9	Pemohonan Kampanye	368	0	18	19	0	380
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	847	120	168	119	0	802
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepak	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lelu-Lintas	0	854	854	854	0	0
15	Pidana Anak	10	2	0	2	0	7
16	Pidana Prosekuensi	0	1	0	0	0	1
Total							1447

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Agustus 2021

No	Kategori	Dasar Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minatitas	Iskara Minatitas	Dasar
1	Gugatan	477	88	119	88	1	483
2	Pemohonan	39	74	76	74	0	37
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (denda vanat)	23	2	1	0	0	24
8	Gugatan Sederhana	30	4	7	2	0	37
9	Pemohonan Kampanye	388	0	0	0	0	380
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	802	118	141	100	0	854
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepak	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lelu-Lintas	0	270	270	270	0	0
15	Pidana Anak	7	2	2	3	0	7
16	Pidana Prosekuensi	1	1	1	1	0	3
Total							1474



STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan :

No	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Sisa Minutasi	Sisa
1	Gugatan	432	114	135	104	0	432
2	Pemohonan	57	119	10	74	0	75
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Kantahan (denda verbal)	24	2	7	4	0	19
8	Gugatan Sederhana	27	10	4	4	0	31
9	Pemohonan Eksekusi	360	18	0	0	0	368
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	554	167	325	181	0	615
12	Pidana Singkat	0	14	14	14	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lulu-Lintas	0	109	109	109	0	0
15	Pidana Anak	7	8	3	3	0	9
16	Pidana Propperadisi	2	0	1	1	0	1
						Total	1481

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan :

No	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Sisa Minutasi	Sisa
1	Gugatan	432	120	107	81	0	445
2	Pemohonan	75	104	106	105	0	79
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Kantahan (denda verbal)	19	3	0	0	0	22
8	Gugatan Sederhana	22	5	3	4	0	29
9	Pemohonan Eksekusi	365	1	12	12	0	384
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	615	163	155	120	1	610
12	Pidana Singkat	0	1	1	1	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lulu-Lintas	0	1515	1515	1515	0	0
15	Pidana Anak	9	6	9	8	0	4
16	Pidana Propperadisi	1	0	1	1	0	0
						Total	1445



STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2021

Laporan Statistik Perkara							
Msk periode laporan : <input type="text" value="November"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Batal"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	645	107	102	97	3	645
2	Pemohonan	77	121	122	118	3	79
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penyusutan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (penden verbal)	22	1	5	6	9	39
8	Gugatan Bedahana	29	4	0	7	3	25
9	Pemohonan Kehinyatan	354	1	4	3	0	351
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	510	160	172	140	0	503
12	Pidana Singkat	0	1	0	0	0	1
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Labu-Lintar	0	1007	1007	1007	0	0
15	Pidana Anak	4	1	2	1	0	3
16	Pidana Propperodien	0	3	0	0	0	3
						Total	4334

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2021

Laporan Statistik Perkara							
Msk periode laporan : <input type="text" value="Desember"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Batal"/>							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	600	119	114	90	0	605
2	Pemohonan	75	110	110	109	0	75
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penyusutan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (penden verbal)	19	1	2	1	0	17
8	Gugatan Bedahana	29	7	7	6	0	23
9	Pemohonan Kehinyatan	301	9	0	3	0	300
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	503	210	154	148	1	557
12	Pidana Singkat	1	4	4	3	0	2
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Labu-Lintar	0	743	743	743	0	0
15	Pidana Anak	5	2	6	4	0	6
16	Pidana Propperodien	3	1	4	4	0	0
						Total	1791



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI SERANG

Beranda | Portal Umum | Portal Khusus | Pidana | Pidana Khusus | Jadwal Sidang | Laporan | Statistik

STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Januari 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Amnesti	Sisa Bulan Ini	Sisa
1	Dugulan	73	12	10	4	0	73
2	Pemohonan	1	31	22	21	0	14
3	Kepailitan	0	0	3	0	0	3
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	3	0	3	3	0	3
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	3	0	0	3
6	Pengadilan Hubungan Industrial	22	14	14	3	0	24
7	Perkawinan/Batalan (jordan versal)	1	0	1	1	0	1
8	Dugulan Sederhana	1	2	1	0	0	2
9	Pemohonan Kontesasi	0	0	3	0	0	3
10	KPU	0	0	3	0	0	3
11	Pidana Baza	211	68	72	71	0	206
12	Pidana Singkat	0	0	3	0	0	3
13	Pidana Deport	0	0	3	0	0	3
14	Perampok Laku-Lintas	0	477	477	477	0	0
15	Sidak Pidana Korupsi	8	8	1	1	0	12
16	Pidana Anak	8	4	2	2	0	10
17	Pidana Preparadikal	0	1	3	0	0	1
Total							374

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Februari 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Amnesti	Sisa Bulan Ini	Sisa
1	Dugulan	73	13	11	17	0	69
2	Pemohonan	14	21	24	28	0	11
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	3	0	3	3	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	3	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	24	13	0	3	0	47
7	Perkawinan/Batalan (jordan versal)	1	0	0	0	0	1
8	Dugulan Sederhana	2	1	2	2	0	1
9	Pemohonan Kontesasi	0	12	0	3	0	12
10	KPU	0	0	0	3	0	0
11	Pidana Baza	206	80	89	84	0	186
12	Pidana Singkat	0	0	0	3	0	0
13	Pidana Deport	0	2	2	2	0	0
14	Perampok Laku-Lintas	0	1492	1492	1492	0	0
15	Sidak Pidana Korupsi	12	5	3	1	0	16
16	Pidana Anak	10	4	4	4	0	0
17	Pidana Preparadikal	1	0	1	1	0	0



STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filter periode laporan : Maret 2021							
No	Klasifikasi	Dasar Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Manfaat	Beasiswa Manfaat	Dasar
1	Dugelan	08	11	02	14	0	08
2	Pemerksaan	11	24	08	24	0	7
3	Kepolisian	0	0	0	0	0	0
4	Pendidikan kewarganegaraan Pembinaan Warga	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	47	23	17	12	0	73
7	Pelaksanaan/Bantuan (sinden resmi)	1	1	0	0	0	2
8	Dugelan Sederhana	1	0	0	0	0	1
9	Pembinaan Keadayaan	12	0	12	12	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	184	78	103	91	0	189
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
15	Tindak Pidana Korupsi	10	4	4	2	0	10
16	Pidana Anak	0	1	0	0	0	1
17	Pidana Prosepidan	0	1	0	0	0	1
Total							304

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filter periode laporan : April 2021							
No	Klasifikasi	Dasar Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Manfaat	Beasiswa Manfaat	Dasar
1	Dugelan	08	14	04	21	0	48
2	Pemerksaan	7	22	10	16	0	14
3	Kepolisian	0	0	0	0	0	0
4	Pendidikan kewarganegaraan Pembinaan Warga	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	72	24	14	2	0	80
7	Pelaksanaan/Bantuan (sinden resmi)	2	0	0	0	0	2
8	Dugelan Sederhana	1	1	1	1	0	1
9	Pembinaan Keadayaan	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	189	100	100	87	0	189
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	0	0	1	0	0
14	Perkara Lain-Lain	0	0	0	0	0	0
15	Tindak Pidana Korupsi	10	0	0	0	0	10
16	Pidana Anak	1	1	4	4	0	2
17	Pidana Prosepidan	1	7	7	0	0	1
Total							384



STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Mei 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minimasi	Sisa Minimasi	Sisa	
1	Gugatan	48	11	6	8	0	88	
2	Pemohonan	14	17	19	19	0	12	
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	
4	Perundingan kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0	
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0	
6	Pengadilan Hubungan Industrial	63	7	18	12	0	78	
7	Perkawinan/batalan (dengan surat)	2	0	0	0	0	2	
8	Gugatan Sedemana	1	1	1	1	0	1	
9	Pemohonan Koneksi	0	0	0	0	0	0	
10	KPU	0	0	0	0	0	0	
11	Pidana Biasa	187	88	70	67	0	178	
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0	
14	Perkara Lelu-Lintas	0	1092	1192	1192	0	0	
15	Tindak Pidana Korupsi	12	0	1	1	0	11	
16	Pidana Anak	0	4	3	3	0	9	
17	Pidana Proseperadilan	1	1	2	2	0	0	
Total							1338	1338

Go to Settings to activate Windows.

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Juni 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minimasi	Sisa Minimasi	Sisa	
1	Gugatan	88	12	11	10	0	88	
2	Pemohonan	12	24	28	24	0	18	
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0	
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0	
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0	
6	Pengadilan Hubungan Industrial	78	10	21	17	0	68	
7	Perkawinan/batalan (dengan surat)	2	0	1	0	0	1	
8	Gugatan Sedemana	1	4	1	1	0	4	
9	Pemohonan Koneksi	0	1	0	0	0	1	
10	KPU	0	0	0	0	0	0	
11	Pidana Biasa	178	127	102	94	0	200	
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0	
14	Perkara Lelu-Lintas	0	1744	1817	1817	0	127	
15	Tindak Pidana Korupsi	11	2	7	2	0	6	
16	Pidana Anak	9	12	3	3	0	14	
17	Pidana Proseperadilan	0	2	0	0	0	2	
Total							1073	1073

Go to Settings to activate Windows.



STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Juli 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minatasi	Sisa Minatasi	Sisa
1	Dugufan	54	17	7	5	0	44
2	Pemohonan	18	25	23	24	0	18
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Keagamaan Perundingan Ulang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	44	10	4	4	0	44
7	Perkawinan/Batalkan (dandan versat)	1	0	0	0	0	1
8	Dugufan Sederhana	4	3	4	3	0	3
9	Pemohonan Kasasi	1	0	0	0	0	1
10	EPK	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	228	91	88	88	0	228
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	00	00	00	0	0
14	Perkara Jalur Cepat	227	1247	1224	1224	0	0
15	Banduk Pidana Korupsi	4	3	0	0	0	4
16	Pidana Anak	14	5	3	0	0	0
17	Pidana Preparadikal	2	1	2	2	0	1
Total							464

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Agustus 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minatasi	Sisa Minatasi	Sisa
1	Dugufan	44	19	18	12	0	40
2	Pemohonan	18	16	24	24	0	18
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Keagamaan Perundingan Ulang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	44	10	12	10	0	44
7	Perkawinan/Batalkan (dandan versat)	1	1	0	0	0	2
8	Dugufan Sederhana	2	1	4	4	0	0
9	Pemohonan Kasasi	1	4	0	0	0	7
10	EPK	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	203	94	110	94	0	219
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Jalur Cepat	0	200	122	122	0	279
15	Banduk Pidana Korupsi	4	4	4	0	0	4
16	Pidana Anak	4	0	0	0	0	5
17	Pidana Preparadikal	1	0	1	1	0	0
Total							1172



STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan :

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	70	13	20	18	0	63
2	Pemohonan	20	22	14	23	3	16
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	67	0	13	13	3	28
7	Pelaksanaan/Sanksi (denda wajib)	2	0	1	1	0	1
8	Gugatan Gadjahana	0	2	1	0	0	1
9	Pemohonan Konvensional	7	0	4	4	0	1
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	219	91	142	140	0	140
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	1	1	1	0	0
14	Perkara Luar Negeri	779	243	243	243	0	649
15	Tindak Pidana Korupsi	0	2	0	0	0	11
16	Pidana Anak	6	0	0	0	0	0
17	Pidana Prosepidan	0	2	1	1	0	1
Total							877

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan :

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	62	18	18	18	0	60
2	Pemohonan	14	22	22	20	0	11
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	34	12	23	19	0	43
7	Pelaksanaan/Sanksi (denda wajib)	1	0	0	0	0	1
8	Gugatan Gadjahana	1	2	1	1	0	2
9	Pemohonan Konvensional	1	0	0	0	0	1
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	140	94	87	84	0	107
12	Pidana Singkat	0	2	2	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	2	2	2	0	0
14	Perkara Luar Negeri	649	179	249	249	0	0
15	Tindak Pidana Korupsi	11	0	0	0	0	18
16	Pidana Anak	0	2	2	1	0	11
17	Pidana Prosepidan	1	2	1	1	0	2
Total							309



STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : November 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluhan	Meninggal	Sisa Meninggal	Sisa
1	Dugatan	40	24	14	11	0	70
2	Pemohonan	11	11	24	34	0	17
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perunduan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	21	21	16	0	45
7	Perlawanan/Bantahan (denda, verzelf)	1	0	0	0	0	1
8	Dugatan Seberhala	0	3	3	3	0	3
9	Pemohonan Kewajiban	1	0	0	0	0	1
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	187	89	80	72	0	174
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	2	2	3	0	0
14	Perkara Lalu-Untai	0	3282	2987	2987	0	249
15	Tindak Pidana Korupsi	18	3	3	0	0	17
16	Pidana Anak	11	1	2	3	0	12
17	Pidana Preparatorial	2	1	2	3	0	0

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Desember 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluhan	Meninggal	Sisa Meninggal	Sisa
1	Dugatan	70	4	18	11	1	88
2	Pemohonan	12	11	11	10	1	10
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perunduan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	45	10	12	8	0	40
7	Perlawanan/Bantahan (denda, verzelf)	1	0	0	0	0	1
8	Dugatan Seberhala	3	3	4	4	0	2
9	Pemohonan Kewajiban	1	15	0	0	0	14
10	KPPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	174	114	91	88	1	201
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Untai	249	1040	1217	1217	0	0
15	Tindak Pidana Korupsi	17	2	0	0	0	19
16	Pidana Anak	12	4	4	5	0	10
17	Pidana Preparatorial	0	2	0	0	0	2



STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Januari 2021							
No	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Saluran Minutasi	Sisa
1	Gugatan	9	8	3	3	0	11
2	Pemohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sideriti vazei)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pemohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	28	17	18	18	0	27
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Untas	0	144	144	144	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Februari 2021							
No	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Saluran Minutasi	Sisa
1	Gugatan	11	3	2	2	0	12
2	Pemohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sideriti vazei)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	4	3	3	0	3
9	Pemohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	27	13	21	21	0	19
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Untas	0	210	210	210	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preparasi	0	0	0	0	0	0
Total							34



STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2021

Laporan Statistik Perkara

Fili periode laporan : Maret 2021

No.	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minatasi	Selam Minatasi	Sisa
1	Gugatan	12	1	3	0	0	10
2	Permohonan	0	0	0	0	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundangan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perkawinan/Berkaitan (dengan verset)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Bekerja	0	4	3	0	0	4
9	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	19	30	14	14	0	39
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku Lintas	0	0	0	0	0	0
15	Pidana Anak	0	1	0	0	0	1
16	Pidana Preparadon	0	0	0	0	0	0
Jumlah							82

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2021

Laporan Statistik Perkara

Fili periode laporan : April 2021

No.	Kategori	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minatasi	Selam Minatasi	Sisa
1	Gugatan	10	0	0	4	0	10
2	Permohonan	0	2	1	0	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundangan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perkawinan/Berkaitan (dengan verset)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Bekerja	4	1	1	0	0	4
9	Permohonan Kasasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	38	37	29	29	0	47
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Ceraf	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku Lintas	0	10	10	10	0	0
15	Pidana Anak	1	2	1	1	0	0
16	Pidana Preparadon	0	0	0	0	0	0
Jumlah							86



STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Mei 2021

No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutas	Selanjut Minutas	Saldo
1	Gugatan	10	0	1	1	0	9
2	Pemohonan	1	1	2	2	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengaduan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sarbanahar (Benda Vessel)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Bederhana	4	2	5	5	0	1
9	Pemohonan Kamahkamat	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	42	28	7	7	0	64
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Capiat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	181	181	181	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preparadisi	0	0	0	0	0	0
Total							74

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2021

Laporan Statistik Perkara

Filter periode laporan : Juni 2021

No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutas	Selanjut Minutas	Saldo
1	Gugatan	9	2	1	1	0	10
2	Pemohonan	0	4	2	2	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengaduan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sarbanahar (Benda Vessel)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Bederhana	1	11	7	7	0	5
9	Pemohonan Kamahkamat	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	44	22	42	37	0	64
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Capiat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	113	113	113	0	0
15	Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
16	Pidana Preparadisi	0	0	0	0	0	0
Total							92



STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2021

Laporan Statistik Perkara

Filtir periode laporan : Juli 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Bekas Minutasi	Sisa
1	Gugatan	10	1	7	0	0	10
2	Permohonan	7	2	4	3	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sarfahak (sarden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	5	5	5	5	0	5
9	Permohonan Koneksi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	44	15	23	21	0	36
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lelu-Lintas	32	110	100	550	0	0
15	Pidana Anak	0	1	0	0	0	1
16	Pidana Prosepidan	0	0	0	0	0	0
Jumlah							82

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2021

Laporan Statistik Perkara

Filtir periode laporan : Agustus 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Bekas Minutasi	Sisa
1	Gugatan	10	1	3	3	0	8
2	Permohonan	0	3	0	0	0	3
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sarfahak (sarden verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	5	7	10	10	0	5
9	Permohonan Koneksi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	36	31	29	28	0	38
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lelu-Lintas	3	54	54	54	0	0
15	Pidana Anak	1	1	1	1	0	1
16	Pidana Prosepidan	0	0	0	0	0	0
Jumlah							81



STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2021

Laporan Statistik Perkara

PKH periode laporan : September 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Saldo Minutasi	Sisa
1	Gugatan	0	4	7	4	0	0
2	Pemohonan	2	0	2	2	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sederet verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	2	0	2	2	0	0
9	Pemohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	20	20	18	10	0	24
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	137	13	13	0	24
15	Pidana Anak	1	1	2	1	0	0
16	Pidana Prosepidilan	0	0	0	0	0	0
Total							80

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2021

Laporan Statistik Perkara

PKH periode laporan : Oktober 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Saldo Minutasi	Sisa
1	Gugatan	0	0	0	2	0	7
2	Pemohonan	0	1	1	1	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (sederet verzet)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	10	0	0	0	10
9	Pemohonan Konsinyasi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	0	14	33	30	0	22
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	24	43	77	77	0	0
15	Pidana Anak	0	1	0	0	0	1
16	Pidana Prosepidilan	0	0	0	0	0	0
Total							80



STATISTIK PERKARA

Bulan : November 2021

Laporan Statistik Perkara							
PKB periode laporan : November 2021							
No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putusan	Minutus	Saldo Minutus	Saldo
1	Gugatan	7	2	2	3	0	7
2	Pemohonan	0	2	1	0	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sanctiwan (scheiden verset)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Tederhana	13	5	14	13	0	4
9	Pemohonan Karahiyati	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Putana Biasa	32	34	17	17	0	39
12	Putana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Putana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Luar-Lintas	0	42	42	42	0	0
15	Putana Anak	1	0	1	1	0	0
16	Putana Prosedurial	0	0	0	0	0	0
Total							81

STATISTIK PERKARA

Bulan : Desember 2021

Laporan Statistik Perkara							
PKB periode laporan : Desember 2021							
No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putusan	Minutus	Saldo Minutus	Saldo
1	Gugatan	7	4	2	2	0	9
2	Pemohonan	1	4	4	4	0	1
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kawajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Sanctiwan (scheiden verset)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Tederhana	4	10	14	14	0	0
9	Pemohonan Karahiyati	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Putana Biasa	39	18	44	44	0	10
12	Putana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Putana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Luar-Lintas	0	33	33	33	0	0
15	Putana Anak	0	3	3	3	0	0
16	Putana Prosedurial	0	1	1	1	0	0
Total							33



STATISTIK PERKARA

Bulan : Januari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filtir periode laporan : Januari 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	4	3	0	0	0	8
2	Pemohonan	0	13	7	7	0	6
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (Jandani versat)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pemohonan Kasihnyai	0	0	1	1	0	2
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	30	34	29	29	0	40
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	0	342	342	342	0	0
15	Pidana Anaf	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							58

STATISTIK PERKARA

Bulan : Februari 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filtir periode laporan : Februari 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutus	Sisa Minutus	Sisa
1	Gugatan	4	3	3	3	0	8
2	Pemohonan	0	9	7	7	0	7
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (Jandani versat)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pemohonan Kasihnyai	2	0	1	1	0	1
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	42	18	17	17	0	40
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Lalu-Lintas	0	282	282	282	0	0
15	Pidana Anaf	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							69



STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Maret 2021

No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Saldo Minutasi	Saldo
1	Gugatan	8	3	2	2	8	9
2	Pemohonan	7	4	10	10	3	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (dengan surat)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	1	0	0	0	1
9	Pemohonan Konvensional	1	0	1	1	0	0
10	KPR	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	43	18	23	23	0	38
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	197	197	197	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							81

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2021

No	Klasifikasi	Saldo Bulan Lalu	Perkara Masuk	Pulus	Minutasi	Saldo Minutasi	Saldo
1	Gugatan	9	2	2	2	0	9
2	Pemohonan	3	4	3	3	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (dengan surat)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	1	0	1	1	0	1
9	Pemohonan Konvensional	0	0	0	0	0	0
10	KPR	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	28	11	28	28	0	21
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	3	3	3	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	313	313	313	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preperadilan	0	0	0	0	0	0
Total							33



STATISTIK PERKARA

Bulan : Mei 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filter periode laporan : Mei 2021							
No	Kategori	Jumlah Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluhan	Minutus	Belum Minutus	Sisa
1	Dugatan	7	4	0	0	0	13
2	Pemohonan	3	2	2	3	0	1
3	Kepolisian	0	0	0	0	0	0
4	Ferundasi Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (Benda Sempit)	0	0	0	0	0	0
8	Dugatan Boleh-bela	1	2	1	1	0	2
9	Pemohonan Kasusnyai	0	0	0	0	0	0
10	KPPH	2	0	0	0	0	0
11	Pidana Bawah	31	30	18	18	0	36
12	Pidana Sengat	9	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	419	419	419	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preparadon	0	0	0	0	0	0
Total							48

STATISTIK PERKARA

Bulan : Juni 2021

Laporan Statistik Perkara							
Filter periode laporan : Jun 2021							
No	Kategori	Jumlah Bulan Lalu	Perkara Masuk	Puluhan	Minutus	Belum Minutus	Sisa
1	Dugatan	10	6	4	4	0	12
2	Pemohonan	0	4	2	2	0	0
3	Kepolisian	0	0	0	0	0	0
4	Ferundasi Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (Benda Sempit)	0	0	0	0	0	0
8	Dugatan Boleh-bela	3	9	0	0	0	0
9	Pemohonan Kasusnyai	0	0	0	0	0	0
10	KPPH	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Bawah	26	18	10	10	0	28
12	Pidana Sengat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	272	272	272	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Preparadon	0	0	0	0	0	0
Total							47



STATISTIK PERKARA

Bulan : Juli 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Juli 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutas	Belum Minutas	Sisa
1	Gugatan	12	2	0	0	0	14
2	Pemohonan	3	3	4	4	0	2
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Pertawanan/Bantuan (denda, verbal)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	3	0	3	3	0	0
9	Pemohonan Konvensional	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	29	18	18	18	0	29
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	4	4	4	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	357	357	357	0	0
15	Pidana Anak	0	2	2	2	0	0
14	Pidana Perbuatan	0	0	0	0	0	0
Total							48

STATISTIK PERKARA

Bulan : Agustus 2021

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : Agustus 2021

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutas	Belum Minutas	Sisa
1	Gugatan	14	5	2	2	0	17
2	Pemohonan	2	0	4	4	0	4
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Perundingan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Pertawanan/Bantuan (denda, verbal)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pemohonan Konvensional	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	29	20	12	12	0	45
12	Pidana Singkal	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
14	Perkara Laku-Lintas	0	158	158	158	0	0
15	Pidana Anak	0	1	1	1	0	0
14	Pidana Perbuatan	0	0	0	0	0	0
Total							66



STATISTIK PERKARA

Bulan : September 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : September 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putusan	Minutasi	Sesuai Minutasi	Sisa
1	Gugatan	17	1	2	2	0	14
2	Pemohonan	4	1	3	3	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (denda wajib)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan sederhana	0	1	1	1	0	0
9	Pemohonan Konstitusi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	48	25	21	21	0	43
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	1	1	1	0	0
14	Perkara Laku Lintas	0	242	242	242	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Prosekuensi	0	0	0	0	0	0
Total							41

STATISTIK PERKARA

Bulan : Oktober 2021

Laporan Statistik Perkara							
Pilih periode laporan : Oktober 2021							
No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putusan	Minutasi	Sesuai Minutasi	Sisa
1	Gugatan	14	3	3	3	0	14
2	Pemohonan	0	2	2	2	0	0
3	Kepailitan	0	0	0	0	0	0
4	Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	0	0	0	0	0	0
5	Hak Kekayaan Intelektual	0	0	0	0	0	0
6	Pengadilan Hubungan Industrial	0	0	0	0	0	0
7	Perlawanan/Bantahan (denda wajib)	0	0	0	0	0	0
8	Gugatan sederhana	0	0	0	0	0	0
9	Pemohonan Konstitusi	0	0	0	0	0	0
10	KPU	0	0	0	0	0	0
11	Pidana Biasa	45	20	20	20	0	47
12	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
13	Pidana Cepat	0	0	0	0	0	0
14	Perkara Laku Lintas	0	256	256	256	0	0
15	Pidana Anak	0	0	0	0	0	0
16	Pidana Prosekuensi	0	0	0	0	0	0
Total							63



PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR W29.U/187KPT/SK/KP.10.01/X/2021

TENTANG
PENUNJUKKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT) BANTEN

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN,


- Menimbang** : 1. Bahwa Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Internal untuk melakukan Penilaian dan Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
2. Bahwa untuk kelancaran program tersebut, maka dipandang perlu membentuk Tim, dan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Penjaminan Mutu dimaksud
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 ;
- c. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1939/DJU/SK/OT01.1/9/2015 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PENUNJUKKAN TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI (PMPT) BANTEN**

- KESATU** : Menunjuk dan menempatkan Hakim Tinggi dan Aparatur Peradilan yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi (PMPT) Banten;
- KEDUA** : Tugas Tim adalah merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan mengendalikan program dimaksud serta membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
- KETIGA** : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Nomor W29.U/80/KPT/SK/KP.10.01/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Oktober 2021

KETUA,

CHARIS MARDIYANTO



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
3. Kepala Badan Urusan Administrasi
c.q. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Nomor : W29.U/25/KPT/SK/KP.10.01/X/2021

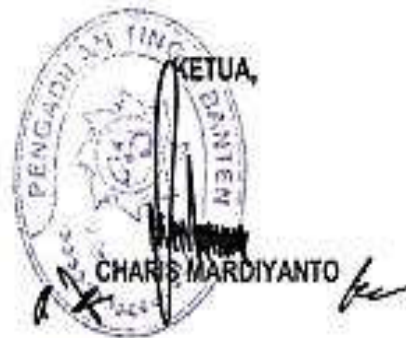
Tanggal : 26 Oktober 2021

TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI BANTEN

- KETUA TIM** : H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
(KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN)
- QUALITY MANAGER RESPRESENTATIVE (QMR)** : H. SUDIYATNO, S.H., M.H.
(WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN)
- KOORDINATOR TEKNIK** : YUNDA HASBI, S.H., M.H.
(PANITERA PENGADILAN TINGGI BANTEN)
- KOORDINATOR OPERASIONAL** : Drs. SUTIKNO, M.H.
(SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN)
- KOORDINATOR DCCUMENT CONTROL** : - NURHAYANI, S.H., M.H.
- NEVI MUGIA SANTOSA, S.E., M.Si.
ANGGOTA :
- TUTI ALAWIYAH, S.E.
- SITI KHOIRUN NISA, S.H.
- RITA HERMINA TAMARA, S.E.
- ROBI, S.H.
- YENI YULIYANI, S.E.
- WIDAYAKA PUTRA ARISTYA, S.Kom.
- RIA ANGGRAENI, S.Ak.
- KOORDINATOR SURVEY IKM DAN IPK** : POSMAN BAKARA, S.H., M.H.
ANGGOTA :
- CHRISTANTO PUJIONO, S.H., M.H.
- SATRIA ARI WIBOWO, A.Md.
- SITI HINDASYAH, S.H., M.H.
- TUTI ALAWIYAH, S.E.
- FEBRY CITRA KRISNA SHANTY

ASISTEN / ASSESOR

: SELURUH HAKIM TINGGI DAN HAKIM AD HOC



STRUKTUR ORGANISASI TIM PENJAMINAN MUTU

PENGADILAN TINGGI BANTEN (PMPT)

TOP MANAGER (TM)
H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

QUALITY MANAGER REPRESENTATIVE (QMR)
SUDIYATNO, S.H., M.H.
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN



Tugas Top Manager adalah :

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerja terkendali
2. Menetapkan kebijakan sasaran mutu di Pengadilan Tinggi Banten
3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di seluruh bagian
4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran pengadilan Tinggi Banten mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta ketentuan maupun peraturan yang berlaku
5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan
6. Memastikan bahwa persyaratan pelanggan di tetapkan dan dienuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan
7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan dibantu oleh sub bagian kepegawaian dan TI
8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahnya dipastikan berjalan lancar
9. Memfasilitasi dilakukannya Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali untuk memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu Standar Akreditasi Penjaminan Mutu – ICPE
10. Mengadakan komunikasi internal dengan Panitera dan Sekretaris minimal 2 (dua) kali dalam sebulan.

Tugas QMR Management adalah :

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar
2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi
3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan
4. Menjamin sistem mutu diperbaiki terus menerus
5. Melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada top manager
6. Mengupayakan peningkatan kesadaran /pemahaman pegawai dalam sistem manajemen mutu
7. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu
8. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh hakim/pegawai
9. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai
10. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu tentang Kinerja Tim Penjaminan Mutu PT sebagai bahan koreksi/perbaikan

KOORDINATOR TEKNIK :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu PT
2. Menunjuk/menentukan teknikal (Assessor atau Assistensi) ke setiap project audit Akreditasi Penjaminan Mutu dengan mengacu pada kompetensi, bebas dari konflik kepentingan dan ketersediaan sumber daya yang ada .
3. Memastikan pelaksanaan audit Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan sesuai prosedur
4. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan seluruh project audit Akreditasi Penjaminan Mutu.

5. Merencanakan dan membuat program audit satu siklus Akreditasi Penjaminan Mutu dan mengevaluasi keefektifannya.
6. Melakukan evaluasi dan monitoring secara periodik terhadap teknikal (Assessor atau Asistensi) .
7. Melaksanakan proses rekrutmen dan evaluasi awal Teknikal (Assessor atau Asistensi).
8. Melakukan Review terhadap laporan hasil audit Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Assessor. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu
9. Membuat laporan kepada ketua Tim Penjaminan Mutu PT tentang kegiatan Teknikal secara periodik.

KOORDINATOR OPERASIONAL :

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu PT.
2. Membuat kebijakan kebutuhan operasional proses Akreditasi Penjaminan Mutu PN.
3. Memastikan proses pendataan Akreditasi Penjaminan Mutu berjalan sesuai prosedur
4. Bertanggungjawab atas penyediaan akomodasi dan transportasi Tim dalam melakukan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.
5. Membuat program/jadwal pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.
6. Sebagai salah satu anggota pengambil keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu PN.
7. Membuat laporan kepada ketua Tim Penjaminan Mutu tentang kegiatan operasional secara periodik

Tugas Tim Audit Internal

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan secara sistematis, obyektif terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi
2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit
3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan yaitu sekurangnya 6 bulan sekali
4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu
5. Melaporkan hasil audit internal kepada Managemet Representatif

Tugas Document Control adalah:

1. Bertanggung jawab langsung kepada Quality Management Representative (QMR)/wakil,
2. Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi penjaminan mutu.
3. Melakukan control terhadap kesesuaian dokumen yang beredar.

4. Menjadi pusat data dokumentasi tim akreditasi penjaminan mutu.
5. Memastikan kecukupan dokumentasi.
6. Memastikan system dokumentasi berjalan dengan baik.
7. Membuat laporan kepada wakil atau Quality Management Representative (QMR) tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu

Tugas Tim Survei Kepuasan Pelanggan adalah:

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.
2. Tim survey kepuasan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf unit mengenai persyaratan pelanggan.
3. Melakukan survei kepuasan pelanggan secara periodik.
4. Menganalisis hasil survei sebagai rekomendasi perbaikan.
5. Membuat laporan hasil survei kepuasan pelanggan dan melaporkannya kepada Top Manager dan Management Represent



PENGADILAN TINGGI BANTEN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN
NOMOR W29.U/12/ /KPT/SK/KP.04.5/X/2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

- Menimbang** :
- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 485-1/SEK/KU.01/10/2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Penunjukan Pengadilan sebagai Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi;
 4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 6. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

7. Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 120 Tahun 2006 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 94 Tahun 2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN.**

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Banten;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dictum utama adalah:

- Memberikan dukungan pada masing-masing bagian untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Tinggi Banten;
- Membangun koordinasi dan fasilitas monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Banten;
- Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten melalui Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten.

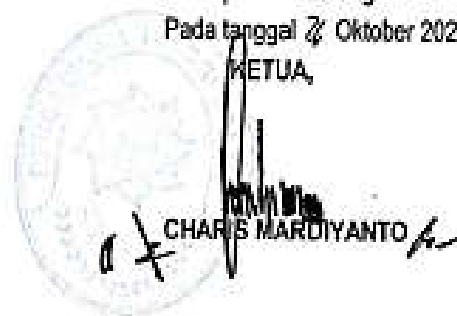
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah sesuai dengan kepentingan.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 7 Oktober 2021

KETUA,

CHARIS MARDIYANTO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN

NOMOR : W29.U/271/KPT/SK/KP.04.5/X/2021

TANGGAL : 24 Oktober 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN

Penanggung Jawab : Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Ketua : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten
Sekretaris : 1. Panitera Pengadilan Tinggi Banten
2. Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten

Anggota Tim Persiapan Penilai Internal (TPPI)


1. Imanuel Sembiring, S.H.
2. Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum.
3. Poedji Rahardjo, S.H.
4. Nurhayani, S.H., M.H.
5. Widayaka Putra Aristya, S.Kom.
6. Ninik Fujah, S.Sos.

Anggota Tim Unit Penggerak

1. Kusriyanto, S.H., M.Hum.
2. Budi Hapsari, S.H., M.H.
3. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H.
4. Suniyanta, S.H., M.H.
5. Tri Widodo, S.H., M.H.
6. Herry Setiyawan, S.T.
7. Nurfitri, S.Kom.
8. Satria Ari Wibowo, A.Md.

Anggota Tim Unit Pembangunan

1. Solahuddin, S.H., M.H.
2. Agung Suradi, S.H.
3. Nevi Mugla Santosa, S.E., M.Si
4. Sri Dian Gunarsih, S.E., Ak.
5. Cristanto Pudjiono, S.H., M.H.
6. Tuti Alawiyah, S.E.

KETUA,

CHARIS MARDIYANTO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN


NOMOR : W29.U/12/ KPT/SK/KP.04.5/2021

TANGGAL : 26 Oktober 2021

**TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
PADA PENGADILAN TINGGI BANTEN**

PEMBINA		H. CHARIS MARDIYANTO, S.H., M.H.
KETUA TIM		H. SUDIYATNO, S.H., M.H.
KOORDINATOR TEKNIS		YUNDA HASBI, S.H., M.H.
KOORDINATOR OPERASIONAL		Drs. SUTIKNO, M.H.
AREA	MATERI	NAMA TIM
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Imanuel Sembiring, S.H. (Koodinator) 2. Solahuddin, S.H., M.H. 3. Dr. Hj. Sri Suryati, S.H., M.H., M.M. 4. Edi Suparta, S.H. 5. H. Suniyanta, S.H., M.H. 6. Arfianti, S.E., M.H. 7. Rita Safitri, S.H. 8. Febry Citra K Shanty 9. Ninik Faujiah, S.Sos. 10. Pribadi Hutomo Putro, S.Kom.
II.	PENATAAN TATALAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Posman Bakara, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Masruddin Caniago, S.H., M.H. 3. Ramli Darasah, S.H. M.Hum. 4. Supriyono, S.H., M.Hum. 5. Drs. Idris Pasluni 6. Sutisna, S.H. 7. Itaida I Panganibuan, S.H. 8. Indra Bayu Segoro, S.Kom. 9. Tuti Alawiyah, S.E. 10. Surahman Firdaus
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Subachran Hardi Mulyono, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Agung Suradi, S.H. 3. Nevi Mugia Santosa, S.E., M.Si. 4. Herry Setiyawan, S.T. 5. Rita Hermina Tamara, S.E. 6. Widayaka Putra Aristya, S.Kom. 7. Hadi Subakli

IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ery Mustianto, S.H., M.H. (Koordinator) 2. Sofyan Syah, S.H., M.H. 3. Hasiamah Distiyawati, S.H., M.H. 4. Tri Widodo, S.H., M.H. 5. Sri Dian Gunarsih, S.H., Ak. 6. Siti Hindasyah, S.H., M.H. 7. Yeni Yuliani, S.E. 8. Siti Khoirun Nisa, S.H.
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kusriyanto, S.H., M.Hum. (Koordinator) 2. Victor Selamat Zagoto, S.H., M.Hum. 3. Budi Hapsari, S.H., M.H. 4. Nurfitri, S.Kom. 5. Idris Awaluddin, S.H., M.H. 6. Hayatul Jannah, S.Hi. 7. Ucu Supriatna, S.H. 8. Ria Anggraeni, S.E.
VI.	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Koordinator) 2. Laurensius Sibarani, S.H. 3. Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.Si. 4. Nurhayani, S.H., M.H. 5. Christanto Pudjiono, S.H., M.H. 6. Wilan Wilarsih, S.Ip., S.H. 7. Satria Ari Wibowo, A.Md. 8. Dwi Anthony Saputra, S.Kom. 9. Robi, S.H.



KETUA,
CHARIS MARDIYANTO